



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU  **INDONESIA EMAS** **KKP**
2025

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TRIWULAN III
TAHUN 2025





KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya kegiatan Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2025 dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan Kinerja ini sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan misi organisasi yang dituangkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKj ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi tentang pencapaian kinerja operasional perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditetapkan untuk periode triwulan III tahun 2025 yang disusun dengan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC). LKj menyajikan realisasi IKU yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Kami menyadari bahwa LKj masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.



Makassar, 14 Oktober 2025

Rt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar

Mohammad Zamrud





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
3. Arah Kebijakan dan Strategis	3
4. Sistematika dan Penyajian	4
II. PERENCANAAN KINERJA	6
1. Visi dan Misi	6
2. Tujuan Strategis	7
3. Sasaran , Indikator dan Kinerja	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
1. Capaian Kinerja	10
2. Analisis dan evaluasi	12
IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	13
IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produk produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	21
IK3. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)	28
IK4. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)	34
IK5. Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan eksport lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	39
IK6. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	49
IK7. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	53
IK8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	59
IK9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	67
IK10. Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar	74



IK11.	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	78
IK12.	Penilaian Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	87
IK13.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	91
IK14.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	95
IK15.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berprediksi menuju wilayah bebas	99
IK16.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar...	105
IK17.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Nilai)	114

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan	125
2. Rekomendasi	127
3. Tindaklanjutan	127



LAMPIRAN

Lampiran Capaian Kinerja (LCK)

IK1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	1
IK2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produk produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	18
IK3.	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)	27
IK4.	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)	34
IK5.	Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan eksport lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	40
IK6.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	51
IK7.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	58
IK8.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	66
IK9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	72
IK10.	Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar	78
IK11.	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	81
IK12.	Penilaian Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	89
IK13.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	92
IK14.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	96
IK15.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berprediksi menuju wilayah bebas	102
IK16.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	109
IK17.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Nilai)	117



RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 113,67 (istimewa) Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

Dari 17 (Tujuh belas) IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2025 ada 4 Indikator Kinerja Utama yang capainnya turun dari Triwulan sebelumnya yaitu :

No	Indikator	Triwulan II	Triwulan III
1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	83,81	83,63
2.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	91,58	90,96
3.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	97,28	96,42
4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	93,44	88,53

Kinerja Keuangan Balai Besar KIPM Makassar Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp 11,879,526,000 dan realisasi Rp 7.164.536.719 atau 71.20 %





I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instrument pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dalam peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKJ Interim) maupun tahunan (LKJ Tahunan) Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah mengukur kinerja evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja.



Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), dalam melaksanakan tugas dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP.

1.2. Tugas dan Struktur Organisasi Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai Besar KIPM) Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Balai Besar KIPM Makassar terdiri dari (1). Sub bagian Umum, (2) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Struktur organisasi Balai Besar KIPM Makassar dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini.



1.3. Arah Kebijakan dan Strategis

Arah kebijakan dan strategis pembangunan Balai Besar KIPM Makassar disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka sasaran strategis Balai Besar KIPM Makassar adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan Perikanan dengan didukung 1). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi Primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 3). Lokasi Pengawasan Mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 4). Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan sektor produksi pasca panen lingkup UPT



- Balai Besar KIPM Makassar, 5) Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Makassar
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar yang didukung 1). Nilai kualitas penerapan sistem mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2). Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.
 3. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang didukung 1). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2). Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 3). Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 4). Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 5). Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 6). Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 7). Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 8). Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 9). Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM, 10). Survey Kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.

1.4 Sistematika dan penyajian

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Bab I. Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi;



- b. Bab II. Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV. Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi Presiden 2025-2029 mengusung komitmen "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", yang melanjutkan fondasi yang telah dibangun dan mendorong Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Visi ini mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan berkolaborasi demi meraih tujuan bersama, dan diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi yang dikenal dengan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat keharmonisan kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.2 Tujuan Strategis

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025 – 2029 maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *output/impact* yang diinginkan dapat dicapai BPPMHKP dari program yang dilaksanakan , maka Balai Besar KIPM Makassar telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Sasaran Strategis | 1. Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan |
| 2. Sasaran Strategis | 2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar |
| 3. Sasaran Strategis | 3. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan |

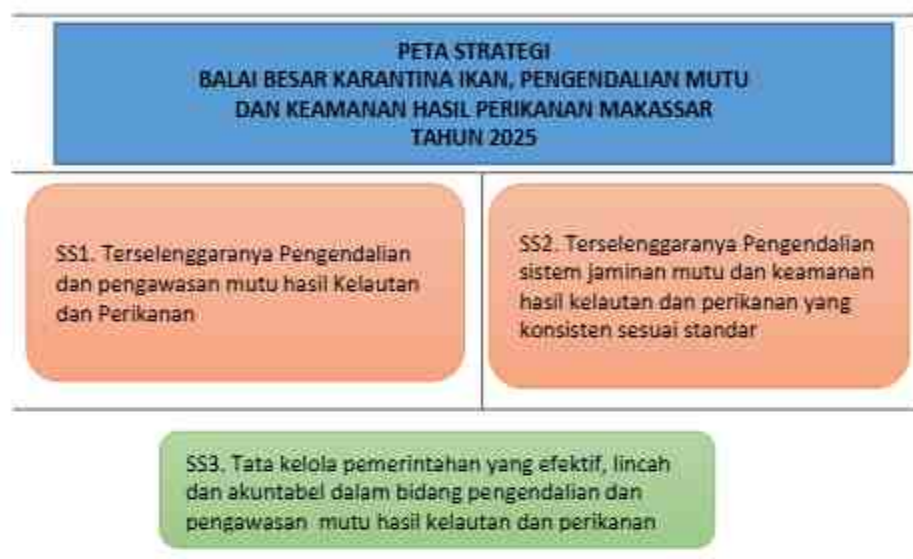
3.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran strategis Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar merupakan penjabaran operasional dari visi,

misinya dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini menggambarkan hasil yang hendak dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dan Penyusunan IKU pada KKP mampu membangun sistem mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.

Peta Strategis adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi nasional. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai Balai Besar KIPM Makassar pada tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPPMHKP.



Gambar 1. Peta Strategi Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian indikator kinerja Balai Besar KIPM Makassar dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2025. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan analisis lebih mendalam terutama terhadap indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target. Hal ini perlu dilakukan untuk mengenali faktor penyebabnya selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan strategi untuk peningkatan kinerja (*performance improvement*) di tahun-tahun selanjutnya.

Hasil capaian indikator kinerja Balai Besar KIPM Makassar untuk triwulan III tahun 2025 yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel : 2.1

Capaian Kinerja Balai Besar KIPM Makassar Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Triwulan 2025 - 2025					Target 2025				
		2025	2025	2025	2025	2025	Target 2025	Target Triwulan 2025	Realisasi Triwulan 2025	Realisasi Triwulan 2025	Realisasi Triwulan 2025
Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Riset, Hasil Riset dan Paten	1. Peningkatan hasil Riset dan Paten yang produktif, primer yang memenuhi standar mutu dan memperoleh pengakuan UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	200	70	70	100	100,00	100,00
	2. Peningkatan hasil Riset dan Paten yang produktif, primer yang memenuhi standar mutu dan memperoleh pengakuan UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	800	70	70	100,00	100,00	100,00
	3. Jumlah Pengembangan Riset, Hasil Riset dan Paten yang produktif, primer yang memenuhi standar mutu dan memperoleh pengakuan UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	200	2	2	100,00	100,00	100,00
	4. Jumlah Pengembangan Riset, Hasil Riset dan Paten yang produktif, primer yang memenuhi standar mutu dan memperoleh pengakuan UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	200	2	2	100,00	100,00	100,00
	5. Peningkatan jumlah Riset dan Paten yang produktif, primer yang memenuhi standar mutu dan memperoleh pengakuan UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	10,00	10,00	10,00	200	10	10	100	100,00	100,00



Kategori Strategi	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2024-2025					Tahun 2025				
		2024	2024	2024	2024	2024	Target 2025	Target TWH 2025	Realisasi TWH 2025	% Realisasi terhadap Target TWH 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025
Peningkatan pengelolaan sistem jaminan mutu dan keamanan kapal nelayan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan	6. Nilai Peningkatan persentase sistem jaminan mutu berdasarkan pengaji dan lembaga inspektu Inspektu Sektoral KPM Makassar	-	-	-	-	93.1	75	75	91.33	121.64	121.64
	7. Nilai kualitas pelayanan sistem manajemen mutu lembaga inspektu Inspektu Sektoral KPM Makassar	-	-	-	-	-	75	75	90.96	121.18	121.18
Peningkatan kinerja Peningkatan yang efektif, lincah dan akurat dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil produksi dan pelayanan	8. Nilai indikator pelaksanaan anggaran (IPA) Inspektu Sektoral KPM Makassar	88	89	96.44	96.38	97.30	90	91	96.41	104.90	104.90
	9. Nilai kinerja Peningkatan Anggaran Inspektu Sektoral KPM Makassar	-	86	87.87	86.1	88.37	71.5	71.5	88.53	123.81	123.81
	10. Persentase penyelesaian keluhan SPK Inspektu Sektoral KPM Makassar	-	-	-	100	100	100	100	100	100.00	100.00
	11. Indeks Peningkatan KPM Inspektu Sektoral KPM Makassar	88.11	92.44	91.23	90.27	90.78	87	81	0	0.00	0.00
	12. Nilai Peningkatan Mandiri SPK Inspektu Sektoral KPM Makassar	91.63	88	99.3	87.13	88.8	86	0	0	0.00	0.00
	13. Persentase dokumentasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	81	85	100	100	100	85	85	100	117.65	117.65
	14. Tingkat kepuasan pelanggan barang/jasa Inspektu Sektoral KPM Makassar	-	-	79.58	78.36	84.34	75	76	100	131.58	131.58
	15. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pertanggungjawaban kinerja Inspektu Sektoral KPM Makassar	-	-	-	-	-	75	75	75.19	100.25	100.25
	16. Inovasi Pelayanan Publik Inspektu Sektoral KPM Makassar	-	-	-	-	-	1	1	1	100.00	100.00
	17. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Sektoral KPM Makassar	-	-	85.8	91.11	1.77	88	88	95.85	110.96	110.96

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategi secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diperlukan dukungan 5 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 5 indikator kinerja tersebut disajikan pada table dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :	
1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	1. 70 %
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	2. 70 %
3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	3. 1 Lokasi
4. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	4. 1 Lokasi
5. Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	5. 99 %

IK. 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Rencana Balai Besar KIPM Makassar 2025-2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TWH II 2025	Realisasi TWH II 2025	% Realisasi terhadap Target TWH II 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Rencana
Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1												
	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	+	+	+	+	125	70	70	100	142,86	142,86	+	+

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

BBPMHKP Makassar saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan

kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.

Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.

Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.

Cara Pembuatan pakan ikan yang baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.

Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CDOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.

Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk rumahan dan pengawasan mutu guna menghasilkan yang aman bermutu dan berkhasiat.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{Xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan kemananan pangan.

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBI

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

Xn = Jumlah dari Unsur Pembentuk



$$A/B/C/D/E/F = \frac{\text{Jumlah sertifikat yang terbit}}{\text{Jumlah permohonan}} \times 100\%$$

Adapun jumlah permohonan dan jumlah sertifikat yang terbit dapat dilihat pada matriks berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Permohonan Yang Lolos Verifikasi Berkas	Jumlah Sertifikat yang Terbit	Persentase Unit Usaha yang Menerapkan Sertifikasi
1	Sertifikasi CPIB Kapal	58	58	100 %
2	Sertifikasi CBIB	1	1	100 %
3	Sertifikasi CPiB	0	0	0
4	Sertifikasi CPPiB	0	0	0
5	Sertifikasi CPOiB	0	0	0
6	Sertifikasi CDOiB	0	0	0

Dengan demikian realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Triwulan III adalah 100 %.

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian Triwulan II Tahun 2025 maka realisasi pada triwulan III adalah sama yaitu 100%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena merupakan IKU baru.

Pada triwulan III tahun 2025 tidak terdapat Permohonan sertifikasi CPIB, CPPiB, CPOiB dan CDOiB namun telah dilakukan pengawasan mutu melalui kegiatan surveilan penilaian dan verifikasi konsistensi dan efektivitas penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit pembenihan yang telah tersertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) sebanyak 5 unit dan pada Unit Pembuatan Pakan yang telah tersertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPiB) sebanyak 2 unit dengan output kegiatan adalah Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS). Untuk SKHS diserahkan ke Pelaku Usaha setelah dilakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

- Pada tanggal 1 Juli 2025 mengikuti kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil melalui Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal yang diikuti sebanyak 50 orang nelayan, dilanjutkan dengan koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Untia dan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam rangka percepatan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal yang diselenggarakan di Kabupaten Sinjai.
- Mengikut help desk yang diselenggarakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer setiap hari Selasa pada bulan Juli 2025 yang membahas terkait progres percepatan sertifikasi primer dan kendala kendala yang dihadapi.
- Pada tanggal 23 Juli 2025 telah dilaksanakan Sosialisasi Juknis Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Kegiatan CPPIB dan diikuti oleh seluruh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.
- Pada tanggal 1 Agustus 2025 telah dilakukan rapat penyesuaian sertifikasi primer pasca perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
- Pada tanggal 18 September 2025 telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan BPSPL Makassar di Ruang Pertemuan BPSPL Makassar di Kab. Maros terkait dengan percepatan layanan surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)
- Pada tanggal 22 September 2025 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pengendalian dan pengawasabn mutu hasil kelautan dan perikanan di Sulawesi Selatan khususnya terkait dengan pengendalian di sektor produksi primer.

Sumberdaya manusia yang dilibatkan pada indikator ini yaitu :

- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CPIB Kapal pada TW III sebanyak 20 orang yang terdiri dari 16 Inspektur Mutu dan 4 Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.
- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CBIB pada TW III sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar dan 1 Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar;
- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan surveilan CPIB pada TW III sebanyak 8 orang yang terdiri dari 6 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar dan 2 Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar;
- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CPPIB pada TW III sebanyak 4 orang yang terdiri dari 3 Inspektur Mutu dan 1 Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.

Adapun anggaran yang mendukung kegiatan ini :

- Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 95.000.000 kemudian direvisi menjadi Rp 18.820.000 yang digunakan untuk Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer Rp. 18.820.000.
- Untuk anggaran pelaksanaan kegiatan sertifikasi produksi primer semula Rp. 18.820.000 menjadi Rp. 24.600.000 karena adanya revisi anggaran (relaksasi blokir).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Aspek pemanfaatan realisasi anggaran sampai dengan TW III Tahun 2025 sebesar Rp. 15.647.000,- atau sebesar 69,01 % dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SISA (RP)
1.	Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer	24.600.000	15.647.000	7.623.000
	JUMLAH	24.600.000	-	7.623.000

Catatan : Dari sisa anggaran Rp. 7.623.000, sisa anggaran untuk kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer adalah sebanyak Rp. 3.033.000 untuk kegiatan perjalanan dinas biasa CBIB, CPIB dan CPIB Kapal, sedangkan sisa anggaran sebanyak Rp. 4.590.00

Akar Masalah

Potensi permasalahan adalah kurang akuratnya hasil kegiatan inspeksi yang dilaksanakan melalui *remote inspection (Virtual)*

Rekomendasi Rencana Aksi

- Memperbanyak data dukung inspeksi berupa kondisi lokasi secara keseluruhan baik melalui foto maupun video sebelum kegiatan inspeksi dilaksanakan.
- Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya

Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

- Tindak lanjut rekomendasi 1 : Pada tanggal 18 September 2025 telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan BPSPL Makassar di Ruang Pertemuan BPSPL Makassar di Kab. Maros terkait dengan percepatan layanan surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).



Rapat Koordinasi dengan BPSPL Makassar

- Tindak lanjut rekomendasi 2 : pada tanggal 1 Juli 2025 koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Untia dan Dinas Perikanan Kab. Sinjai terkait Percepatan Sertifikasi CPKB Kapal di Hotel Grand Rofina Kab. Sinjai



Rapat Koordinasi dengan Dinas Perikanan Kab. Sinjai
Percepatan Sertifikasi Kapal

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Strategi	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2021-2024					Tahun 2025				Rencana Balai Besar KIPM Makassar 2025-2029	
		2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TWR 2025	Realisasi TWR II 2025	% Realisasi terhadap Target TWR 2025	147	Target 2025	% Capaian terhadap Target Rencana
Terselenggaranya Pengendalian dan Penguatan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	88,1	70	70	88,63	119,47	119,47	-	-

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu;

Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu

berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen Pada triwulan III 2025 melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)
2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)

Kegiatan Sertifikasi Pasca Panen merupakan salah IKU yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua dan keempat KKP yaitu

- Prioritas kedua KKP yaitu Penerapan sistem kuota dalam penangkapan ikan untuk menjaga kelestarian sumber daya dimana, setiap hasil tangkapan harus dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikasi SKP dan HACCP sebelum dapat diekspor ke negara tujuan, sehingga keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar global dapat meningkat.

- Prioritas keempat KKP yaitu Pengembangan budidaya perikanan di laut, pesisir, dan darat yang memperhatikan aspek keberlanjutan dimana, setiap hasil budidaya harus dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikasi SKP dan HACCP sebelum dapat diekspor ke negara tujuan, sehingga keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar global dapat meningkat.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan melalui kegiatan inspeksi/sertifikasi SKP dan HACCP diperlukan sumberdaya manusia (Inspektur Mutu) yang berkompeten- ASN harus terus belajar dan mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

Cara Pengukuran

- Perhitungan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

Dimana

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
- xn = Total dari unsur pembentuk (2)

Adapun target sertifikasi HACCP pada tahun 2025 sebanyak 272 sertifikat sedangkan target sertifikasi SKP pada tahun 2025 sebanyak 319 sertifikat. Pada rumus perhitungan di atas belum dijelaskan rumus perhitungan untuk memperoleh A dan B. Untuk memudahkan perhitungan maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat HACCP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah sertifikat yang expired (target)}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sertifikat SKP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100\%$$

Persyaratan dalam penerbitan SKP mengacu pada Permen KP No. 17 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan SKP, sedangkan persyaratan dalam penerbitan sertifikasi HACCP mengacu pada Permen KP NO 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Pencapaian IKU ini dapat dilihat pada matriks berikut :

No	Kegiatan	TW III 2025		
		Target/Rekomendasi	Realisasi	Persentase
1	Sertifikasi HACCP (A)	96	77	80,20%
2	Sertifikasi SKP (B)	116	101	87,07%

Catatan :

- Realisasi sertifikasi HACCP mencapai 80,20%, karena terdapat beberapa UPI dengan ruang lingkup yang masih dalam proses sertifikasi SKP.
- Realisasi sertifikasi SKP mencapai 87,07%, karena terdapat beberapa rekomendasi SKP dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan revisi.

$$\%X = \frac{80,20 + 87,07}{2}$$

$$= 83,63 \%$$

Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sebesar 83,63 %, dari target 70%. Dengan demikian capaian IKU ini adalah sebesar 119,47 %.

Adapun kegiatan pendukung pada IKU pasca panen adalah kegiatan sertifikasi Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan, sertifikat SPDI (Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan) diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan penyimpanan, pengadaan, sortasi dan grading serta yang melakukan kegiatan distribusi ikan dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai KBLI terkait, menerapkan cara distribusi ikan yang baik (CDIB) dan memenuhi persyaratan pembinaan dari Direktorat Teknis.

Sehubungan tindak lanjut dari Plan of Action (PoA) dan rekomendasi hasil audit DG SANTE – Uni Eropa (UE), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) – KKP perlu segera melakukan sertifikasi terhadap pemasok yang mensuplai bahan baku ke UPI Approval Number UE. Sertifikasi tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia bahwa pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan di tahap hulu hingga hilir, sehingga permasalahan ekspor ke UE bisa terselesaikan. UPT Balai Mutu Makassar diberikan target sebanyak 18 (delapan belas) unit pemasok yang termasuk dalam pemasok ke UPI approval number Uni Eropa.

Namun demikian pelaksanaan SPDI mengalami kendala karena dasar hukum yaitu PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berbasis Risiko belum memuat ketentuan terkait pelaksanaan SPDI. Atas dasar tersebut telah terbit Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan No 31 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point di Supplier, maka menjadi acuan dalam menerbitkan Surat Keterangan Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point di Supplier pada Triwulan III Tahun 2025.

Pada Triwulan III Tahun 2025, inspeksi penerapan HACCP di Supplier dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) unit pemasok dan telah diterbitkan sertifikat Penerapan Hazard Analysis And Critical

Control Point di Supplier sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar sesuai ruang lingkup sertifikasi. Pada Triwulan II 2025 telah dilaksanakan inspeksi sertifikasi Penerapan Hazard Analysis And Critical kepada 12 (dua belas) unit pemasok dan diterbitkan sertifikat sebanyak 18 (delapan belas) lembar.

Output dari kegiatan ini berupa sertifikat SKP dan HACCP serta didukung oleh sertifikasi SPDI atau CPIB supplier. Dengan adanya sertifikasi SKP dan HACCP ini, Unit Pengolahan Ikan atau UMKM dapat melakukan kegiatan ekspor produk perikananannya dengan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terjamin serta memenuhi standar negara tujuan ekspor. Hal ini didukung dengan adanya sertifikasi SPDI atau CPIB supplier yang dapat menjamin mutu dan keamanan pasokan bahan baku yang masuk ke unit pengolahan dan UMKM.

Kegiatan rapat penyatuan inspeksi perpanjangan Inspeksi SKP dan HACCP telah dilakukan pada tanggal 16 September 2025, yang diselenggarakan oleh Pusat Mutu Pasca Panen.

Pada tanggal 9 September 2025 Inspektur Mutu mengikuti kegiatan konsultasi public tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis resiko sector kelautan dan perikanan bidang pengendalian pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diselenggarakan oleh sekretariat badan

Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan total sebanyak 16 orang dan didukung oleh tenaga PPNPM sebanyak 24 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengendalian dan pengawasan mutu serta pelayanan sertifikasi mutu hasil perikanan.

Anggaran awal kegiatan pasca panen pada tahun 2025 sebesar Rp. 210.000.000,- di blokir sebesar Rp. 169.228.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 40.772.000,- realisasi ditriwulan III sebesar Rp.40.760.157,- atau sebesar (99,99%). Jika dibandingkan dengan TW II tahun 2025 sebesar Rp.34.001.000,- atau sebesar (38,43%) mengalami kenaikan sebesar 65,56%.

Akar Masalah

Potensi permasalahan adalah kurang akuratnya hasil kegiatan Inspeksi yang dilakukan melalui remote Inspection (Virtual)

Rekomendasi Rencana Aksi

Memperbanyak data dukung inspeksi berupa kondisi lokasi secara keseluruhan baik melalui foto maupun video sebelum kegiatan inspeksi dilaksanakan.

Tindakanjuz Rekomendasi sebelumnya

Telah dilakukan sharing session peningkatan kompetensi Inspektur Mutu tentang PP NO 28 Tahun 2025 Inspektur Mutu pada tanggal 21 Agustus 2025



Rapat Koordinasi dengan Dinas Perikanan Kab. Sinjai
Percepatan Sertifikasi Kapal

IK.3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Balai Besar Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Rencana Balai Besar KIPM Makassar 2025-2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TPI 2025	Realisasi TPI 2025	% Realisasi terhadap Target TPI 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2029	% Capaian terhadap Target Rencana
Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	2. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar						1	1	1	100,00	100,00	-	-

Pada tahun 2025 terdapat penambahan IKU baru yaitu Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi), yang ditahun sebelum hanya berupa IKU pendukung.

Balai Besar KIPM Makassar adalah salah satu unit kerja yang mendapatkan target lokasi monitoring cemaran perairan dari Kepala Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP pada, tahun 2025 lokasi monitoring 1 lokasi yaitu perairan wilayah Takalar yang terdiri dari 1 titik monitoring yaitu TPI Beba.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui apakah komoditi perikanan yang diperoleh dari perairan terpapar racun hayati laut dan logam berat serta mendapatkan data dan informasi pengujian kandungan racun hayati laut dan logam berat pada ikan sebagai bahan rekomendasi kepada Otoritas Kompeten.

Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu pada setiap semester dengan sasaran titik pendaratan ikan yang ditangkap di perairan Takalar atau di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan adanya data monitoring yang mutakhir sehingga menjadi bahan rekomendasi pengelolaan perikanan di perairan Makassar.

Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan monitoring cemaran perairan meliputi :

- Sarana dan Prasarana : Penerapan standar sanitasi dan higienis pada TPI/PPI merupakan indikator jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipasarkan sehat dan aman untuk konsumsi
- Pengambilan Contoh uji yang diambil kemudian dibawa ke Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar untuk pengujian parameter logam berat (*Pb, Cd, Hg*) dan pengujian mikrobiologi untuk parameter *E.Coli, Salmonella* dan dikirim ke Laboratorium BUSKIPM untuk pengujian racun hayati laut parameter *ciguatoksīn* dikarenakan pengujian racun hayati belum masuk ruang lingkup di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar.

Kegiatan monitoring cemaran perairan merupakan salah IKU yang mendukung Asta Cita ke - 2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu perikanan melalui kegiatan monitoring cemaran perairan di perlukan sumberdaya manusia (Inspektur mutu) yang berkompeten ASN harus terus belajar dan mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah. Kegiatan monitoring cemaran perairan, berdasarkan program Tahunan yang telah disusun

pada tahun 2025 memiliki 1 target lokasinya yaitu TPI Beba Kab. Takalar, dan dilaksanakan dalam 2 (dua) kali setahun.

Kegiatan monitoring cemaran perairan telah dilaksanakan pada triwulan III tahun 2025 dengan titik lokasi monitoring cemaran perairan di TPI Beba Kab. Takalar.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pengambilan sampel berupa ikan demersal (Ikan Katamba, Ikan Barakuda, Ikan Kaneke) untuk pengujian parameter: pengujian logam berat (Pb, Cd, Hg), *ciguatoksine* dan pengujian mikrobiologi dengan parameter *Salmonella* dan *E. Coli*
- Untuk parameter pengujian logam berat yaitu (Pb, Cd, Hg) dan pengujian mikrobiologi dengan parameter *Salmonella* dan *E. Coli* dilakukan pengujian di Laboratorium penguji BPPMHKP Makassar, sedangkan untuk pengujian kimia untuk parameter *ciguatoksine* dilakukan sub kontrak di laboratorium penguji BUSPM Jakarta.
- Hasil pengamatan sarana dan prasarana sesuai dengan ceklist yang tersedia pada lokasi monitoring cemaran perairan tahun 2025 pada triwulan III tahun 2025 didapatkan nilai kesesuaian sebesar 62,5 % dan nilai ketidaksesuaian sebesar 37,5 %. Adapun ceklist sesuai dengan Keputusan Kepala BKIPM No. 96 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis monitoring cemaran perairan.

Tabel Hasil pengujian monitoring cemaran perairan di PPI Beba

No	Lokasi	Jenis ikan	Parameter Uji			E coli	Hasil Uji	
			Logam berat (Hg, Cd, Pb)	Ciguatoxin	Salmonella		TW II	TW III
1	PPI Beba	Ikan Barakuda	✓	On proses	✓	✓	Bawah ambang batas	
		Ikan kaneke	✓	On proses	✓	✓	Bawah ambang batas	
		Ikan Katamba	✓	On proses	✓	✓	Bawah ambang batas	

Dengan terlaksananya kegiatan tersebut di atas, maka realisasi kegiatan monitoring cemaran perairan triwulan III tahun 2025 telah tercapai 100%. Hasil pengujian parameter logam berat dan mikrobiologi, seluruh sampel dinyatakan memenuhi standar atau berada di bawah ambang batas. Adapun pengujian untuk parameter Ciguatoxin masih dalam proses pengujian di BUSPM Jakarta.

Adapun kondisi sarana dan prasarana pada lokasi target cukup memadai namun terdapat beberapa ketidaksesuaian yang perlu mendapatkan perhatian dari instansi terkait :

- Lokasi memiliki tata ruang yang memadai, namun bangunan yang ada tidak mampu menampung seluruh penjual ikan, sehingga masih ada penjual ikan melaksanakan aktifitas di luar bangunan yang disediakan
- Lantai bangunan sudah memakai keramik, namun pembersihan lantai hanya dilakukan pada saat kegiatan selesai dilakukan. Selain itu konstruksi lantai belum dirancang dengan kemiringan yang memungkinkan air dapat mengalir ke saluran pembuangan yang disediakan
- Pertemuan antara lantai dan dinding tidak melengkung sehingga sulit dibersihkan
- Saluran pembuangan tidak memiliki kemiringan yang cukup sehingga air tidak mengalir dengan lancar
- Belum dilengkapi dengan keranjang yang dapat diangkat untuk menampung limbah padat (menggunakan kantong plastik)
- Saluran air hanya dibersihkan pada saat ada kegiatan lelang saja
- Belum tersedia program pembersihan untuk langit langit
- Jumlah, desain dan fasilitas toilet tidak memadai begitu juga dengan jumlah lokasi, desain dan fasilitas pencuci tangan juga tidak memadai.
- Toilet tidak di lengkapi dengan desinfektan (sabun)

- Belum semua penjual ikan menggunakan es dalam jumlah yang cukup untuk menjaga sistem rantai dingin sehingga masih ditemukan ikan yang suhunya rata rata melampaui batas standar yang ditentukan yakni suhu maksimal antara 4-5 °C
- Timbangan yang digunakan tidak dilakukan kalibrasi secara periodik.
- Alat yang digunakan memindahkan ikan belum tersedia alat angkut khusus.
- Peralatan, perlengkapan dan fasilitas yang kontak langsung dengan produk belum terjamin kebersihannya sehingga masih memungkinkan terjadinya kontaminasi. Masih ada penjual ikan yang belum menggunakan meja atau tempat khusus pada saat menjual ikan, sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi pada produk yang diperjualbelikan

SDM yang terlibat dalam kegiatan monitoring cemaran perairan tahun 2025 adalah 4 orang Inspektur Mutu .

Anggaran awal kegiatan monitoring cemaran perairan pada tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000,- setelah buka blokir anggaran bernilai Rp. 8.240.000,-

Realisasi anggaran triwulan III sebesar Rp. 470.000,- yang digunakan untuk pembelian sampel Pengawasan mutu dan biaya ATK computer supplies. Dengan demikian realisasi anggaran hingga triwulan III sebesar Rp 3.650.000,- atau sebesar 44,30%

Sebagai perbandingan anggaran triwulan II sebesar Rp.3.010.000,- atau sebesar (36.53%) yang digunakan untuk pembelian sampel, computer supplies, biaya pengujian dan biaya perjalanan dinas biasa. sehingga terjadi kenaikan realisasi dari triwulan II ke triwulan III sebesar 7,7 %.

Jika dibandingkan dengan Anggaran Kegiatan monitoring cemaran perairan tahun 2024 pagu sebesar Rp. 80.000.000,- dengan realisasi pada triwulan III sebesar Rp. 38.397.969,- atau sebesar 48 % atau lebih tinggi 3,7 % dibandingkan triwulan III tahun 2025.

Akar Masalah

Laporan hasil uji monitoring belum disampaikan di instansi terkait untuk monitoring cemaran perairan

Rekomendasi Rencana Aksi

Menyampaikan laporan hasil uji pada instansi terkait

Tindakan lanjut Rekomensi sebelumnya

Telah melakukan Refresment/Sharing session peningkatan kompetensi inspektur mutu melalui bincang inspiratif terkait Keputusan Kepala BKIPM No. 96 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis monitoring cemaran perairan pada tanggal 24 Juli 2025



Refresment/Sharing Session peningkatan kompetensi Inspektur Mutu melalui bincang inspiratif

IK 4. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sumber Strategi	Indikator Kinerja (IK)	Periode Tahun 2020-2024					Tahun 2025					Rencana Balai Besar KIPM Makassar 2025-2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TN II 2025	Realisasi TN II 2025	% Realisasi terhadap Target TN II 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Rencana
Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu-hasil Kelautan dan Perikanan	4. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	5	4	4	100	1	1	1	100.00	100.00	-	-

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik merupakan salah satu IKU yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas KKP yaitu:

- Program Prioritas Kedua KKP yaitu penerapan sistem kuota dalam penangkapan dan memastikan keberlanjutan sumber daya ikan, dimana pada kegiatan pengawasan mutu BPPMHKP Makassar memastikan produk hasil perikanan tangkap yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Program Prioritas Ketiga KKP yaitu pengembangan budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, baik untuk komoditas ekspor maupun konsumsi lokal, dimana pada kegiatan pengawasan mutu BPPMHKP Makassar memastikan produk hasil perikanan hasil budidaya yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain dan instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir. Dalam hal ini BPPMHKP memiliki peran penting antara lain:

1. Pengawasan Mutu: BPPMHKP melakukan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.
2. Pengendalian Mutu: BPPMHKP melakukan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kualitas dan keamanan pangan.

Dengan demikian BPPMHKP juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan



mutu perikanan, diperlukan sumberdaya manusia (Inspektur Mutu) yang berkompeten: ASN harus terus belajar mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

Pada tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebanyak 1 lokasi yaitu kota Makassar dengan jumlah 1 lokus. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester. Adapun lokasi pengawasan sentra penyedia pangan sehat yaitu pasar tradisional.

Pada triwulan III tahun 2025 target pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yaitu di Kota Makassar dengan lokus pengawasan yaitu Pasar Tradisional Daya.

Adapun agenda kegiatan yang dilakukan pada saat pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi) Triwulan III pada tanggal 24 September 2025 yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan ke kepala UPTD Pasar Tradisional Daya.
2. Melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pasar tradisional serta mengisi checklist Pengamatan Kondisi sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene.
3. Pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium.

Rangkaian kegiatan terdapat pengambilan sampel yang dilakukan di Pasar Tradisional Daya, terdapat 5 (lima) jenis sampel yang diambil yaitu ikan nila segar, ikan kerapu segar, ikan cakalang segar, cumi-cumi segar dan udang vannamei segar. Sampel yang diambil masih dalam proses pengujian di laboratorium penguji Balai Besar KIPM Makassar dengan target pengujian Organoleptik, ALT, *Echerichia coli*, *Salmonella spp*, formalin dan histamin.

Inspektur mutu juga melakukan pengamatan kondisi sarana prasarana dan sanitasi hygiene pada pasar tradisional Daya. Setelah dilakukan pengamatan pasar tradisional Daya memperoleh nilai dengan kriteria **BAIK** dimana tersedia jalan dan fasilitas untuk menunjang kelancaran arus distribusi ikan, lokasi berada ditempat bebas pencemaran, bangunan

terawat, dibersihkan saluran pembuangan air memiliki kemiringan yang cukup, fasilitas sanitasi tersedia, pasokan air

cukup, penerangan yang cukup baik alami maupun menggunakan lampu namun masih perlu perhatian terkait cara penanganan ikan yang baik, peralatan yang digunakan dan tingkah laku karyawan yang menangani produk sehingga mutu produk yang dipasarkan tetap terjaga.

Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik tahun 2025 merupakan salah satu indikator kinerja yang tidak mendapatkan alokasi anggaran karena adanya kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran. Namun kebijakan pemerintah tersebut tidak menjadi penghalang pada kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik.

Dalam rangka sampling kajian kandungan formaldehida alami pada produk perikanan, Badan Mutu KKP Makassar berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) melakukan pengambilan sampel Pangan Segar Asal Ikan (PSAI) pada TPI Paotere Makassar pada tanggal 17 September 2025. Badan Mutu KKP Makassar sebagai otoritas kompeten pengendalian mutu hasil perikanan melakukan pendampingan dalam pengampilan sampel tersebut bersama Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Sampel yang diambil berupa ikan tongkol, baby tuna, cakalang, tenggiri, kerapu dan ikan selar. Sampel tersebut kemudian akan diuji di Laboratorium Penelitian Institut Pertanian Bogor untuk melihat adanya potensi pembentukan formalin yang secara alami timbul pada produk perikanan.

Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 60.000.000,- yang terealisasi pada TW III tahun 2024 sebesar Rp. 45.382.086,- atau 75,64%.

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut selama Triwulan III tahun 2025 adalah 11 orang yang terdiri atas Inspektur Mutu, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar, Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) dan BPPSDMKP Maros.

Akar Masalah

Laporan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik TW III belum disampaikan ke Instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar dan Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI), karena masih menunggu hasil pengujian.

Rekomendasi rencana aksi

Menyampaikan Laporan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di Triwulan IV kepada instansi terkait.

Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya

Telah dilakukan sharing session keputusan Kepala BPPMHKP No. 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu di Sentra Penyedia Pangan Sehat pada tanggal 24 Juli 2025



Refresment/Sharing Session peningkatan kompetensi Inspektur Mutu melalui bincang inspiratif

IK 5. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan Ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sistem Strategi	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Target Balai Besar KIPM Makassar 2025-2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TII II 2025	Realisasi TII II 2025	% Realisasi terhadap Target TII II 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Rencana
Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Hasil Perikanan dan Perikanan	5. Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	88,88	88,88	97,77	88	88	80	90,90	90,90	-	-

Sistem Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tumbuh seiring dengan perkembangan tuntutan akan jaminan mutu dan keamanan pangan di tataran internasional yang semakin ketat, dan tidak hanya fokus pada mutu dan keamanan dari produk akhir. Sistem jaminan mutu dan keamanan terhadap proses merupakan tuntutan dan penerimaan masyarakat dunia (internasional) akan keberterimaan pangan, termasuk hasil perikanan. Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh internasional, harus dipenuhi oleh seluruh negara pengekspor, yang dinyatakan pada sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang menyertai setiap produk yang dipasarkan, baik untuk pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor.

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu, maka penerbitan SMKHP didasarkan pada hasil pengawasan mutu terhadap efektifitas penerapan persyaratan

sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Usaha Pembenihan, Pembesaran dan Unit Pengolahan Ikan serta hasil pengujian contoh.

Peningkatan ekspor perikanan ke negara tujuan merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pada Asta Cita ke 5 terdapat tiga kegiatan utama yaitu peningkatan ekspor produk perikanan tangkap, pembangunan industri hilir dan industri penangkapan ikan serta penjaminan mutu dan keamanan pangan akuatik komoditas perikanan budi daya.

Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir.

Balai Besar KIPM Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar hasil pengendalian tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan produk perikanan yang akan di lalulintaskan ke negara tujuan.

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rasio kegiatan pengiriman ikan dan hasil perikanan ke luar wilayah Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak ada penolakan oleh negara tujuan ekspor. Hal ini



dibuktikan diterimanya SMKHP di negara tujuan ekspor dan tidak ada notifikasi penolakan dari negara tujuan.

Perhitungan IKU ini berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$X = \frac{A - B}{A}$$

X : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A : SMKHP yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B : Jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan

IKU ini menggunakan formulasi diatas sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah SMKHP ekspor yang memenuhi syarat mutu} - \text{penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah SMKHP mutu ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$$

$$\frac{(3.358 - 0)}{3.358} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU ini di triwulan III tahun 2025 adalah 100% karena tidak ada penolakan dari negara tujuan. Jika dilihat dari aspek keberterimaan di negara tujuan didapatkan nilai yang sama antara Triwulan III tahun 2025 dan triwulan III tahun 2024 yaitu 100 %.

Pada triwulan III tahun 2025 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 49.982,96 ton senilai Rp. 1,752 T dengan jumlah sertifikat ekspor (SMKHP) yang diterbitkan sebanyak 3.358 sertifikat. Sebagai perbandingan, pada triwulan II tahun 2025 tercatat:

volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 65.462,64 ton senilai Rp. 4.004 T dengan jumlah SMKHP yang diterbitkan sebanyak 3.125 sertifikat. Berdasarkan data tersebut pada triwulan III terjadi penurunan volume ekspor sebesar 25 % dan nilai ekspor sebesar 56% dibandingkan triwulan II, namun terjadi kenaikan persentase jumlah SMKHP yang diterbitkan sebesar 7,5 %.

Sebagai perbandingan, volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan pada triwulan III tahun 2024 sebanyak 54.84 ton senilai Rp. 3,72 T dengan jumlah SMKHP yang diterbitkan sebanyak 2.617 sertifikat. Jika dibandingkan triwulan III tahun 2025 dan triwulan III tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah SMKHP sebesar 28,3 % di triwulan III tahun 2025, namun dari jumlah volume ekspor terjadi penurunan sebesar 8,86 % dan nilai ekspor sebesar 52,9 %.

Data pada triwulan III Tahun 2025 menunjukkan tidak terdapat kasus penolakan produk perikanan yang dikirim ke negara tujuan. Pada triwulan III tahun 2025 memiliki kondisi yang sama dengan triwulan III tahun 2024 yaitu tidak adanya kasus penolakan produk perikanan.

Kegiatan sertifikasi ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu sebanyak 17 orang serta didukung oleh tenaga PPNP sebanyak 12 orang dan PJLP sebanyak 12 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengawasan, dan pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Sejalan dengan peningkatan pelayanan sertifikasi ekspor produk perikanan, terdapat beberapa kegiatan peningkatan kompetensi maupun kunjungan pihak eksternal untuk mendukung IKU ini telah diikuti oleh petugas pelayanan maupun inspektur mutu antara lain sebagai berikut :



No.	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Waktu Kegiatan
1.	Bincang Inspiratif Pelayanan Publik Dengan Tema "Menuju Pelayanan Publik Yang professional & Unggul (Profesional & Excellent Service)" bersinergi dengan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Makassar	BPPMHKP Makassar	14 Juli 2025
2.	Briefing Siang Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	16 Juli 2025
3.	Sharing session Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 44 tahun 2024 dan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 35 tahun 2025	BPPMHKP Makassar	24 Juli 2025
4.	Kunjungan Kerja Tim Komisi IV DPR RI Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Pengendalian Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	BPPMHKP Makassar	11 Agustus 2025
5.	Webinar Budaya Kerja Work Life Balance Untuk ASN Menjaga Kesehatan Mental Di Tempat Kerja	Biro SDMA Organisasi Sekretariat Jenderal KKP	9 September 2025
6.	Bincang Inspiratif Pelayanan Pelayanan Publik Dengan Tema "Menuju Pelayan Publik Yang professional & Unggul (Profesional & Excellent Service)" bersinergi dengan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Makassar	BPPMHKP Makassar	11 September 2025
7.	Bimbingan Teknis Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan Tahun 2025	Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal KKP	17 September 2025
8.	Sharing Session Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan	BPPMHKP Makassar	25 September 2025

9.	Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan kenenterian Kelautan dan Perikanan	BPPMHKP Makassar	30 September 2025
----	---	------------------	-------------------

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu :

1. Monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra.
2. Monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP
3. Investigasi kasus penolakan ekspor di negara tujuan.

I. Monitoring dan Evaluasi Nomor Registrasi Negara Mitra

Pada triwulan III tahun 2025 telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra sebanyak 1 (satu) UPI. Adapun UPI yang telah di monitoring adalah :

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan	Inspektur Mutu
1.	CV. Gimae Seaweed & Spice	02 Juli 2025	Mohammad Zamrud Suprianto

Sasaran dari kegiatan ini adalah UPI yang sedang bermohon penerbitan nomor registrasi untuk negara tujuan China serta UPI yang belum memanfaatkan secara maksimal nomor registrasi ke negara tujuan. Berdasarkan hasil monev nomor registrasi negara mitra pada CV. Gimae Seaweed & Spice diperoleh hasil bahwa UPI tersebut telah diverifikasi GACC pada aplikasi CIFER untuk permohonan registrasi ke negara mitra China dan belum diapprove karena masih terdapat koreksi dan perlu perbaikan pada beberapa item seperti denah/layout pabrik, fasilitas sanitasi dan cuci tangan karyawan, bahan pengemas dan fasilitas pencucian peralatan. Adapun tindakan perbaikan telah disubmit ke aplikasi CIFER untuk diverifikasi kembali.

II. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan SMKHP

Pada triwulan III tahun 2025 BPPMHKP Makassar telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada 9 (sembilan) UPI yang melaksanakan ekspor ke negara tujuan. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut ini.

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan	Inspektur Mutu
1.	PT. Mega Citra Karya	02 Juli 2025	Habrin Yake Ardiana
2.	CV. Lontara Jaya Sakti	02 Juli 2025	Andi Rahmaniar Idawati Barung
3.	PT. Celebes Berkah Niaga	04 Juli 2025	Muzakir Suprianto
4.	CV. Adi Tirta	5 Agustus 2025	Muhammad Irfan Rais Idawati Barung
5.	PT. Simpul Agro Globalindo	6 Agustus 2025	Habrin Yake Ardiana
6.	PT. Mina Timur Indonesia	26 Agustus 2025	Sri Rahayu Setyaningsi Wara Zakaria Sapan
7.	PT. Asnur Anton Jaya	29 Agustus 2025	Mohammad Zamrud Moh. Fahrri
8.	PT. Sutracco Nusantara Megah	4 September 2025	Muhammad Irfan Rais Anugrah Ekayani ALP
9.	PT. Parlevliet Paraba Seafood	4 September 2025	Patmawati Moh. Fahri

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada UPI dilakukan berdasarkan profiling Unit Pengolahan Ikan dalam kegiatan pelayanan sertifikasi ekspor ke negara tujuan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan monev adalah memastikan bahwa kegiatan penilaian kesesuaian penerbitan SMKHP pada pelaku usaha berjalan sesuai ketentuan regulasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai serta memudahkan BPPMHKP Makassar dalam melakukan penilaian ke pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya pelaku usaha ekspor. Hasil dari kegiatan monev ini menjadi dasar dalam pemberian skoring tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penerbitan SMKHP. Kegiatan

monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP dilaksanakan tanpa menggunakan APBN karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dan belum adanya buka blokir sehingga dilaksanakan secara mandiri oleh inspektur mutu.

III. Investigasi Kasus Penolakan Ekspor Di Negara Tujuan

Pada triwulan III tahun 2025 tidak ada notifikasi penolakan ekspor dari negara tujuan di UPT BPPMHKP Makassar, namun berdasarkan data hasil uji laboratorium terdapat beberapa produk perikanan yang menyimpang sehingga dilakukan investigasi secara virtual. Adapun UPI yang di investigasi adalah sebagai berikut:

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan Investigasi	Produk	Penyebab	Inspektur Mutu
1.	CV. Mitra Alam	29 Juli 2025	Air dan Es	Zat Padat Terlarut (TDS)	Andi Rahmaniar DJ Ardiana
2.	PT. Blue Ocean Resource	29 Juli 2025	Air	Total Zat padat terlarut dan pH pada air	Habrin Yake Muzakir
3.	PT. Nuansa Cipta Magello	04 September 2025	Pasteurized Crabmeat	Angka Lempeng Total (ALT)	Habrin Yake Muzakir

Kegiatan yang mendukung IKU ini beserta pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1: Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Lock Pagu	Realisasi Anggaran TW II 2025	Persentase Realisasi
1.	7010.ABR.001 Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0
2.	3989.QJC.002 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	0	0



3.	3989.BIA.001 Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0
----	---	------------------	------------------	---	---

Alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini pada tahun 2025 sebesar Rp. 45.000.000. Adapun anggaran untuk indikator kinerja ini masih belum terealisasi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 60.000.000 dimana terjadi penurunan pagu anggaran sebesar 25% dan realisasi pada triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 15.793.000.

Pada triwulan III tahun 2025 belum ada anggaran yang terealisasi disebabkan belum adanya kebijakan buka blokir. Diharapkan dengan adanya kebijakan buka blokir kegiatan yang mendukung IKU ini dapat terealisasi di triwulan selanjutnya.

Pada triwulan III tahun 2024 kegiatan pendukung yaitu monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi negara mitra dialihkan untuk kegiatan pengendalian mutu lainnya yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi UPI sebanyak 5.501.000 dengan prosentase realisasi 73,35 %. Untuk kondisi triwulan III tahun 2025 target terealisasi 1 (satu) lokasi namun untuk anggaran masih status terblokir.

Akar Masalah

Belum optimalnya kegiatan money noreg negara mitra di TW III dimana baru terlaksana 1 kali.

Rekomendasi rencana aksi

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan money noreg negara mitra.

Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya

- 1) Telah dilaksanakan briefing pagi petugas pelayanan dan inspektur mutu yang salah satu poinnya adalah mengevaluasi anomali data pada tanggal 16 Juli 2025.
- 2) Telah dilaksanakan sharing session sosialisasi monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra pada tanggal 20 Agustus 2025



Monitoring dan Evaluasi Nomor Registrasi Negara Mitra

Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar di dukung 1 Indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 2 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar 1. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar 2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	1. 75 Nilai 2. 75 Nilai

IK6. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Sumber Strategi	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Rendita Balai Besar KIPM Makassar 2024-2025	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TIV 2025	Realisasi TIV 2025	% Realisasi terhadap Target TIV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2024	% Capaian terhadap Target Rendita
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar	6. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	-	75	75	91,3	121,8	121,8	-	-

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem

manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

dimana :

$\bar{x}$ = Rata rata
 $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke- 1, 2 , 3, ... n
 n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian adalah kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan di

laboratorium Balai Besar KIPM Makassar. Selama Triwulan III Tahun 2025, terdapat 3.167 kali pengujian laboratorium yang terdiri dari :

1. Pengujian Organoleptik sebanyak 450 kali
2. Pengujian Mikrobiologi sebanyak 1.706 kali
3. Pengujian Kimia sebanyak 833 kali
4. Pengujian Air dan Es sebanyak 178 kali

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 18 orang mulai dari Manager Puncak hingga analis dan staf laboratorium yang kompeten dalam melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium.

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini mendukung Asta Cita ke-2 dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

IKU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan dengan memberikan pelayanan laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan.

Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan III tahun 2025 mengalami peningkatan dari sebesar 36.537.000,- di Triwulan I Tahun 2025 menjadi Rp. 62.446.000,- di Triwulan II Tahun 2025. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2025 menurun sebesar 10,8% dari sebelumnya sebesar Rp. 70.000.000,- di tahun 2024.



Pada Triwulan III Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu telah direalisasikan sebesar Rp. 16.150.000,- atau sebesar 25,86 % dari anggaran tahun 2025. Sisa anggaran sebesar Rp. 46.296.000,- rencananya akan direalisasikan pada Triwulan IV sesuai dengan jadwal penerapan sistem manajemen mutu laboratorium untuk kegiatan kalibrasi alat, uji profisiensi, dan uji banding.

Kegiatan Verifikasi Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji ini dilaksanakan hanya satu kali dalam satu tahun. Untuk itu hasil penilaian verifikasi pada Triwulan III Tahun 2025 ini masih mengikut hasil verifikasi pada Triwulan I. Pada Triwulan I Tahun 2025, telah dilakukan penilaian Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium pada tanggal 20 Maret 2025 oleh Pusat Manajemen Mutu. Dari kegiatan verifikasi tersebut, berdasarkan Kuisisioner Verifikasi Penerapan SMM SNI ISO/IEC 17025:2017 maka Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai sebesar 91,23 dari target sebesar 75. Sehingga output kegiatan penerapan sistem manajemen mutu telah terealisasi sebesar 121,64 %.

Pada Triwulan III Tahun 2025 ini telah dilakukan kegiatan Sharing Session Refreshment Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17020:2012 yang dibawakan oleh Muhammad Irfan Rais selaku Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji. Kegiatan ini diikuti oleh 35 orang pegawai Balai Besar KIPM Makassar baik dari bidang Tata Usaha, Laboratorium dan Inspektur Mutu. Kegiatan refreshment ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pegawai mengenai penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi.

Pada tanggal 24 September 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti Q&A Pembentukan dan Pemeliharaan Panelis Organoleptik yang dilaksanakan oleh BUSPM secara daring dengan narasumber bapak Rino Masril sebagai analis organoleptik di BUSPM. Di dalam Q&A ini dibahas mengenai hal-hal yang sering ditanyakan pada saat laboratorium melaksanakan kegiatan pembentukan dan pemeliharaan panelis organoleptik.

Akar Masalah

Potensi masalah dalam penerapan SNI ISO/IEC 17025:2025 adalah kemampuan analis yang tidak mengikuti perkembangan kemajuan teknologi pengujian laboratorium.

Rekomendasi Rencana Aksi

Peningkatan kemampuan dan kompetensi analis laboratorium dalam bentuk sharing session ataupun mengikuti pelatihan internal atau eksternal dalam melakukan pengujian laboratorium sesuai standar internasional SNI ISO/IEC 17025:2017

Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya

Telah dilakukan penyelesaian tindakan perbaikan Surveilans ke-II SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Triwulan III Tahun 2025.

IK7. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Strategi	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2024 - 2025					Tahun 2025					Rencana Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2026	
		2024	2025	2026	2027	2028	Target 2025	Target TM II 2025	Realisasi TM II 2025	% Realisasi terhadap Target TM II 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2026	% Capaian terhadap Target Rencana
Peningkatan Penguasaan dan Peningkatan Mutu dan Keunggulan Hasil Kegiatan	7. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup JPT Balai Besar KIPM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa

Lembaga Inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (ISO 17020).

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah kegiatan surveilan penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Selama Triwulan III Tahun 2025, terdapat 76 kali pelaksanaan surveilan penerapan HACCP.

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

dimana :

$$\begin{array}{ll} \bar{X} & = \text{Rata-rata} \\ x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n & = \text{Nilai tingkat pemenuhan ke-1, 2, 3, ..., n} \\ n & = \text{Banyaknya nilai tingkat pemenuhan} \end{array}$$

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 21 orang mulai dari Manager Puncak hingga inspektur mutu hasil perikanan yang telah memiliki nomor registrasi inspektur mutu dan/atau telah mengikuti pelatihan HACCP dasar.

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi ini mendukung Asta Cita ke-2 dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

IKU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Kompeten dimana ASN dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas sesuai dengan tantangan yang ada. Dengan adanya perubahan tugas dan fungsi dalam penjaminan mutu hulu hingga hilir, ASN inspektur mutu dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan mengupdate regulasi-regulasi terbaru.

Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar Triwulan III tahun 2025 yang mengalami perubahan menjadi Rp. 27.304.000,- dari sebelumnya sebesar Rp. 3.500.000,- di Triwulan I Tahun 2025. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2025 meningkat sebesar 36,52% bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 20.000.000,-.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu telah direalisasikan sebesar Rp. 2.804.000,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 24.500.000,- rencananya akan direalisasikan pada Triwulan IV sesuai dengan jadwal re-akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012.

Pada Triwulan III Tahun 2025, telah dilakukan penilaian Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi pada tanggal 26 Agustus 2025 oleh Pusat Manajemen Mutu. Dari kegiatan verifikasi tersebut, berdasarkan Laporan Ketidaksesuaian Verifikasi Penerapan SMM SNI ISO/IEC 17020:2012 maka Balai Besar KIPM Makassar memperoleh

nilai sebesar 90,96 dari target sebesar 75. Sehingga output kegiatan penerapan sistem manajemen mutu telah terealisasi sebesar 121,28 %

Pada tanggal 10 Juli 2025 Inspektur mutu Balai Besar KIPM Makassar telah mengikuti Sharing Knowledge Penjaminan Mutu Komoditi Rumput Laut secara daring oleh Pusat Manajemen Mutu Pasca Panen. Sharing knowledge ini dilaksanakan karena besarnya potensi ekspor rumput laut di Indonesia, namun penjaminan mutu nya agak berbeda dengan komoditi perikanan dalam bentuk segar maupun beku sehingga perlu pemahaman yang lebih mendalam mengenai bisnis proses penjaminan mutu untuk rumput laut.

Pada tanggal 6 Agustus 2025 inspektur mutu Balai Besar KIPM Makassar juga telah mengikuti Pembahasan Daftar Periksa Penerapan Program Persyaratan Dasar (PPD) komoditi rumput laut kering dan rumput laut koloid secara daring oleh Pusat Manajemen Mutu Pasca Panen dan UNIDO. Pada kegiatan ini dibahas daftar periksa untuk program persyaratan dasar untuk komoditi Rumpu Laut dan Koloid sehingga dapat dibedakan dengan produk beku dan segar yang alur prosesnya memang berbeda.

Pada Triwulan III Tahun 2025 ini telah dilakukan kegiatan Sharing Session Refreshment Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17020:2012 yang dibawakan oleh Muhammad Irfan Rais selaku Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji. Kegiatan ini diikuti oleh 35 orang pegawai Balai Besar KIPM Makassar baik dari bidang Tata Usaha, Laboratorium dan Inspektur Mutu. Kegiatan refreshment ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pegawai mengenai penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi.

Akar Masalah

Sertifikat Akreditasi Lembaga Inspeksi Balai Besar KIPM Makassar dengan nomor akreditasi LI-089-IDN akan segera berakhir. Untuk itu perlu percepatan akreditasi ulang terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17020:2012

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan re-akreditasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17020:2012

Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya

Berdasarkan rekomendasi tindak lanjut triwulan sebelumnya, telah dilaksanakan pemeliharaan kompetensi inspektur mutu melalui Sharing Session Refreshment Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 17020 dan 17025 pada tanggal 9 September 2025



Kegiatan Sharing Session Refreshment Sistem Manajemen Mutu

Sasaran Kegiatan 3

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, untuk mencapai sasaran kegiatan ini diperlukan dukungan 10 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan . adapun penjelasan pencapaian 10 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :	
1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UPT Lingkup Balai Besar KIPM Makassar)	1. 92 Nilai
2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	2. 71,5 Nilai
3. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	3. 100 %
4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	4. 87 Indeks
5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	5. 86 Nilai
6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	6. 85 persen
7. Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	7. 76 Persen
8. Nilai minimal yang di persyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	8. 75 Nilai
9. Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	9. 1 Unit
10. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	10. 88 Nilai

IK8. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (K)	Realisasi Tahun 2021 - 2024					Tahun 2025					Rencana Balai Besar KIPM Makassar 2024 - 2029	
		2021	2022	2023	2024	2025	TARGET 2025	TARGET TWH II 2025	Realisasi TWH II 2025	% Realisasi terhadap TARGET TWH II 2025	% Realisasi terhadap TARGET Tahun 2025	TARGET 2025	% Capaian terhadap TARGET Rencana
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Pelayanan	Nilai indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar	88	88	88,44	86,38	87,16	90	90	86,42	100,00	100,00	-	-

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini terintegrasi dengan Aplikasi OM-SPAN. Penilaian IKPA diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Ruang lingkup :

PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 mengatur mengenai pengukuran dan penilaian secara sistematis dan objektif atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA dan menggunakan aplikasi yang dikelola oleh DJPB.

Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja

Pengukuran IKPA meliputi 3 aspek :



1. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:
 - a. Revisi DIPA bobot 10 %
 - b. Deviasi halaman 3 DIPA bobot 15%
2. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:

Penyerapan anggaran bobot 20%

 - b. Belanja Kontraktual bobot 10%
 - c. Penyelesaian Tagihan bobot 10%
 - d. Pengelolaan UP dan TUP bobot 10%
 - e. Dispensasi Surat Perintah Membayar bobot 0%
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini adalah capaian output. Bobot capaian output adalah 25%.

Total Konversi Bobot pada Aspek pengukuran dan Indikator Kinerja pada TW III Tahun Anggaran 2025 adalah 100%

Capaian nilai IKPA Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 96,42 persen dari target 92 persen. Pada triwulan ini berbeda dengan triwulan II 2025 terjadi perubahan bobot oleh sistem yaitu dari 80 persen ke 100 sehingga perhitungan untuk mendapatkan capaian kinerja adalah :

Capaian Kinerja IKPA diperoleh sebagai berikut:

Capaian kinerja IKPA = (Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran) / Konversi Bobot 100 %

Perhitungan perolehan dari Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran, Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan Indikator pendukung pada masing-masing adalah hasil perhitungan otomatis dari Aplikasi Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi Monev PA

Berikut tampilan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran Triwulan III tahun 2025 pada Balai Besar KIPM Makassar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR KANTORAN MANAJEMEN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sumber Data: SAP/2025

No	Rinc. 20%	Rinc. 5%	Rinc. 5%	Garis Seder	Penerangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Kategori Substansi	Efisiensi 3% (Penghematan)	Nilai Akhir (Nilai Total + Efisiensi Substansi)
						Rinc. 20%	Rinc. 5% & 5%	Perencanaan Anggaran	Belanja Realisasi	Pengeluaran Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP	Capaian Substansi				
1	100	100	100	42728	Salah satu dari 4 indikator	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100	100
					Salah satu dari 4 indikator	100	100	100	100	100	100	100				
					Salah satu dari 4 indikator	100	100	100	100	100	100	100				
					Salah satu dari 4 indikator	100	100	100	100	100	100	100				
Rata-rata						100	100	100		100	100					

Dibawah ini merupakan tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran:

Tabel perbandingan capaian kinerja pelaksanaan anggaran TW II 2025 dan TW III 2025

Indikator kinerja	Periode TW II 2025 (TQ2-52)		Periode TW III 2025 (TQ3-52)	
	Bobot	Nilai Akhir	Bobot	Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	10
Deviasi Hal III DIPA	15	12,00	15	11,50
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyempurnaan Anggaran	20	19,79	20	19,66
Belanja Konvensional	0	0	10	10
Pembiayaan Tagihan	0	0	10	10
Pengelolaan UP dan TUP	10	10	10	10
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	25	25	25
Capaian SPM (Pengurang)	0	0	0	0
Nilai Total	60	77,85	100	98,42
Nilai IKPA setelah konversi		97,88		98,42
Capaian (Realisasi/Target Q3)		105,75		104,80

Pada tabel diatas terlihat adanya penurunan nilai IKPA pada TW III 2025 dibandingkan TW II 2025 sebesar 0,95. Penurunan TW III 2025 dipengaruhi oleh Deviasi HAL III DIPA.

Beberapa hal yang mengakibatkan tidak maksimalnya nilai Deviasi halaman 3 DIPA sebagai indikator dari kinerja kualitas Perencanaan anggaran adalah:

- Adanya pagu blokir setelah melakukan pengisian RPD
- Perencanaan yang tidak akurat: Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tidak sesuai dengan realisasi anggaran dapat menyebabkan deviasi yang tinggi;
- Kemunduran jadwal belanja: Keterlambatan atau percepatan pelaksanaan kegiatan dapat mempengaruhi realisasi anggaran dan menyebabkan deviasi;

Sedangkan penyebab rendahnya dari realisasi anggaran adalah masih adanya pagu blokir sebagai akibat dari efisiensi anggaran sebesar Rp1.817.026.000

Tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran TW III 2025 dan TW III 2024

Indikator Kinerja	Periode TW III 2024 (TQ3-PS,TS)		Periode TW III 2025 (TQ3-PS)	
	Bobot	Nilai Akhir	Bobot	Nilai Akhir
Kualitas Pemantauan Anggaran				
Realisasi DIPA	30	10	30	10
Control Mekanisme DIPA	15	11,55	15	11,55
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Pemrosesan Anggaran	30	15,95	30	15,95
Belanja Konvensional	10	10	0	10
Pemrosesan Tagihan	10	10	0	10
Pengelolaan UP dan TUP	10	10	10	10
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	30	25	30	25
Disposisi SPM (Pengurang)	0	0	0	0
Nilai Total	300	57,55	300	55,42
Nilai IKPA setelah Koreksi		57,55		55,42
Capaian (Realisasi/Target Q3)		104,32		104,85

Pada tabel diatas terlihat adanya kenaikan nilai IKPA pada TW III 2025 dibandingkan TW III 2024 sebesar 0,78. Salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan capaian TW III 2025 adalah penetapan target IKPA TA 2025 lebih kecil dari penetapan target TA 2024.

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 10 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
 - 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK



- Surat Perintah Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor: B.005/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tgl 2 Januari 2025 dengan beranggotakan 1 Pegawai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan manajemen keuangan dan layanan perkantoran gaji dan tunjangan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya:

- Layanan manajemen keuangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp23.450.000. Pada TW III 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 0 persen. Pagu kegiatan ini masih terblokir seluruhnya. Output dari layanan manajemen keuangan adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.
- Layanan perkantoran gaji dan tunjangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp6.983.259.000. Pada TW III 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 4.990.697.532 atau 71,47 persen. Output dari layanan perkantoran gaji dan tunjangan adalah pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar.

Total pagu anggaran untuk mendukung capaian kinerja pelaksanaan anggaran adalah sebesar Rp7.006.709.000 dengan realisasi anggaran 4.990.697.532 atau 71,23 persen. sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan III 2024, kegiatan pada indikator kinerja ini hanya didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp9.468.000. Setelah revisi dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.440.000 atau 99,70 persen. terdapat penurunan realisasi anggaran pada Triwulan III 2025. Hal ini disebabkan pada Triwulan III 2025 pagu anggaran kegiatan layanan manajemen keuangan masih terblokir seluruhnya dan pagu anggaran pada Triwulan III 2024 sangat kecil.

Pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita.

Tangkapan Layar IKPA Triwulan III 2025 pada Aplikasi Monev PA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR KARANTINA RUMAH, PENSIKULAN BERTU DAN KESEHATAN MASYARAKAT, PERSILANGAN MAKASSAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Triwulan III 2025

No	Kode UPT	Kode BA	Kode Subur	Uraian Belanja	Kategori Anggaran	Realisasi Pelaksanaan Anggaran		Realisasi Pelaksanaan Anggaran					Saldo Total	Ketersediaan Anggaran	Saldo Anggaran	Saldo Anggaran
						Revisi 2025	Revisi 2025	Revisi 2025	Revisi 2025	Revisi 2025	Revisi 2025	Revisi 2025				
1	100	100	100	BALAI BESAR KARANTINA RUMAH, PENSIKULAN BERTU DAN KESEHATAN MASYARAKAT, PERSILANGAN MAKASSAR	Saldo	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Saldo	10	10	10	10	10	10	10				
					Saldo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
					Saldo	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00				

- Sertifikat E-learning Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA



Akar masalah

Kurang konsistennya realisasi dengan perencanaan anggaran yang telah disusun

Rekomendasi rencana aksi

- Pengelola anggaran merealisasikan anggaran sesuai dengan dokumen RPD yang telah disusun
- Penyusunan RPD tahun 2026 dilakukan bersama dengan para katimja dan para penanggungjawab kegiatan untuk meningkatkan nilai IKPA 2026.

Hasil Tindakanjuz Rekomendasi

- Tim keuangan melakukan rapat strategi meningkatkan capaian deviasi hal III DIPA pada IKPA TW III 2025 di tgl 11 Juli 2025. Pengelola keuangan khususnya PPK dan Bendahara Pengeluaran melakukan perencanaan realisasi anggaran dengan mengacu pada RPD yang telah dibuat.



Rapat Strategi peningkatan capaian deviasi

- Penugasan pegawai sebanyak 4 orang pengelola keuangan pada TW III 2025 dalam E-learning Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA dengan nomor pengusulan B.2174/BBKIPM.MKS/KP.210/VII/2025 Tanggal 23 Juli 2025



E-Learning Pembekalan Penyusunan RKAKL

IK9. Nilai Kinerja Perencanaan anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja (IK)	Rencana Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Rencana Balok Besar (RKB) Tahunan 2025 - 2026	
			2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target 2026	Rencana 2025	% Realisasi terhadap Target 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2026	% Capaian terhadap Target Rencana
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengendalian Tata ruang, Ketahanan dan Perencanaan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar	88	87,87	88,2	88,37	71,5	71,5	88,55	125,52	125,52	—	—		

Menteri keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I / dan / satuan kerja bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dimaksud bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor- faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.



Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

- Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
- Penyusunan reviu angka dasar;
- Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenan; dan
- Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga; dan/atau pihak-pihak lain, yang antara lain meliputi akademisi, pakar dan praktisi.

Untuk memantau Nilai Kinerja Anggaran, Kementerian Keuangan telah membuat suatu aplikasi yaitu Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap organisasi dapat selalu memantau dashboard kinerja anggaran dan melakukan peningkatan pada aspek-aspek penunjang Nilai Kinerja Anggaran tersebut.

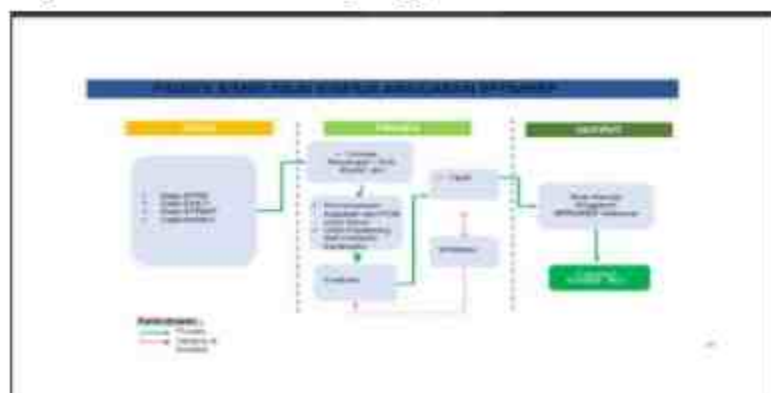
Pada triwulan III tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk mendukung tercapainya target kinerja ini antara lain :

- Penyusunan revisi anggaran

Aplikasi Monev Kementerian Keuangan pengukuran Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan pada 2 kategori yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan untuk tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya Nilai Kinerja Anggaran didasarkan dari 4 aspek yaitu Aspek Penyerapan, Konsistensi, Capaian realisasi Output, dan Nilai Efisiensi.

Berikut adalah proses bisnis terbentuknya data pada dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu

Penjelasan Dashboard Nilai Kinerja Anggaran Triwulan III tahun 2025



1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 9,2 %
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 48,65 %

Nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 9,2% yang terlihat pada aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id> belum dapat menjelaskan kondisi riil nilai kinerja perencanaan anggaran yang ada di Balai Besar KIPM Makassar. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id> belum update yang dibuktikan dengan statemen pada aplikasi yaitu "Nilai Kinerja saat ini baru dihitung

berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi”.

Jika dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025 anggaran sebesar 11,02% terjadi penurunan pada Triwulan III Tahun 2025 menjadi 9,2%. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II yang hanya 77,05%. Data detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Triwulan II Tahun 2025



Triwulan III Tahun 2025



Untuk itu perhitungan kinerja perencanaan anggaran Balai Besar KIPM Makassar diperoleh dari aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id> di login MONEVPA. Nilai kinerja perencanaan

penurunan deviasi yaitu menjadi 14,85%. Namun demikian secara total nilai perencanaan anggaran masih melebihi target yaitu 88.53% dari target 71,5%.

Untuk mendukung tercapainya IKU ini, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 9 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 Orang Pejabat Penandatangan SPM;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
 - 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK

Komitmen untuk terus meningkatkan kinerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara menjadi prioritas Balai Besar KIPM Makassar.

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran dan layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan Perencanaan dan penganggaran
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 57.675.000,-. Pada TW III 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 17.406.459,- Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.
- Layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan

Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 273.404.000-. Pada TW III 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 158.839.027,- Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.

Pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asa cita.

Akar masalah

- Tim perencana keuangan kurang akurat dalam penyusunan RPD;
- Pengelola anggaran kurang konsisten dalam melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan anggaran diselaraskan dengan pelaksanaan anggaran.

Rekomendasi rencana aksi

- Penyusunan RPD dilaksanakan dengan teliti;
- Melakukan monitoring dan evaluasi konsistensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Tindaklanjuti Rekomendasi sebelumnya

Pada tanggal 13 Agustus pengelola keuangan melaksanakan rapat monitoring yang membahas perihal capaian output dan capaian realisasi anggaran.



Rapat monitoring, capaian output dan capaian realisasi

IK 10. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Rencana Balai Besar KIPM Makassar 2023 - 2028	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TWH II 2025	Realisasi TWH II 2025	% Realisasi terhadap Target TWH II 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2024	% Capaian terhadap Target Rencana
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	10. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	100	100	100	100	100	100,00	100,00	-	-

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir;

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada

empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern;

Indikator kinerja “Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)” dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$\% P = (A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

%P = Persentase penyelesaian temuan;

A = Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 yang diselesaikan pada LHP atas kepatuhan;

B = Nilai temuan BPK tahun 2025;

Pada triwulan III tahun 2025 tidak terdapat pemeriksaan BPK, sehingga realisasi dari IKU ini dinilai mencapai 100%, jika dibandingkan TW II 2025 yaitu 100% dan pada TW I Tahun 2025

capaian realisasinya 100%. Dengan demikian penyelesaian temuan BPK pada lingkup Balai Besar KIPM Makassar dinilai konsisten.

Pada triwulan III tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan guna mendukung tercapainya indikator ini, yakni dengan melakukan pemeriksaan, verifikasi dan validasi terhadap seluruh bukti tagihan belanja untuk menentukan bahwa tagihan tersebut layak untuk dilakukan pembayaran. Dengan aktivitas tersebut diharapkan pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku sehingga tidak ada temuan dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional baik internal maupun eksternal;

Persentase penyelesaian temuan BPK mendukung Misi Asta Cita ke-7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan Korupsi dan Narkoba”. Hal ini karena dengan adanya IKU ini dapat mendorong instansi pemerintah dalam hal ini Balai Besar KIPM Makassar untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta mematuhi penyelesaian temuan BPK tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar yaitu “Akuntabel”. ASN bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pengelola anggaran sebanyak 11 orang, yang terdiri dari :

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;



- (5) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- (6) Bendahara Penerimaan;
- (7) Bendahara Pengeluaran;
- (8) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- (9) Verifikator Keuangan (3 orang);

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja 3987.EBA.994.002.0C dan 0H adalah sebesar Rp. 189.910.000,- yang terdiri dari :

- Layanan Perkantoran, Perawatan Kendaraan Bermotor semula Rp. 286.540.000,- menjadi 135.310.000,-;
- Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu semula Rp 24.600.000,- menjadi Rp. 54.600.000,-;

Sampai dengan triwulan III tahun 2025 telah direalisasikan anggaran Rp. 130.151.686,- atau 69% yang digunakan untuk Layanan perkantoran, Perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp. 90.794.222,- dan Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu sebesar Rp. 39.357.464,-

Akar Masalah

Potensi terjadinya tuntutan ganti rugi (kelebihan belanja) dikarenakan pengelola anggaran kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja;

Rekomendasi rencana aksi

Memastikan kecermatan verifikasi keuangan secara berjenjang (Verifikator Keuangan/Analisis Keuangan, PPK dan Bendahara) dengan penggunaan lembar checklist

Tindakanjutan Rekomendasi sebelumnya

Telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh bukti tagihan belanja, dan dituangkan dalam lembar checklist;



Verifikasi bukti tagihan belanja oleh PPK

IK 11. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sumber Strategi	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025					Rencana Balai Besar KIPM Makassar 2025-2026	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target T1 2025	Realisasi T1 2025	Realisasi Terkumpul Target T1 2025	Realisasi Terkumpul Target Tahun 2025	Target 2026	Realisasi Terkumpul Target Rencana
Pada Rasio Pemertanian yang efektif, efisien dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Ilmu, Hasil Penelitian dan Pemanfaatan	11. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar	40%	44%	52,25%	50,20%	50,75%	57%	-	-	-	-	-	-

Menurut UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya.

sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan

- c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Nilai Realisasi IP ASN Semester I Tahun 2024 adalah 90,05, Target Tahunan IP ASN Tahun 2025 adalah 87 dengan periode pelaporan Semester I nilai target 81 dan Semester II nilai target 87.

Nilai Realisasi IP ASN sampai dengan triwulan III 2025 adalah **88**

Dengan keterbatasan anggaran, TIM Kepegawaian Balai Besar KIPM Makassar berupaya melakukan pengembangan kompetensi ASN dengan pemanfaatan sumberdaya internal, Optimalisasi teknologi, perencanaan strategis dan kolaborasi.

❖ Pemanfaatan sumber daya internal :

- Sharing Session Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penerbitan SMKHP diikuti oleh pegawai teknis BPPMHKP Makassar dengan Narasumber Inspektur Mutu Balai Besar KIPM Makassar
- Refresment Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi SNI ISO/IEC 17020:2012 dan dan SNI ISO/IEC 17020:2012 Di Badan Mutu Kkp Makassar.

❖ Optimalisasi teknologi

- Pelatihan Evaluasi sertifikat kalibrasi timbangan sesuai dengan ISO 17025 yang diikuti oleh Ardiana, Muzakkir
- Norovirus pada produk perikanan, Ancaman, Tantangan serta penanggulangannya yang diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu
- Solusi Biosekuriti untuk tambak udang diikuti oleh Mohammad Zamrud



- Quality Assurance in the seaweed value chain diikuti oleh Waode Suharni
 - Penerapan SNI 9369:2025 wadah bersekat dari baja tahan karat untuk makanan diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu
 - Forum Kepegawaian Dan Sosialisasi Kode Etik Dan Perilaku Pegawai Lingkup Bppmhkp Tahun 2025 diikuti oleh Rosdiana
 - Penguatan Pemahaman Penjaminan Mutu Hasil
 - Perikanan melalui Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) diikuti oleh Mohammad Zamrud
 - Pembahasan daftar periksa (PPD) komoditi rumput laut kering dan rumput laut koloid diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu
 - Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA Angkatan VII Tahun 2025 diikuti oleh Jumhana
 - Edukasi Perpajakan diikuti oleh Kamdani
 - Kupas Tuntas Umur Simpan Produk Perikanan diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu
 - Meningkatkan Desain Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas diikuti oleh Arniyanti, Mohammad Zamrud.
 - Edukasi Perpajakan diikuti Kamdani
 - Pembentukan dan Pemeliharaan panelis terlatih sensori / organeleptik diikuti oleh Idawati Barung
 - Pemahaman proses penanganan dan pengolahan rumput laut diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu
- ❖ Perencanaan strategis dan kolaborasi :
- Pemberdayaan Nelayan Kecil “Pelatihan Cpib Di Atas Kapal” Di Kab. Sinjai bersinergi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai

- Bincang Inspiratif Pelayanan Publik Dengan Tema “Menuju Pelayanan Publik Yang Professional & Unggul (Professional & Excellent Service) bersinergi dengan Bank Negara Indonesia diikuti pegawai Balai Besar KIPM Makassar
- Seminar Diseminasi Pakan Pungsional Pada Budidaya Udang oleh PT. Grobest Indomakmur bertempat di Hotel Rinra Makassar diikuti Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- Pelatihan HACCP Dasar bekerjasama dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Bincang Inspiratif Pelayanan Publik Dengan Tema Service Excelent bersinergi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) diikuti pegawai Balai Besar KIPM Makassar
- Badan Mutu KKP Makassar mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Perbenihan Udang di Aula Lt. 2 Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin yang diselenggarakan oleh Pusat Kolaborasi Riset Shrimp Technology Badan Riset dan Inovasi Nasional – Universitas Hasanuddin
- Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Pelayanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Inspektur Mutu Badan Mutu KKP Makassar

Peningkatan kompetensi menjadikan budaya kerja berupa sikap dan perilaku Aparatur Sipil negara untuk melaksanakan tugas sesuai pelatihan/keterampilan yang telah dimiliki. Pelatihan fleksibel skill dan Pelayanan Publik dengan narasumber dari perbankan sehingga menambah wawasan yang akan merubah pola pikir dalam menyesuaikan diri dengan perubahan jangka pendek dan jangka panjang sehingga bisa menangani masalah atau tugas yang tidak terduga secara efektif.

Indikator Nilai IP ASN tercapai selain pengembangan kompetensi sebagai berikut :

1. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN BBKIPM Makassar, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 = -
 - b. Pendidikan S-2 :
 - S2 Keahlian : 7 orang
 - c. Pendidikan S-1 /D-IV :
 - S-1 /D-IV Keahlian : 12 orang
 - S-1 /D-IV Pengawas : 1 orang
 - S-1 /D-IV Pelaksana : 5 orang
 - d. Pendidikan D-III ;
 - D-III Keterampilan : 4 orang
 - D-III Pelaksana : 1 orang
 - e. SLTA :
 - SLTA Keterampilan : 4 orang
 - SLTA Pelaksana : 4 orang
2. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

Predikat Kinerja yang diperoleh ASN BBKIPM Makassar pada tahun 2024 adalah BAIK dan SANGAT BAIK



- Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir Aparatur Sipil Negara Lingkup Balai Besar KIPM Makassar tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sehingga semua ASN mendapatkan nilai 5

Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Sebagai perbandingan nilai IP ASN dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat disajikan sebagai berikut :

- Balai Besar KIPM Jakarta I dengan nilai IP ASN 84 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 88 masih lebih tinggi dengan selisih 4

BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	Tinggi	84	85	86	87	88	89	90
----------------------------	--------	----	----	----	----	----	----	----

- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Penanganan Pelanggaran dengan nilai IP ASN 84 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 88 masih lebih tinggi dengan selisih 4

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN	Tinggi	84	85	86	87	88	89	90
--	--------	----	----	----	----	----	----	----

Sumber data : <https://portal.kkp.go.id/apps/kepegawaian/lipasn> pertanggal 2 Oktober 2025

Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN

Balai Besar KIPM Makassar, mempunyai SDM Aparatur Sipil Negara sebanyak 37 Pegawai yang sebelumnya 34 pegawai, pegawai mutasi masuk sebanyak 3 orang yang UPT sebelumnya Adalah Stasiun KIPM Palu, Stasiun KIPM Ternate dan Stasiun KIPM Kendari

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Subbagian Umum	1
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	1
7.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	3
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2
10.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
11.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1
12.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	1
13.	Pelaksana	10
	Total	37

Anggaran yang mendukung indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, yaitu Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum, Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2024 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 77.285.000
- Anggaran Setelah revisi sebesar Rp. 73.833.000
- Realisasi Rp. 73.434.365 (99.46%)

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum , Perencanaan dan Pengembangan SDM AparaturTahun 2025 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 18.064.000
- Anggaran Setelah Blokir sebesar Rp. 0

Pada indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar KIPM Makassar memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita, dengan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara akan meningkatkan kualitas Sumber daya manusia dalam pelayanan publik.

Kompetensi ASN Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar bermanfaat bagi kemajuan organisasi dan individu, IP ASN merupakan area pengembangan diri dalam Upaya peningkatan profesionalitas sebagai ASN dan IP ASN sebagai kontrol sosial agar ASN bertindak professional dalam kaitan pelayanan publik

Akar masalah

- Potensi permasalahan dapat timbul dengan adanya efisiensi Anggaran yang dapat berdampak pada peningkatan kompetensi pegawai khususnya untuk pelatihan yang membutuhkan pertemuan klasikal dan praktek langsung.
- Kesadaran ASN dalam mengentry data sertifikat pada aplikasi MyAsn tepat waktu perlu ditingkatkan

Rekomendasi rencana aksi

- Aparatur Sipil Negara mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi secara luring dan daring

- Memperbanyak informasi peningkatan kompetensi kepada seluruh pegawai dan penugasan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi

Tindakan lanjut Rekomendasi sebelumnya

Aparatur Sipil Negara telah mengikuti Pelatihan secara daring dengan dibuktikan nilai IP ASN yang meningkat.



IK 12. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Tahun 2026 - 2028	
		2020	2021	2022	2023	2024	Tujuan 2025	Tujuan 2025 Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi Tahun 2025 Tahun 2025	% Realisasi Tahun 2025 Tahun 2025	Tujuan 2026	% Capaian Tahun 2026 Tahun 2026
Pada hasil Penilaian yang efektif, efisien dan akurat dalam proses pengendalian dan pengaplikasian nilai-nilai budaya dan perilaku	12. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar (70%) Makassar	85,4	86	85,3	87,19	85,8	85	-	-	0,00	0,00	-	-

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk



mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %

Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa :

Renstra 2025-2029, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi.

Yang sudah dilaksanakan sampai triwulan III tahun 2025 yaitu : penyusunan RKAKL dan Rencana Aksi Renja mencapai 22,5 %.

2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 %

Pengukuran Kinerja ini telah terselesaikan Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa :

Penyusunan Manual IKU tahun 2025 yang telah diselesaikan pada triwulan I terealisasi mencapai 30%



3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %

Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2025, dokumen yang harus disiapkan adalah Laporan Kinerja Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, triwulan IV dan Tahunan.

Sampai dengan triwulan III tahun 2025 telah disampaikan Laporan Kinerja Triwulan I dan Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2025 sehingga realisasi tercapai 9 %.

4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai Besar KIPM Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai Besar KIPM Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja. Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerjaku yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Sampai dengan triwulan III tahun 2025 telah dilakukan evaluasi kinerja secara internal dan eksternal realisasi tercapai 18.75%.

Bobot realisasi capaian :

$$= \text{Parameter 1 (22,5\%)} + \text{parameter 2 (30 \%)} + \text{parameter 3 (9 \%)} + \text{parameter 4 (18.75 \%)}$$

$$= 80,25 \%$$

Realisasi capaian = Bobot realisasi capaian x Target

$$= \frac{80,25}{86} \times 100$$

$$= 93.31 \%$$



Indikator ini di hitung Tahunan

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan III adalah :

Telah melakukan penginputan data dukung rencana aksi, pada aplikasi kinerjaku berupa pagu anggaran yang mendukung setiap indikator, realisasi anggaran, masalah, rekomendasi dan tindaklanjut dari rekomendasi sebelumnya, penginputan data dukung tersebut dilakukan setiap triwulanan.

Penilaian Mandiri SAKIP mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu “ Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini disebabkan karena dengan adanya penilaian mandiri sakip dapat meningkatkan output dari program kegiatan yang terdapat dalam Tugas dan Fungsi Balai Besar KIPM Makassar.

IKU ini mendukung terciptanya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu “Akuntabel” ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, hal ini disebabkan karena setiap pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi dipertanggungjawabkan secara tertulis dan disertai dengan dokumentasi kegiatan yang detail dan lengkap.

Untuk pemanfaatan melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 42.795.000 yang mengalami blokir sebanyak 100 %. jika dibandingkan pemanfaatan anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2024 dengan pagu Rp 38.668.000,- teralisasi anggaran sebesar Rp 37.405.199 atau 96.73%.

Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN Muda, APK APBN Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)

Akar Masalah

Potensi masalah dapat terjadi jika monitoring terhadap capaian kegiatan tidak berjalan optimal

Rekomendasi rencana aksi

Potensi masalah dapat terjadi jika monitoring terhadap capaian kegiatan tidak berjalan optimal

Tindaklanjutan Rekomendasi sebelumnya

Pada tanggal 13 Agustus pengelola keuangan melaksanakan rapat monitoring yang membahas perihal capaian output dan capaian realisasi anggaran.

IK 13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Sumber Strategi	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Kinerja Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2025	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target T100 2025	Realisasi T100 2025	% Realisasi terhadap Target T100 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2024	% Capaian terhadap Target Realisasi
Pada Halus Perencanaan yang efektif, tepat dan akurat dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Pada Halus Kelautan dan Perikanan	55. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar	83	88	100	100	100	88	88	100	117,88	117,88	-	-

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KIPM Makassar berdasarkan LHP dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh unit kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan pada unit kerja}} \times 100 \%$$

Pada triwulan III ini telah dilakukan pemenuhan dokumen tindak lanjut atas temuan evaluasi Itjen pada triwulan II Tahun 2025 yaitu pada rekomendasi 1 dan 3, sehingga mencapai hasil 100%.

Pada triwulan III Tahun 2025 tidak terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga nilai realisasi indikator kinerja ini mencapai 100. Berbeda dengan periode sebelumnya Triwulan II Tahun 2025 realisasi indikator kinerja ini hanya mencapai 94,12. Jika dibandingkan dengan pencapaian nilai Indikator Kinerja pada Triwulan yang sama pada Tahun 2024 sama-sama mencapai nilai 100.

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan anggaran dari DIPA Tahun 2025 pada mata anggaran 3987.EBA.994.002.0A, 3987.EBA.994.002.0G dan 3987.EBA.994.002.0I, dengan pagu anggaran semula Rp. 1.852.749.000,- setelah adanya revisi anggaran menjadi Rp.1.850.843.000,- yang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.1.422.547.268,- atau 76,86% yang digunakan untuk belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, belanja honor output kegiatan, belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Jika dibandingkan alokasi anggaran pada triwulan III tahun 2024 yaitu sebesar Rp.681.026.000,- terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 171,77%.

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang.

Indikator kinerja ini jika tercapai maka akan mendukung keberhasilan program prioritas KKP maupun Program Prioritas Nasional Asta Cita. Indikator kinerja ini secara spesifik mendukung Program Prioritas Nasional Asta Cita ke 7 yaitu "Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi dan narkoba".

IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja Ber-AHLAK di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar yaitu "Akuntabel" dimana ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang



diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Tercapainya target kinerja ini memncerminkan bahwa organisasi telah melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan dan standar yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan dengan akuntabel dan tepat waktu.

Aspek pemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan IKU ini yaitu memberikan informasi mengenai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, sehingga dapat mengambil tindakan dan Keputusan secara cepat, tepat dan akurat.

Akar Masalah

Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itjen.

Rekomendasi Rencana aksi

- Operator SIDAK melakukan pemantauan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Itjen secara berkala.
- Satuan Kerja melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Itjen secara lebih cepat.

Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya

- Telah dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Itjen pada aplikasi SIDAK periode Triwulan III Tahun 2025.



IK 14. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Strategi	Indikator Kinerja (IK)	Rencana Tahun 2022-2024					Tahun 2025				Rencana Sektoral (KIPM) Makassar 2025-2026	
		2022	2023	2024	2025	2026	Target 2025	Target FY II 2025	Realisasi FY II 2025	% Realisasi terhadap Target FY II 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	% Capaian terhadap Target Rencana
Peta Jalan Pemertan yang efektif, efisien dan akurat dalam bidang Pengadaan dan Pengawasan Mula Hasil Keluaran dan Pelayanan	14. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar (KIPM) Makassar (%)	—	—	79,59	79,26	84,94	75	75	100	133,33	133,33	—

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%) menggunakan rumus sebagai berikut :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP

$$= \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 2 892 982 000}}{\text{Rp. 2 892 982 000}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU pada triwulan III adalah sebesar 100 % dari target 76 % atau capaiannya sebesar 131,57 %. Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan II sebesar 131,57 %. Jadi untuk capaian realisasi Rencana Umum Pengadaan pada triwulan II dan triwulan III yang nilai paket yang diinput dengan nilai yang diumumkan adalah sama.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah

1. Menginventarisir kegiatan dan anggaran yang telah direvisi pada RKA- KL;
2. Operator menginput data barang dan jasa ke dalam aplikasi SIRUP, terlebih dahulu berkoordinasi dan komunikasi dengan pemegang akun KPA, PPK dan Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial untuk menunggu arahan dan petunjuk selanjutnya;
3. Mengupload Rencana umum pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar ke dalam aplikasi SIRUP

Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tersebut Balai Besar KIPM Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diupload di aplikasi SIRUP. Pada



triwulan II telah dilakukan revisi kegiatan dan anggaran sehingga Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/ Jasa perlu menyesuaikan, diinput serta diumumkan ke dalam portal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Adapun paket RUP yang telah diupload dan diumumkan sebesar Rp.2.892.982.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Paket Penyedia sebanyak 5 kegiatan Manajemen Mutu dengan jumlah anggaran Rp. 114.750.000,-
- b. Paket Penyedia sebanyak 6 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 9.176.000,-
- c. Paket Penyedia sebanyak 21 kegiatan Dukungan Manajemen Internal dengan jumlah anggaran Rp. 2.679.056.000,-
- d. Paket E-Purchasing sebanyak 1 kegiatan Dukungan Manajemen Internal dengan jumlah anggaran Rp. 90.000.000,-

Adapun periode pelaporan untuk IKU ini adalah tahunan sehingga capaian triwulan tidak bisa diukur hanya menggambarkan progres kegiatan PBJ yang diperoleh setiap triwulan. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Rencana Umum Pengadaan (RUP) Balai Besar KIPM Makassar yang telah diinput ke dalam aplikasi SIRUP LKPP.go.id yang dilaksanakan oleh tim Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, BPPMHP persentase capaian IKU ini adalah 100 %

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan III sebagai berikut :

Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP pada tanggal 4 Agustus 2025;

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2025 sebanyak 7 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada triwulan III tahun 2025 sebesar Rp. 120.504.000,- yang terdiri dari :

1. 3987.EBA.994, 002.OE Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian Kerja = Rp. 45.504.000,-
2. 3987.EBA.994, 002.OF Kesehatan dan Daya Tahan Tubuh = Rp. 73.500.000,-

Pada triwulan II 2025 alokasi anggaran untuk IKU ini adalah Rp. 120.504.000,-, namun dengan adanya pergeseran anggaran pada triwulan III 2025 sehingga pagu anggaran nilainya menjadi Rp 119.004.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 110.650.000,- dengan persentase 92,98 %. Adapun sisa pagu anggaran Rp. 8.954.000,- yang belum terealisasi akan digunakan dan direalisasikan pada triwulan IV sesuai dengan peruntukannya.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) berbasis Web (*Web based*) mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini disebabkan karena dengan adanya aplikasi SiRUP maka transparansi pada pengelolaan sistem pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, masyarakat dapat secara langsung mengakses pengadaan barang dan jasa.

Manfaatnya sebagai berikut :

1. SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
2. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.
3. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

- Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SIRUP pada website LKPP dengan alamat : inaproc.lkpp.go.id/sirup;
- Untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi Balai Besar KIPM Makassar dalam pengadaan barang/ jasa

Akar Masalah

Potensi masalah : Ketidaksesuaian nilai paket pengadaan yang diinput dengan nilai paket pengadaan yang terumumkan pada portal aplikasi SIRUP

Rekomendasi rencana aksi

Menginput data kegiatan dan anggaran dalam portal SIRUP.go.id agar lebih cermat dan lebih teliti

Tindaklanjut Rekomendasi sebelumnya

Operator telah menginput data kegiatan dan anggaran dalam portal SIRUP.go.id dengan cermat dan lebih teliti sehingga nilai paket pengadaan yang diinput sesuai dengan nilai paket yang terumumkan

IK 15. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran/Strategi	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025					Rencana Balai Besar KIPM Makassar 2025-2028	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tercapai 2025	Realisasi Tercapai 2025	Target Tercapai 2025	Target Tercapai 2025	Target 2025	Target Tercapai 2025
Data Akta Pembentukan yang jelas, terarah dan akurat sebagai dasar pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Pelayanan dan Performa	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar						15	15	15,15	100,00	100,00	-	-

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa untuk terwujudnya birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima, perlu melakukan pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja di instansi pemerintah;

Balai Besar KIPM Makassar telah menyandang predikat WBK sejak tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2018. Untuk mempertahankan predikat tersebut, maka Balai Besar KIPM Makassar harus konsisten dalam penerapannya khususnya penanaman nilai-nilai integritas kepada seluruh jajaran pegawai Balai Besar KIPM Makassar beserta *stakeholder* yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

- Sesuai surat Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor B.360/BPPMHKP.1/OT.720/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal Persiapan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan PPMHKP Tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar bersama 4 UPT lainnya ditetapkan sebagai unit kerja yang akan dilakukan penilaian implementasi WBK dan WBBM oleh TPI (Tim Penilai Internal) KKP Tahun 2025-2026;

- Target indikator kinerja ini bersifat tahunan, namun sampai dengan triwulan III tahun 2025 telah diperoleh hasil penilaian dari BPPMHKP. Berdasarkan penilaian dari tim penilai internal BPPMHKP diperoleh nilai total 75,19 atau 100,25% dari target, yang terdiri dari komponen pengungkit 37,16 dan komponen hasil 38,03.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan III yaitu :

- Pada triwulan III tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai wujud implementasi zona integritas WBK pada Balai Besar KIPM Makassar, diantaranya adalah :
 - (a) Penyusunan dan pengumpulan dokumen penerapan zona integritas WBK oleh masing-masing penanggung jawab unsur;
 - (b) Verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK oleh tim sekretariat WBK;
 - (c) Melaksanakan apel pagi setiap hari Senin yang dipimpin oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar atau pejabat lain yang ditunjuk. Pada apel pagi tersebut disampaikan himbauan penerapan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai, penerapan nilai-nilai kebangsaan dan internalisasi ASN Ber-AKHLAK;
 - (d) Pada tanggal 7 Juli 2025, dilaksanakan internalisasi pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai oleh tim agen perubahan, yang dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada pegawai teladan periode semester I tahun 2025;
 - (e) Tanggal 14 Juli 2025 telah dilaksanakan kegiatan bincang inspiratif dengan tema pelayanan prima bekerjasama dengan PT. BNI (Persero) Cabang Makassar. Pada momen tersebut dipaparkan tata cara melakukan melayani pelanggan, teknik berkomunikasi yang baik, etika penampilan dilanjutkan dengan praktek/simulasi serta diskusi dan tanya jawab;
 - (f) Pada tanggal 14 Juli 2025 dilaksanakan internalisasi oleh tim agen perubahan dengan tema "Filosofi Shinkansen" yang merupakan sarana transportasi yang

efisien, simbol kemajuan teknologi dan kebanggaan masyarakat Jepang, diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja seluruh pegawai;

- (g) Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Balai Besar KIPM Makassar, pada tanggal 16 Juli 2025 telah dilaksanakan briefing kepada petugas pelayanan dengan nara sumber (1) Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan (2) Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Materi briefing terkait penerapan nilai-nilai integritas, petugas pelayanan wajib memutakhirkan diri dengan regulasi yang sifatnya dinamis, memperbaiki kelemahan dalam pelayanan, penyajian data yang valid, etika dalam berkomunikasi, optimalkan penggunaan papan informasi digital, serta deklarasi konflik kepentingan,
- (h) Pada tanggal 17 Juli 2025, dilaksanakan penyusunan dokumen deklarasi konflik kepentingan oleh seluruh pegawai (ASN dan non ASN). Deklarasi konflik kepentingan tersebut berupa pernyataan dan daftar kepentingan pribadi pegawai yang ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan;
- (i) Tanggal 28 Juli 2025 dilaksanakan sosialisasi penerapan disiplin ASN oleh Kepala Subbagian Umum. Pada kesempatan tersebut dipaparkan regulasi yang berlaku dalam penegakan disiplin ASN dilanjutkan dengan tanya jawab;
- (j) Tanggal 4 Agustus 2025, dilaksanakan sosialisasi penerapan zona integritas WBK secara umum oleh ketua tim pembangunan zona integritas WBK pada Balai Besar KIPM Makassar, yang dilanjutkan dengan kuis dan tanya jawab;
- (k) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Balai Besar KIPM Makassar, pada tanggal 11 September 2025 dilakukan bincang inspiratif pelayanan prima yang diikuti oleh petugas pelayanan dan pegawai lainnya dengan nara sumber dari Bank Syariah Indonesia. Dalam even tersebut dipaparkan tata krama melayani pelanggan, teknik berkomunikasi yang baik, etika penampilan dilanjutkan dengan praktek/simulasi serta diskusi dan tanya jawab;

- (l) Penerbitan surat tugas dengan mencantumkan himbauan tidak melakukan KKN saat bertugas dan penyampaian melalui WAG pegawai dan pelaku usaha;
 - (m) Penegasan tidak memberikan komisi atau keuntungan dari penyedia kepada pengelola anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta penandatanganan pakta integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa;
 - (n) Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa perbaikan fasilitas difabel dan kelompok rentan, pengadaan papan informasi digital, dan penataan ruang pelayanan publik;
- Perhitungan nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebagai berikut :
- (1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
 - (2) Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
 - (3) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,50 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,00;
 - (4) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15,00;
 - (5) Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP;

Sumberdaya manusia yang terlibat dalam penerapan kinerja ini adalah seluruh pegawai lingkup Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 59 orang, yang terdiri dari ASN 37 orang dan non ASN 22 orang;

Alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja ini pada tahun 2025 semula sebesar Rp. 12.489.000,-, namun setelah adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah,

anggaranannya dialihkan menjadi Rp. 0,-. Anggaran untuk operasional zona integritas WBK menyatu dengan anggaran keperluan perkantoran.

Penerapan zona integritas WBK merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini berarti Asta Cita ke 7 fokus pada peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang adil dan upaya berkelanjutan dalam memberantasan korupsi dan pemberantasan narkoba. Asta Cita ke 7 juga sejalan dengan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan makanan dan susu gratis di sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan produktivitas lahan pertanian;

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir, Balai Besar KIPM Makassar secara konsisten telah menerapkan zona integritas WBK. Hal ini dapat mendukung terwujudnya program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan ke 3 “Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, serta ke 4 “Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”.

Adapun aspek pemanfaatan pada indikator ini yaitu Penerapan nilai-nilai integritas menuju WBK pada suatu unit kerja memiliki berbagai manfaat, yakni :

- (a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
- (b) Mencegah terjadinya korupsi;
- (c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
- (d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- (e) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
- (f) Meningkatkan reputasi instansi pemerintah;

(g) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024;

Akar masalah

Potensi kelambatan pemenuhan dokumentasi bukti penerapan zona integritas WBK oleh masing-masing penanggung jawab unsur dikarenakan penanggung jawab unsur masih lambat mengumpulkan dan mengolah data penerapan WBK yang menjadi tanggungjawabnya;

Rekomendasi rencana aksi

- Ketua tim WBK mengingatkan penyampaian dokumen implementasi WBK secara berkala kepada penanggung jawab unsur;
- Tim Sekretariat memastikan pemenuhan fasilitas pendukung penerapan WBK;

Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya

- Masing-masing penanggung jawab unsur menyampaikan dokumen penerapan zona integritas WBK sesuai tanggung jawabnya;
- Sekretariat melakukan verifikasi dokumen implementasi WBK;

IK 16. Inovasi pelayanan public lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Gelar dan Negeri	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Kinerja Sama (IK) Makassar 2020 - 2024	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target T10 2025	Realisasi T10 P 2025	% Realisasi terhadap Target T10 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2024	% Capaian terhadap Target Rencana
Pada Waktu Penyerahan yang efektif, lancar dan akurat dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Pekerjaan dan Pelayanan	5) inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar						1	1	1	100,00	100,00	-	-

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, sesuai Peraturan Menteri PANRB No.30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah secara kompetitif, adaptif, pertukaran pengalaman dan berkelanjutan melalui kompetisi, inovasi, system informasi inovasi, pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi, peningkatan kapasitas dan pemantauan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan K/L, Pemerintah Daerah, BMUN dan BUMD, Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun Kriteria Inovasi yaitu :

- a. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;
- c. Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
- d. Dapat ditransfer/ direplikasi, yaitu dapat dan/ atau telah dicontoh dan/ atau menjadi rujukan dan/ atau diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya;
- e. Berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

Di dalam peraturan Menteri PANRB No.91 tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan :

- Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ ide kreatif orisinal dan/ atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.

Pengembangan Inovasi pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui berbagai cara seperti Penggunaan Teknologi, Pelatihan, dan Kolaborasi.

a. Penggunaan teknologi

1. Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam upaya untuk meningkatkan kegiatan pemerintah
 2. Menggunakan teknologi mobile
 3. Menggunakan e-meterai/ meterai digital dan tanda tangan elektronik
 4. Menggunakan verifikasi biometrik dan SSO pada aplikasi SPBE.
 5. Verifikasi biometrik dan Single Sign On (SSO) adalah teknologi yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna dan mengakses aplikasi SPBE.
- Verifikasi biometric
 - Teknologi yang memverifikasi identitas pengguna dengan menggunakan ciri fisik atau perilaku unik, seperti wajah, sidik jari, atau iris mata
 - Data biometrik disimpan dalam sistem sebagai template digital

- Saat pengguna mencoba mengakses layanan, sistem membandingkan data biometrik baru dengan template yang sudah disimpan
- Verifikasi biometrik lebih aman dibandingkan dengan metode tradisional seperti PIN atau kata sandi
- Single Sign On (SSO)
 - Sistem verifikasi yang memungkinkan pengguna hanya menggunakan satu username dan password saja untuk masuk ke semua aplikasi SPBE
 - SSO mengintegrasikan berbagai aplikasi administrasi ke dalam satu sistem
 - SSO meningkatkan efisiensi dan keterpaduan layanan digital pemerintah
 - Penerapan verifikasi biometrik dan SSO pada aplikasi SPBE diharapkan dapat meningkatkan keamanan data dan memberikan kemudahan bagi pengguna
- Aplikasi SPBE adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE sendiri adalah konsep dan upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan publik

b. Pelatihan

1. Melakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk pegawai sektor publik
2. Meningkatkan kompetensi petugas pemberi pelayanan
3. Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti kursus tentang kreativitas, teknologi, dan kepemimpinan inovatif

c. Kolaborasi

1. Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti kursus tentang kreativitas, teknologi, dan kepemimpinan inovatif
2. Memfasilitasi kemitraan dengan pihak swasta
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses peningkatan kualitas pelayanan public

Inovasi pelayanan publik Balai Besar KIPM Makassar yaitu SIJEMPOL JALA EKSPOR yang telah dibangun sejak Januari 2024 merupakan solusi untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan di sektor kelautan dan perikanan. Inovasi ini hadir karena masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme perizinan berusaha yang pada akhirnya dapat menghambat peningkatan ekspor produk perikanan. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk memperluas ekspor bagi UMKM serta memberikan kemudahan dan efisiensi dalam layanan perizinan.

Untuk mendukung kegiatan Pelayanan Publik, Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan beberapa kegiatan :

1. Balai Besar KIPM Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil di Kabupaten Sinjai yang dibawakan oleh Plt. Balai Besar KIPM Makassar ibu Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi, M.Sc dengan materi Cara Penanganan Ikan yang Baik di Atas Kapal dimana Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai pada tanggal 1 s/d 2 Juli 2025.
2. Pada tanggal 3 Juli 2025 Balai Besar KIPM Makassar menjadi narasumber dalam kegiatan webinar peningkatan kapaitas SDM dengan tema "Peningkatan Daya Saing Produk Olahan Perikanan melalui Penerapan SKP dan GMP: Prosedur, Praktik dan Implementasi" yang dibawakan oleh ibu Fatima Tayang, S.St.Pi, MM yang dilaksanakan oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyeluhan Perikanan dengan materi mencakup pemahaman umum tentang Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) dan

Good Manufacturing Practices (GMP) termasuk prosedur penerapan serta praktik dalam implementasi pada produk olahan perikanan.

3. Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu narasumber pada kegiatan workshop Ekspor UMKM yang dilaksanakan oleh Bank Sulselbar dengan tema “Proudly Local, Ready for The World” pada tanggal 19 Agustus 2025 di Hyatt Place Makassar. Narasumber dari Balai Besar KIPM Makassar dibawa oleh Bapak Muhammad Irfan Rais, S.Pi yang memaparkan persyaratan dan langkah-langkah pengurusan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), dan sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) yang menjadi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari otoritas kompeten ekspor produk perikanan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi trigger bagi pertumbuhan ekspor komoditi perikanan di Sulawesi Selatan dengan lahirnya eksportir-eksportir baru yang akan menembus pasar dunia dari Sulawesi Selatan.
4. Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan fasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi bagi penanggungjawab mutu pada unit pengolahan ikan secara berkala dengan pelatihan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) pada tanggal 29 Juli 2025 di Hotel Dalton yang diikuti oleh penanggungjawab mutu dari unit pengolahan ikan (UPI), pemasok bahan baku, perorangan dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan. Pelatihan HACCP ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan pelatihan HACCP diharapkan mutu dan keamanan produk perikanan Sulawesi Selatan dapat terjaga dan meningkatkan keberterimaan produk perikanan Sulawesi Selatan di pasar.
5. Pada tanggal 18 September 2025 Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar beserta jajaran mengunjungi Balai Pengolahan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar. Kunjungan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengakselerasi

pelayanan perizinan ruang laut sebagai usaha budidaya. Kunjungan tersebut diterima langsung Kepala BPSPL Makassar, Andi Muhammad Ishak Yusma.

6. Dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi, Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan kegiatan koordinasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 22 September 2025. Pertemuan ini membahas berbagai langkah strategis dalam mendukung program pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya terkait peningkatan mutu, daya saing, serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah Sulawesi Selatan.
7. Pada tanggal 29 September 2025 Balai Besar KIPM Makassar melakukan pendampingan pada pelaku usaha (PT. Esaputlii Prakarsa Utama) dengan Otoritas kompeten BPSPL Makassar dalam rangka pengurusan PKKPRL terkait dengan rencana izin usaha pembenihan dan pembesaran lobster di Keramba Jaring Apung.
8. Dalam mendukung IKU ini terdapat beberapa kegiatan yang diikuti oleh Pegawai Balai Besar KIPM Makassar yaitu :

No	Pelatihan/ Sosialisasi/ Workshop	Pelaksanaan	Penyelenggara
1	Meningkatkan Desain Inovasi Pelayanan Publik yang Berkualitas	04 September 2025	SDS - Pusat Inovasi Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja

Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam kegiatan inovasi pelayanan publik adalah seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 59 pegawai, terdiri dari pegawai PNS sebanyak 36 pegawai dan pegawai PPNP/PJLP sebanyak 23 pegawai.

Untuk mendukung kegiatan Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025, anggaran tersedia pada Pagu 3987.EBA.962.051.00 sebesar Rp.3.600.000,-

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, telah terealisasi sebesar Rp. 1.646.000,- atau sebesar 45,72%. Ini mengalami kenaikan sebesar 10,51 % dari TW II Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 1.267.500,- atau 35,21%.

Didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar untuk Indikator Kinerja Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak termasuk dalam kegiatan Program Nasional pada tahun 2025 namun Inovasi Pelayanan Publik umumnya tergolong sebagai kegiatan yang mendukung program nasional dalam reformasi birokrasi, transformasi digital pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya saing dan kualitas SDM

Inovasi pelayanan publik bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Manfaat inovasi pelayanan publik yaitu :

- **Meningkatkan kualitas layanan**
Inovasi dapat membuat pelayanan publik lebih efektif, efisien, dan mudah diakses sehingga mampu memberikan rasa kepuasan yang lebih tinggi.
- **Meningkatkan Citra dan Kepercayaan Publik**
Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat ketika layanan terasa lebih manusiawi, responsive dan pemberi layanan terpercaya.
- **Efisiensi Biaya dan Waktu**
Proses yang tadinya lambat dan birokratis bisa dipangkas serta mampu menghemat anggaran operasional.
- **Mempersiapkan menghadapi perubahan**
Inovasi dapat membantu pemerintah beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di masa mendatang.
- **Menjawab kebutuhan masyarakat**

Inovasi dapat membantu pemerintah mengembangkan pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Akar Masalah

Keterbatasan sumber daya sehingga penerapan inovasi pelayanan publik kurang optimal dilaksanakan.

Rekomendasi rencana aksi

1. Agar dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam penerapan inovasi pelayanan publik
2. Melaksanakan pertemuan Tim Inovasi pelayanan publik dalam rangka optimalisasi penerapan inovasi SIJEMPOL

Tindaklanjuti Rekomendasi

Telah dilaksanakan koordinasi dengan BPSPL Makassar dan Dinas Provinsi Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan



Keg. Pemberdayaan Nelayan Kecil di Kab. Sinjai



Workshop Ekspor UMKM "Proudly Local, Ready For The World"

IK 17. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Rencana Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Rencana Kerja Tahun 2025 Makassar 2025 - 2026	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target T1/1 2025	Realisasi T1/1/1 2025	U. Realisasi T1/1/1 2025	U. Realisasi T1/1/1 2025	Target 2025	U. Realisasi Target Rencana
Pada tahun pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam meningkatkan pelayanan dan pengabdian Masyarakat Melalui Pelayanan dan Partisipasi	17. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Balai Besar KIPM Makassar	-	-	85,0	81,0	81,7	82	82	88,88	100,00	100,00	-	-

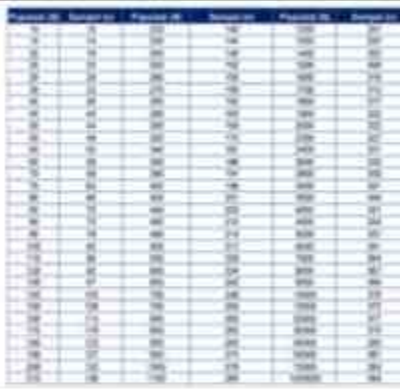
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14> .

Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SURvey kepuasAN masyarakat) melalui link <https://pts.kkp.go.id/skm/s/u/14>. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.

Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Besar KIPM Makassar survey dilakukan terhadap 11 (Sebelas) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu:

- Laporan hasil uji mutu produk perikanan
- Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)
- Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
- Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)
- Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)
- Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:

Formula Isaac & Michael					
$S = \frac{X^2 NP (1-P) + d^2 (N-1) + X^2 P (1-P)}{(0.05)^2 \times 47} + (3.841 \times 0.5 \times 0.5)$					
X = Nilai chi square tabel = 3.841 dimana df = 1 dan $\alpha = 5\% = 0.05$ P = Perkiraan proporsi populasi (Jika tidak diketahui maka P = 0.5) N = Jumlah Populasi d = tingkat toleransi kesalahan (0.05)					
$S = \frac{3.841 \times 48 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05)^2 \times 47} + (3.841 \times 0.5 \times 0.5)$					
$S = \frac{48.092}{0.0011025} = 42.796 = 43$					
					

Jumlah layanan yang dilakukan pada Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 3.590 kali, maka berdasarkan tabel diatas jumlah populasi sebanyak 4.000 minimal sampel responden yang diambil adalah sebanyak 351 responden. Hasil survey kepuasan Masyarakat diketahui jumlah responden sebesar 660, hal ini sudah memenuhi jumlah minimal responden sesuai dengan formula Isaac dan Michael tersebut. Peningkatan jumlah responden ini didukung oleh kesadaran Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu/Asisten Inspektur Mutu dalam memberikan link Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan di Triwulan III ini.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111.$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

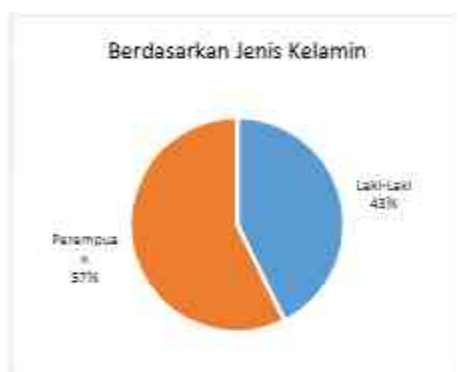
$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar KIPM Makassar.

Pada triwulan III Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan survey terhadap 660 responden, dengan nilai Indeks Kepuasan IKM 3,87 atau sebesar **96,85** setelah dikonversi (**Sangat Baik**). Nilai IKM tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 88 atau capaian 110,06%. Apabila data Hasil IKM Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan dengan TW.III Tahun 2025, maka nilai unsur pelayanan dapat dilihat sebagai berikut:

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan		Perubahan
		Triwulan II - 2025	Triwulan III - 2025	
1	Kesesuaian persyaratan	3.730	3.885	↑
2	Kemudahan prosedur	3.724	3.874	↑
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3.674	3.871	↑
4	Kesesuaian biaya	3.757	3.865	↑
5	Kesesuaian produk	3.737	3.877	↑

6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3.665	3.873	↑
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3.693	3.871	↑
8	Layanan konsultasi dan pengaduan	3.740	3.879	↑
9	Kualitas isi/sarana	3.702	3.873	↑
	Nilai IKM	92,84	96,85	



Jika dilihat nilai perunsur, nilai unsur yang paling rendah adalah unsur **kesesuaian biaya**, unsur **Kesesuaian jangka waktu penyelesaian**, serta unsur **Kemudahan dalam penggunaan fitur** dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas

dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan unsur kesesuaian biaya, unsur Kesesuaian jangka waktu penyelesaian, serta unsur Kemudahan dalam penggunaan fitur walaupun nilai unsur tersebut sudah berada dalam kategori Sangat Baik.

Dalam pelayanan sertifikasi ekspor, Balai Besar KIPM Makassar menggunakan aplikasi Aplikasi SIAP Mutu (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu) dalam rangka penerbitan SMKHP digunakan pertanggal 1 Maret 2025 secara serentak semua UPT BPPMHKP yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Namun dalam pelaksanaannya Aplikasi SIAP Mutu masih dalam tahap penyempurnaan dan masih ada fitur yang dibutuhkan bagi pengguna layanan.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan III pada tahun 2024, maka nilai IKM pada triwulan III 2025 mengalami peningkatan dari 93,05 menjadi 96,85. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Balai Besar KIPM Makassar memperoleh respon positif dari masyarakat.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan II tahun 2025, maka nilai IKM pada triwulan III 2025 mengalami peningkatan dari 92,84 menjadi 96,85.

Meningkatkannya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Triwulan II Tahun 2025 ke Triwulan III 2025 sejalan dengan layanan konsultasi petugas pelayanan pasca transisi penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Petugas pelayanan memberikan informasi dan solusi terhadap kebingungan pelaku usaha tentang penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan, serta petugas lebih komunikatif meminta kritik, saran dan masukan terhadap peningkatan pelayanan publik dari Balai Besar KIPM Makassar. Sehingga nilai IKM dapat ditingkatkan dari unsur Layanan konsultasi dan Pengaduan pada Triwulan III Tahun 2025.

Balai Besar KIPM Makassar berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan:

- Tanggal 14 Juli 2025 telah dilaksanakan kegiatan bincang inspiratif dengan tema pelayanan prima bekerjasama dengan PT. BNI (Persero) Cabang Makassar. Pada momen tersebut dipaparkan tata cara melakukan melayani pelanggan, teknik berkomunikasi yang baik, etika penampilan dilanjutkan dengan praktek/simulasi serta diskusi dan tanya jawab;

Pada tanggal 16 Juli 2025 dilaksanakan Briefing Petugas Pelayanan dilaksanakan untuk meningkatkan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, serta memutakhirkan diri dengan ketentuan regulasi, memperkaya diri dengan pengetahuan baru yang terjadi di KKP.

Pada tanggal 27 Juli 2025 dilaksanakan Sharing Session Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Penerbitan SMKHP, yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman serta meningkatkan kapasitas teknis para petugas dalam menerapkan petunjuk teknis yang berlaku, guna menjamin mutu dan keamanan produk perikanan yang akan diperdagangkan maupun diekspor.

Pada tanggal 11 September 2025 dilaksanakan Bincang Inspiratif Service Excelent yang bersinergi dengan PT. BSI dalam peningkatan kualitas pelayanan yang dalam melakukan layanan, petugas bukan hanya mempunyai penampilan yang bagus tapi mempunyai skill dan attitude yang baik.

Pada tanggal 25 September 2025 dilaksanakan Sharing session Pelayanan Publik ramah kelompok rentan sebagai bagian dari komitmen kami untuk memastikan akses informasi dan layanan yang merata. Kegiatan ini menyasar masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak, agar mereka memperoleh

pemahaman yang jelas mengenai keamanan dan mutu produk kelautan dan perikanan serta pentingnya konsumsi produk yang aman dan berkualitas.

Pada tanggal 30 September 2025 dilaksanakan Sosialisasi KepMen KP Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Pelayanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara daring yang dihadiri 60 orang peserta yang berasal dari berbagai instansi terkait, pelaku usaha perikanan, serta komunitas nelayan.

Bukti komitmen petugas pelayanan dan IMUT/AIMUT tersebut menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Triwulan III 2025 meningkat dari 92,84 menjadi 96,85. Namun demikian peningkatan berkelanjutan melalui kritik dan saran pengguna layanan tetap dilakukan, sehingga kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dan dipertahankan.

Adapun kritik, saran dan masukan dari masyarakat melalui aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat terdapat tanggapan sebagai berikut:

- Kecepatan merespon konsultasi melalui call center agar dipercepat;
- Beberapa fitur belum terdapat pada aplikasi yang dapat memudahkan pengguna layanan;

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
4.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	3
7.	PPNPN	12
8.	PJLP	10
	TOTAL	42

Alokasi anggaran awal kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2025 yaitu 3987 EBA 994.002.B Semula Rp. 1.292.244.000, - dan terjadi revisi anggaran awal menjadi Rp. 476.445.000, -. Pada triwulan III terjadi revisi anggaran menjadi Rp. 439.951.000,- Hingga Triwulan III tahun 2025, anggaran yang sudah terealisasi sebanyak **Rp. 253.504.590,-** atau 57,62 % pada langganan daya dan jasa. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 98.391.000,-. Sehingga sisa anggaran sebesar **Rp. 88.055.410,-**

Alokasi anggaran kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2024 yaitu Rp. 12.500.000,-. Pada Triwulan III tahun 2024 ini, anggaran untuk Survei Kepuasan Masyarakat dihilangkan dan dialihkan ke kegiatan yang lebih urgent.

Anggaran dari Tahun 2024 dengan tahun 2025 berbeda sangat signifikan karena pada tahun 2025 anggaran untuk IKU Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) mengambil pada anggaran Langganan daya dan jasa sebagai penunjang tersedianya sarana dan prasana pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu prioritas nasional karena dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah memberikan perhatian atas percepatan digitalisasi pelayanan publik sejalan dengan Asta Cita yang ke 5 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tools untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Yang mana Survey ini dapat mengetahui kritik, saran dan masukan dari

Masyarakat pengguna layanan pada Balai Besar KIPM Makassar untuk memperbaiki layanan menjadi pelayanan publik yang prima.

IKU ini mendukung budaya ASN yang berakhlak dilingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan. ASN berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini mencakup memahami kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai alat untuk mengetahui saran kritik masukan Masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik Balai Besar KIPM Makassar untuk memberikan pelayanan yang prima.

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai Besar KIPM Makassar dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Survey kepuasan Masyarakat ini sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Akar Masalah

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat TW III tahun 2025 terdapat 3 unsur yang terbawah yaitu unsur kesesuaian biaya, unsur Kesesuaian jangka waktu penyelesaian, serta unsur Kemudahan dalam penggunaan fitur dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan meskipun semua unsur sudah mengalami kenaikan nilai.

Rekomendasi rencana aksi

- Memposting terkait biaya melalui sosial media;
- Memposting terkait janji layanan melalui sosial media;
- Asistensi kepada pengguna aplikasi SIAP Mutu

Tindaklanjuti Rekomendasi sebelumnya

- Briefing kepada Petugas Layanan pada tanggal 16 Juli 2025, untuk lebih aktif meminta kritik saran dan masukan kepada pengguna layanan untuk perbaikan pelayanan publik. Serta diharapkan inspektur mutu dan petugas pelayanan memutakhirkan diri dengan ketentuan regulasi, memperkaya diri dengan pengetahuan baru yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Sosialisasi kepada pengguna layanan mengenai Layanan terbaru Balai Besar KIPM Makassar terkait dengan Keputusan Menteri KP nomor 20 Tahun 2025 mengenai Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik lingkup KKP pada tanggal 30 September 2025.

Yang dimana hasilnya IKM meningkat di triwulan III 2025 dari 93,05 menjadi 96,85



IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai Besar KIPM Makassar Triwulan III Tahun 2025, secara umum rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar KIPM Makassar 113,67 (kategori Istimewa). dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	70	100
2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai Besar KIPM Makassar	70	83,63
3.	Rasio eks[ort ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan eksport lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	99	100
4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	75	91,23
5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	75	90,96
6.	Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	92	96,42
7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	71,5	88,53
8.	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	85	100
9.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP	76	100
10.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT BALAI BESAR KIPM Makassar	88	96,85

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil Evaluasi kinerja Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan III Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Memperbanyak data dukung inspeksi berupa kondisi lokasi secara keseluruhan baik melalui foto maupun video sebelum kegiatan inspeksi dilaksanakan.. (IKU1)
2. Memperbanyak data dukung inspeksi berupa kondisi lokasi secara keseluruhan baik melalui foto maupun video sebelum kegiatan inspeksi dilaksanakan. (IKU2)
3. Menyampaikan laporan hasil uji pada instansi terkait (IKU3)
4. Penyusunan RPD tahun 2026 dilakukan dilakukan bersama dengan para katimja dan para penanggungjawab kegiatan untuk meningkatkan nilai IKPA 2026 (IKU 8)

4.3 Tindaklanjut

Adapun rekomendasi pada triwulan II tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti pada triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi triwulan sebelumnya

Melakukan koordinasi dengan pihak BPSPL Makassar dalam rangka percepatan penerbitan PKKPR. (IKU1)

Tindaklanjut : 1). Tindak lanjut rekomendasi 1 : Pada tanggal 18 September 2025 telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan BPSPL Makassar di Ruang Pertemuan BPSPL Makassar di Kab. Maros terkait dengan percepatan layanan surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

2). Tindak lanjut rekomendasi 2 : pada tanggal 1 Juli 2025 koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Untia dan Dinas Perikanan Kab. Sinjai terkait Percepatan Sertifikasi CPiB Kapal di Hotel Grand Rofina Kab. Sinjai.

2. Rekomendasi triwulan sebelumnya :

Melaksanakan sharing session peningkatan kompetensi Inspektur Mutu (IKU2)

Tindaklanjut : Telah dilakukan sharing session peningkatan kompetensi Inspektur Mutu tentang PP NO 28 Tahun 2025 nspektur Mutu pada tanggal 21 Agustus 2025

3. Rekomendasi triwulan sebelumnya :

Melakukan refreshment cara pengambilan dan penanganan sampel (IKU3)

Tindaklanjut : Telah melakukan Refresment/Sharing session peningkatan kompetensi inspektur mutu melalui bincang Inspiratif terkait Keputusan Kepala BKIPM No. 96 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis monitoring cemaran perairan pada tanggal 24 Juli 2025

4. Rekomendasi triwulan sebelumnya :

Melakukan evaluasi tentang anomali data kepada petugas pelayanan dan inspektur mutu (IKU5)

Tindaklanjut : 1). Telah dilaksanakan briefing pagi petugas pelayanan dan inspektur mutu yang salah satu poinnya adalah mengevaluasi anomali data pada tanggal 16 Juli 2025. 2) Telah dilaksanakan sharing session sosialisasi monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra pada tanggal 20 Agustus 2025.

5. Rekomendasi triwulan sebelumnya :

Penyelesaian tindakan perbaikan Surveilans II SNI ISO/IEC 17025:2017 di Triwulan III Tahun 2025 (IKU6)

Tindaklanjut : Telah dilakukan penyelesaian tindakan perbaikan Surveilans ke-II SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Triwulan III Tahun 2025.

6. Rekomendasi triwulan sebelumnya :

Sosialisasi kepada pengguna layanan mengenai Layanan terbaru Balai Besar KIPM Makassar terkait dengan Keputusan Menteri KP nomor 20 Tahun 2025 mengenai Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik lingkup KKP (IKU17)

Tindaklanjut : 1). Briefing kepada Petugas Layanan pada tanggal 16 Juli 2025, untuk lebih aktif meminta kritik saran dan masukan kepada pengguna layanan untuk perbaikan pelayanan publik. Serta diharapkan inspektur mutu dan petugas pelayanan memutakhirkan diri dengan ketentuan regulasi, memperkaya diri dengan pengetahuan baru yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2). Sosialisasi kepada pengguna layanan mengenai Layanan terbaru Balai Besar KIPM Makassar terkait dengan Keputusan Menteri KP nomor 20 Tahun 2025 mengenai Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik lingkup KKP pada tanggal 30 September 2025. Yang dimana hasilnya IKM meningkat di triwulan III 2025 dari 93,05 menjadi 96,85.

Lampiran Form Capaian Kinerja
Triwulan III 2025

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Timja	:	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan III Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	70	70	70	70	0	0	0	0	70
Realisasi	100	100	100	100	0	0	0	0	0
%Capaian	142,85	142,85	142,85	142,85	0	0	0	0	0

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm.1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm.2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

DESKRIPSI

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.
- BPPMHKP Makassar saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.
- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :
 - Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan;
 - Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB);
 - Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBI);
 - Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPB);
 - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOB);
 - Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOB);

- Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.
- Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.
- Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.
- Cara Pembuatan pakan ikan yang baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.
- Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CDOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.
- Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk rumahan dan pengawasan mutu guna menghasilkan yang aman bermutu dan berkhasiat.
- Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{Xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

Xn = Jumlah dari Unsur Pembentuk

$$A/B/C/D/E/F = \frac{\text{Jumlah sertifikat yang terbit}}{\text{Jumlah permohonan}} \times 100\%$$

Adapun jumlah permohonan dan jumlah sertifikat yang terbit dapat dilihat pada matriks berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Permohonan Yang Lolos Verifikasi Berkas	Jumlah Sertifikat yang Terbit	Persentase Unit Usaha yang Menerapkan Sertifikasi
1	Sertifikasi CPIB Kapal	58	58	100 %
2	Sertifikasi CBIB	1	1	100 %
3	Sertifikasi CPIB	0	0	0
4	Sertifikasi CPPIB	0	0	0
5	Sertifikasi CPOIB	0	0	0
6	Sertifikasi CDOIB	0	0	0

Dengan demikian realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan kemandirian pangan Triwulan III adalah 100 %.

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian Triwulan II Tahun 2025 maka realisasi pada triwulan III adalah sama yaitu 100%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena merupakan IKU baru.

- Pada triwulan III tahun 2025 tidak terdapat Permohonan sertifikasi CPIB, CPPIB, CPOIB dan CDOIB namun telah dilakukan pengawasan mutu melalui kegiatan surveilan penilaian dan verifikasi konsistensi dan efektivitas penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit pembenihan yang telah tersertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) sebanyak 5 unit dan pada Unit Pembuatan Pakan yang telah tersertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) sebanyak 2 unit dengan output kegiatan adalah Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS). Untuk SKHS diserahkan ke Pelaku Usaha setelah dilakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- Pada tanggal 1 Juli 2025 mengikuti kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil melalui Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal yang diikuti sebanyak 50 orang nelayan, dilanjutkan dengan koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Untia dan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam rangka percepatan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal yang diselenggarakan di Kabupaten Sinjai.
- Mengikut help desk yang diselenggarakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer setiap hari Selasa pada bulan Juli 2025 yang membahas terkait progres percepatan sertifikasi primer dan kendala-kendala yang dihadapi.
- Pada tanggal 23 Juli 2025 telah dilaksanakan Sosialisasi Juknis Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Kegiatan CPPIB dan diikuti oleh seluruh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.
- Pada tanggal 1 Agustus 2025 telah dilakukan rapat penyesuaian sertifikasi primer pasca perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
- Pada tanggal 18 September 2025 telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan BPSPL Makassar di Ruang Pertemuan BPSPL Makassar di Kab. Maros terkait dengan percepatan layanan surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
- Pada tanggal 22 September 2025 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di Sulawesi Selatan khususnya terkait dengan pengendalian di sektor produksi primer.

SDM

- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CPIB Kapal pada TW III sebanyak 20 orang yang terdiri dari 16 Inspektur Mutu dan 4 Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.
- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CBIB pada TW III sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar dan 1 Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar;
- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan surveilan CPIB pada TW III sebanyak 8 orang yang terdiri dari 6 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar dan 2 Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar;
- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CPPIB pada TW III sebanyak 4 orang yang terdiri dari 3 Inspektur Mutu dan 1 Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.

ANGGARAN

- Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 95.000.000 kemudian direvisi menjadi Rp 18.820.000 yang digunakan untuk Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer Rp. 18.820.000.
- Untuk anggaran pelaksanaan kegiatan sertifikasi produksi primer semula Rp. 18.820.000 menjadi Rp. 24.600.000 karena adanya revisi anggaran (relaksasi blokir).

PROGRAM NASIONAL

- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

ASPEK PEMANFAATANNYA

- Pemanfaatan realisasi anggaran sampai dengan TW III Tahun 2025 sebesar Rp. 15.647.000,- atau sebesar 69,01 % dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SISA (RP)
1.	Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer	24.600.000	15.647.000	7.623.000
JUMLAH		24.600.000	-	7.623.000

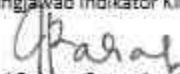
Catatan : Dari sisa anggaran Rp. 7.623.000, sisa anggaran untuk kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer adalah sebanyak Rp. 3.033.000 untuk kegiatan perjalanan dinas biasa CBIB, CPIB dan CPIB Kapal, sedangkan sisa anggaran sebanyak Rp. 4.590.000 digunakan untuk kegiatan Monitoring Cemarairan Perairan.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi permasalahan adalah kurang akuratnya hasil kegiatan inspeksi yang dilaksanakan melalui *remote inspection* (Virtual)

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Memperbanyak data dukung inspeksi berupa kondisi lokasi secara keseluruhan baik melalui foto maupun video sebelum kegiatan inspeksi dilaksanakan.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab :
- Tindak lanjut rekomendasi 1 : Pada tanggal 18 September 2025 telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan BPSPL Makassar di Ruang Pertemuan BPSPL Makassar di Kab. Maros terkait dengan percepatan layanan surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). - Tindak lanjut rekomendasi 2 : pada tanggal 1 Juli 2025 koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Untia dan Dinas Perikanan Kab. Sinjai terkait Percepatan Sertifikasi CPIB Kapal di Hotel Grand Rofina Kab. Sinjai	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Makassar, 7 Oktober 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja


Sri Rahayu Setyaningsih

**DAFTAR RUANG LINGKUP SERTIFIKASI CBIB
TRITULAN III TAHUN 2025**

No.	Nama UPR	Produk	Grade	No, Sertifikat
1	PT. ESAPUTLII PRAKARSA UTAMA	Udang vannamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)	A	ID-CBIB-73-P-250150 Tanggal 23 Juli 2025

DAFTAR SERTIFIKASI CPIB KAPAL
... W _ LAN II , AGUN 2003

SL	SHIP NAME	ORIGIN PORT	TYPE NAME	ORIGIN MOVED	DESTINATION	SHIP TYPE AND VERSION	DEPART DATE	ARRIVAL DATE AND TIME	STATUS
01	006 Agave (MEX-01)	00	Peninsular	1 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-01)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
02	007 Agave (MEX-02)	17	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-02)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
03	008 Agave (MEX-03)	20	Peninsular	3 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-03)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
04	009 Agave (MEX-04)	19	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-04)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
05	010 Agave (MEX-05)	19	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-05)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
06	011 Agave (MEX-06)	19	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-06)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
07	012 Agave (MEX-07)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-07)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
08	013 Agave (MEX-08)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-08)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
09	014 Agave (MEX-09)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-09)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
10	015 Agave (MEX-10)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-10)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
11	016 Agave (MEX-11)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-11)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
12	017 Agave (MEX-12)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-12)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
13	018 Agave (MEX-13)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-13)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
14	019 Agave (MEX-14)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-14)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
15	020 Agave (MEX-15)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-15)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
16	021 Agave (MEX-16)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-16)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
17	022 Agave (MEX-17)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-17)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
18	023 Agave (MEX-18)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-18)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
19	024 Agave (MEX-19)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-19)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
20	025 Agave (MEX-20)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-20)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
21	026 Agave (MEX-21)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-21)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
22	027 Agave (MEX-22)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-22)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
23	028 Agave (MEX-23)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-23)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
24	029 Agave (MEX-24)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-24)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
25	030 Agave (MEX-25)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-25)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
26	031 Agave (MEX-26)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-26)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
27	032 Agave (MEX-27)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-27)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
28	033 Agave (MEX-28)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-28)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
29	034 Agave (MEX-29)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-29)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
30	035 Agave (MEX-30)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-30)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C
31	036 Agave (MEX-31)	20	Peninsular	2 Oct 2021	United States	001 Agave (MEX-31)	01-10-2021 11:00:00	14 Oct 2021 14 Oct 2021	C

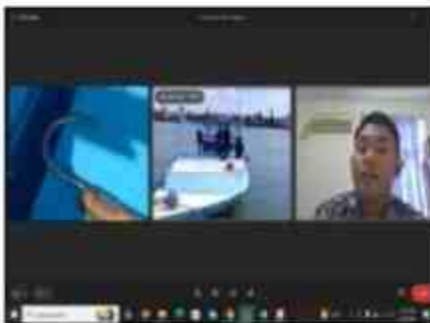
DOKUMENTASI KEGIATAN
SURVEILAN CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
DI MUTIARA BENUR JALANGNGE
3 JULI 2025



**DOKUMENTASI KEGIATAN
INSPEKSI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI ATAS KAPAL
TRIWULAN III**







DOKUMENTASI KEGIATAN
INSPEKSI CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK
TRIWULAN III



DOKUMENTASI KEGIATAN
PELATIHAN CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB) SERTA KOORDINASI PERCEPATAN SERTIFIKASI CPIB
KAPAL DENGAN DINAS PERIKANAN DAN PP UNTIA DI KABUPATEN SINJAI
TANGGAL 1 JULI 2025



KEGIATAN HELP DESK TRIWULAN III TAHUN 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
SOSIALISASI JUKNIS SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN
YANG BAIK (CPPIB)
23 JULI 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT PENYESUAIAN SERTIFIKASI PRIMER PASCA PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 2025
1 AGUSTUS 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI DENGAN BPSPL MAKASSAR
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI DENGAN DINAS KELAUTAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2025



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2025

Nama Indikator	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Tim/ja	1	Pengendalian kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan
Periode Laporan	1	Triwulan III

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70	70	70	70					70
Realisasi	115,08	83,81	198,89	83,63					
% Capaian	164,4	119,73	284,13	119,47					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu; Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen Pada triwulan II 2025 melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)
2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)

Kegiatan Sertifikasi Pasca Panen merupakan salah IKU yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua dan ke empat KKP yaitu

- Prioritas kedua KKP yaitu Penerapan sistem kuota dalam penangkapan ikan untuk menjaga kelestarian sumber daya dimana, setiap hasil tangkapan harus dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikasi SKP dan HACCP sebelum dapat diekspor ke negara tujuan, sehingga keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar global dapat meningkat.
- Prioritas keempat KKP yaitu Pengembangan budidaya perikanan di laut, pesisir, dan darat yang memperhatikan aspek keberlanjutan dimana, setiap hasil budidaya harus dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikasi SKP dan HACCP sebelum dapat diekspor ke negara tujuan, sehingga keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar global dapat meningkat.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan melalui kegiatan inspeksi/sertifikasi SKP dan HACCP diperlukan sumberdaya manusia (Inspektur Mutu) yang berkompeten- ASN harus terus belajar dan mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

CARA PENGUKURAN

- Perhitungan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

Dimana

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
 A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
 B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
 xn = Total dari unsur pembentuk (2)

Adapun target sertifikasi HACCP pada tahun 2025 sebanyak 272 sertifikat sedangkan target sertifikasi SKP pada tahun 2025 sebanyak 319 sertifikat. Pada rumus perhitungan di atas belum dijelaskan rumus perhitungan untuk memperoleh A dan B. Untuk memudahkan perhitungan maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat HACCP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah sertifikat yang expired (target)}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sertifikat SKP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100\%$$

Persyaratan dalam penerbitan SKP mengacu pada Permen KP No. 17 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan SKP, sedangkan persyaratan dalam penerbitan sertifikasi HACCP mengacu pada Permen KP No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Pencapaian IKU ini dapat dilihat pada matriks berikut :

No	Kegiatan	TW III 2025		
		Target/Rekomendasi	Realisasi	Persentase
1	Sertifikasi HACCP (A)	96	77	80,20%
2	Sertifikasi SKP (B)	116	101	87,07%

Catatan :

1. Realisasi sertifikasi HACCP mencapai 80,20%, karena terdapat beberapa UPI dengan ruang lingkup yang masih dalam proses sertifikasi SKP.
2. Realisasi sertifikasi SKP mencapai 87,07%, karena terdapat beberapa rekomendasi SKP dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan revisi.

$$\%X = \frac{80,20 + 87,07}{2}$$

$$= 83,63 \%$$

Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sebesar 83,63 %, dari target 70%. Dengan demikian capaian IKU ini adalah sebesar 119,47 %.

Adapun kegiatan pendukung pada IKU pasca panen adalah kegiatan sertifikasi Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan, sertifikat SPDI (Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan) diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan penyimpanan, pengadaan, sortasi dan grading serta yang melakukan kegiatan distribusi ikan dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai KBLI terkait, menerapkan cara distribusi ikan yang baik (CDIB) dan memenuhi persyaratan pembinaan dari Direktorat Teknis.

Sehubungan tindak lanjut dari Plan of Action (PoA) dan rekomendasi hasil audit DG SANTE – Uni Eropa (UE), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) – KKP perlu segera melakukan sertifikasi terhadap pemasok yang mensuplai bahan baku ke UPI Approval Number UE. Sertifikasi tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia bahwa pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan di tahap hulu hingga hilir, sehingga permasalahan ekspor ke UE bisa terselesaikan. UPT Balai Mutu Makassar diberikan target sebanyak 18 (delapan belas) unit pemasok yang termasuk dalam pemasok ke UPI approval number Uni Eropa.

Namun demikian pelaksanaan SPDI mengalami kendala karena dasar hukum yaitu PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berbasis Risiko belum memuat ketentuan terkait pelaksanaan SPDI. Atas dasar tersebut telah terbit Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan No 31 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point di Supplier, maka menjadi acuan dalam menerbitkan Surat Keterangan Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point di Supplier pada Triwulan III Tahun 2025.

Pada Triwulan III Tahun 2025, inspeksi penerapan HACCP di Supplier dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) unit pemasok dan telah diterbitkan sertifikat Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point di Supplier sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar sesuai ruang lingkup sertifikasi. Pada Triwulan II 2025 telah dilaksanakan inspeksi sertifikasi Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point kepada 12 (dua belas) unit pemasok dan diterbitkan sertifikat sebanyak 18 (delapan belas) lembar.

Output dari kegiatan ini berupa sertifikat SKP dan HACCP serta didukung oleh sertifikasi SPDI atau CPIB supplier. Dengan adanya sertifikasi SKP dan HACCP ini, Unit Pengolahan Ikan atau UMKM dapat melakukan kegiatan ekspor produk perikanan dengan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terjamin serta memenuhi standar negara tujuan ekspor. Hal ini didukung dengan adanya sertifikasi SPDI atau CPIB supplier yang dapat menjamin mutu dan keamanan pasokan bahan baku yang masuk ke unit pengolahan dan UMKM.

Kegiatan rapat penyatuan inspeksi perpanjangan inspeksi SKP dan HACCP telah dilakukan pada tanggal 16 September 2025, yang diselenggarakan oleh Pusat Mutu Pasca Panen.

Pada tanggal 9 September 2025 Inspektur Mutu mengikuti kegiatan konsultasi public tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis resiko sector kelautan dan perikanan bidang pengendalian pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diselenggarakan oleh sekretariat badan

Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan total sebanyak 16 orang dan didukung oleh tenaga PPNPM sebanyak 24 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengendalian dan pengawasan mutu serta pelayanan sertifikasi mutu hasil perikanan.

Anggaran awal kegiatan pasca panen pada tahun 2025 sebesar Rp. 210.000.000,- di blokir sebesar Rp. 169.228.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 40.772.000,- realisasi ditriwulan III sebesar Rp.40.760.157,- atau sebesar (99,99%). Jika dibandingkan dengan TW II tahun 2025 sebesar Rp.34.001.000,- atau sebesar (38,43%) mengalami kenaikan sebesar 65,56%.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Potensi permasalahan adalah kurang akuratnya hasil kegiatan inspeksi yang dilakukan melalui remote inspection (Virtual)

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Memperbanyak data dukung inspeksi berupa kondisi lokasi secara keseluruhan baik melalui foto maupun video sebelum kegiatan inspeksi dilaksanakan.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Hasil Tindak Lanjut - Telah dilakukan sharing session peningkatan kompetensi Inspektur Mutu tentang PP ND 28 Tahun 2025 nspektur Mutu pada tanggal 21 Agustus 2025	Penanggung Jawab Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
--	---

Makassar, 6 Oktober 2025
 Penanggungjawab Indikator Kinerja

Sri Rahayu Setyaningsih

Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi,M.Sc

DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI KONSISTENSI PENERAPAN HACCP DI UPI





DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP) DI UPI





DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI CPIB DI SUPPLIER





SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025



**Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)
Nama Tim/ja	:	Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan 3

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target		1	1	1					1
Realisasi		1	1	1					
%Capaian		100	100	100					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4"

Sm.1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm.2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Pada tahun 2025 terdapat penambahan IKU baru yaitu Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi), yang ditahun sebelum hanya berupa IKU pendukung. Balai Besar KIPM Makassar adalah salah satu unit kerja yang mendapatkan target lokasi monitoring cemaran perairan dari Kepala Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP pada, tahun 2025 lokasi monitoring 1 lokasi yaitu perairan wilayah Takalar yang terdiri dari 1 titik monitoring yaitu TPI Beba.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui apakah komoditi perikanan yang diperoleh dari perairan terpapar racun hayati laut dan logam berat serta mendapatkan data dan informasi pengujian kandungan racun hayati laut dan logam berat pada ikan sebagai bahan rekomendasi kepada Otoritas Kompeten.

Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu pada setiap semester dengan sasaran titik pendaratan ikan yang ditangkap di perairan Takalar atau di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan adanya data monitoring yang mutakhir sehingga menjadi bahan rekomendasi pengelolaan perikanan di perairan Makassar.

Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan monitoring cemaran perairan meliputi :

- Sarana dan Prasarana : Penerapan standar sanitasi dan higienis pada TPI/PPI merupakan indikator jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipasarkan sehat dan aman untuk konsumsi
- Pengambilan Contoh uji yang diambil kemudian dibawa ke Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar untuk pengujian parameter logam berat (Pb, Cd, Hg) dan pengujian mikrobiologi untuk parameter *E.Coli*, *Salmonella* dan dikirim ke Laboratorium BUKIPM untuk pengujian racun hayati laut parameter *ciguatoks* dikarenakan pengujian racun hayati belum masuk ruang lingkup di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar.

Kegiatan monitoring cemaran perairan merupakan salah IKU yang mendukung Asta Cita ke - 2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu

hulu hilir.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu perikanan melalui kegiatan monitoring cemaran perairan di perlukan sumberdaya manusia (Inspektur mutu) yang berkompeten ASN harus terus belajar dan mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

Kegiatan monitoring cemaran perairan, berdasarkan program Tahunan yang telah disusun pada tahun 2025 memiliki 1 target lokasinya yaitu TPI Beba Kab. Takalar, dan dilaksanakan dalam 2 (dua) kali setahun.

Kegiatan monitoring cemaran perairan telah dilaksanakan pada triwulan III tahun 2025 dengan titik lokasi monitoring cemaran perairan di TPI Beba Kab. Takalar.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pengambilan sampel berupa Ikan demersal (Ikan Katamba, Ikan Barakuda, Ikan Kaneka) untuk pengujian parameter pengujian logam berat (Pb, Cd, Hg), ciguatoksin dan pengujian mikrobiologi dengan parameter *Salmonella* dan *E. Coli*
- Untuk parameter pengujian logam berat yaitu (Pb, Cd, Hg) dan pengujian mikrobiologi dengan parameter *Salmonella* dan *E. Coli* dilakukan pengujian di Laboratorium penguji BPPMHKP Makassar, sedangkan untuk pengujian kimia untuk parameter ciguatoksin dilakukan sub kontrak di laboratorium penguji BUSPM Jakarta.
- Hasil pengamatan sarana dan prasarana sesuai dengan ceklist yang tersedia pada lokasi monitoring cemaran perairan tahun 2025 pada triwulan III tahun 2025 didapatkan nilai kesesuaian sebesar 62,5 % dan nilai ketidaksesuaian sebesar 37,5 %. Adapun ceklist sesuai dengan Keputusan Kepala BKIPM No. 96 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis monitoring cemaran perairan

Tabel Hasil pengujian monitoring cemaran perairan di PPI Beba

No	Lokasi	Jenis ikan	Parameter Uji			E coli	Hasil Uji	
			Logam berat (Hg, Cd, Pb)	Ciguat oxin	Salomon ella		TW II	TW III
1	PPI Beba	Ikan Barakuda	✓	On proses	✓	✓	Bawah ambang batas	
		Ikan kaneka	✓	On proses	✓	✓	Bawah ambang batas	
		Ikan Katamba	✓	On proses	✓	✓	Bawah ambang batas	

Dengan terlaksananya kegiatan tersebut di atas, maka realisasi kegiatan monitoring cemaran perairan triwulan III tahun 2025 telah tercapai 100%. Hasil pengujian parameter logam berat dan mikrobiologi, seluruh sampel dinyatakan memenuhi standar atau berada di bawah ambang batas. Adapun pengujian untuk parameter Ciguatoksin masih dalam proses pengujian di BUSPM Jakarta.

Adapun kondisi sarana dan prasarana pada lokasi target cukup memadai namun terdapat beberapa ketidaksesuaian yang perlu mendapatkan perhatian dari instansi terkait :

- Lokasi memiliki tata ruang yang memadai, namun bangunan yang ada tidak mampu menampung seluruh penjual ikan, sehingga masih ada penjual ikan melaksanakan aktifitas di luar bangunan yang disediakan
- Lantai bangunan sudah memakai keramik, namun pembersihan lantai hanya dilakukan pada saat kegiatan selesai dilakukan. Selain itu konstruksi lantai belum dirancang dengan kemiringan yang memungkinkan air dapat mengalir ke saluran pembuangan yang disediakan
- Pertemuan antara lantai dan dinding tidak melengkung sehingga sulit dibersihkan
- Saluran pembuangan tidak memiliki kemiringan yang cukup sehingga air tidak mengalir dengan lancar
- Belum dilengkapi dengan keranjang yang dapat diangkat untuk menampung limbah padat (menggunakan kantong plastik)
- Saluran air hanya dibersihkan pada saat ada kegiatan jelang saja
- Belum tersedia program pembersihan untuk langit-langit
- Jumlah, desain dan fasilitas toilet tidak memadai begitu juga dengan jumlah lokasi, desain dan fasilitas pencuci tangan juga tidak memadai.

- Toilet tidak dilengkapi dengan desinfektan (sabun)
- Belum semua penjual ikan menggunakan es dalam jumlah yang cukup untuk menjaga sistem rantai dingin sehingga masih ditemukan ikan yang suhunya rata-rata melampaui batas standar yang ditentukan yakni suhu maksimal antara 4-5 °C
- Timbangan yang digunakan tidak dilakukan kalibrasi secara periodik.
- Alat yang digunakan memindahkan ikan belum tersedia alat angkut khusus.
- Peralatan, perlengkapan dan fasilitas yang kontak langsung dengan produk belum terjamin kebersihannya sehingga masih memungkinkan terjadinya kontaminasi. Masih ada penjual ikan yang belum menggunakan meja atau tempat khusus pada saat menjual ikan, sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi pada produk yang diperjualbelikan.

SDM yang terlibat dalam kegiatan monitoring cemaran perairan tahun 2025 adalah 4 orang Inspektur Mutu .

Anggaran awal kegiatan monitoring cemaran perairan pada tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000,- setelah buka blokir anggaran bernilai Rp. 8.240.000,-

Realisasi anggaran triwulan III sebesar Rp. 470.000,- yang digunakan untuk pembelian sampel Pengawasan mutu dan biaya ATK computer supplies. Dengan demikian realisasi anggaran hingga triwulan III sebesar Rp.3.650.000,- atau sebesar 44,30%

Sebagai perbandingan anggaran triwulan II sebesar Rp.3.010.000,- atau sebesar (36,53%) yang digunakan untuk pembelian sampel, computer supplies, biaya pengujian dan biaya perjalanan dinas biasa, sehingga terjadi kenaikan realisasi dari triwulan II ke triwulan III sebesar 7,7 %.

Jika dibandingkan dengan Anggaran Kegiatan monitoring cemaran perairan tahun 2024 pagu sebesar Rp. 80.000.000,- dengan realisasi pada triwulan III sebesar Rp. 38.397.969,- atau sebesar 48 % atau lebih tinggi 3,7 % dibandingkan triwulan III tahun 2025.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Laporan hasil uji monitoring belum disampaikan di instansi terkait untuk monitoring cemaran perairan

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Menyampaikan laporan hasil uji pada instansi terkait	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Telah melakukan Refresment/Sharing session peningkatan kompetensi inspektur mutu melalui bincang inspiratif terkait Keputusan Kepala BKIPM No. 96 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis monitoring cemaran perairan pada tanggal 24 Juli 2025	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan

Makassar, 6 Oktober 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja


M.H. Zamrud, S.Pi, M.Si

DOKUMENTASI KEGIATAN
Refresment/Sharing session peningkatan kompetensi inspektur mutu
melalui bincang inspiratif pada tanggal 24 Juli 2025



**DOKUMENTASI KEGIATAN SURVEILAN MONITORING CEMARAN PERAIRAN
DI PPI BEBA, KECAMATAN GALESONG UTARA, KABUPATEN TAKALAR,
PROPINSI SULAWESI SELATAN**



DOKUMENTASI KEGIATAN PENGUJIAN LABORATORIUM







PERHATIAN KELUARGA DAN PERHIMPUNAN
BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENYALAMAN ALFALFA
POINTE KILAU, NUSANTARA PERHIMPUNAN
BUMI BISTAR KAMPUNG MUDA PERHIMPUNAN MUDA
ILAU KAMPUNG MUDA, PERHIMPUNAN KAMPUNG
 (DIDIRIKAN PADA 10 MEI 2012)
 (DIDIRIKAN PADA 10 MEI 2012)
 (DIDIRIKAN PADA 10 MEI 2012)

HASIL UJIAN
TEST ORAL

Disusun oleh : **Disusun oleh : Disusun oleh : Disusun oleh : Disusun oleh :**

Daftar Isi

- 1. **Daftar Isi**
- 2. **Daftar Isi**
- 3. **Daftar Isi**
- 4. **Daftar Isi**
- 5. **Daftar Isi**
- 6. **Daftar Isi**
- 7. **Daftar Isi**
- 8. **Daftar Isi**
- 9. **Daftar Isi**
- 10. **Daftar Isi**
- 11. **Daftar Isi**
- 12. **Daftar Isi**
- 13. **Daftar Isi**
- 14. **Daftar Isi**
- 15. **Daftar Isi**
- 16. **Daftar Isi**
- 17. **Daftar Isi**
- 18. **Daftar Isi**
- 19. **Daftar Isi**
- 20. **Daftar Isi**
- 21. **Daftar Isi**
- 22. **Daftar Isi**
- 23. **Daftar Isi**
- 24. **Daftar Isi**
- 25. **Daftar Isi**
- 26. **Daftar Isi**
- 27. **Daftar Isi**
- 28. **Daftar Isi**
- 29. **Daftar Isi**
- 30. **Daftar Isi**
- 31. **Daftar Isi**
- 32. **Daftar Isi**
- 33. **Daftar Isi**
- 34. **Daftar Isi**
- 35. **Daftar Isi**
- 36. **Daftar Isi**
- 37. **Daftar Isi**
- 38. **Daftar Isi**
- 39. **Daftar Isi**
- 40. **Daftar Isi**
- 41. **Daftar Isi**
- 42. **Daftar Isi**
- 43. **Daftar Isi**
- 44. **Daftar Isi**
- 45. **Daftar Isi**
- 46. **Daftar Isi**
- 47. **Daftar Isi**
- 48. **Daftar Isi**
- 49. **Daftar Isi**
- 50. **Daftar Isi**
- 51. **Daftar Isi**
- 52. **Daftar Isi**
- 53. **Daftar Isi**
- 54. **Daftar Isi**
- 55. **Daftar Isi**
- 56. **Daftar Isi**
- 57. **Daftar Isi**
- 58. **Daftar Isi**
- 59. **Daftar Isi**
- 60. **Daftar Isi**
- 61. **Daftar Isi**
- 62. **Daftar Isi**
- 63. **Daftar Isi**
- 64. **Daftar Isi**
- 65. **Daftar Isi**
- 66. **Daftar Isi**
- 67. **Daftar Isi**
- 68. **Daftar Isi**
- 69. **Daftar Isi**
- 70. **Daftar Isi**
- 71. **Daftar Isi**
- 72. **Daftar Isi**
- 73. **Daftar Isi**
- 74. **Daftar Isi**
- 75. **Daftar Isi**
- 76. **Daftar Isi**
- 77. **Daftar Isi**
- 78. **Daftar Isi**
- 79. **Daftar Isi**
- 80. **Daftar Isi**
- 81. **Daftar Isi**
- 82. **Daftar Isi**
- 83. **Daftar Isi**
- 84. **Daftar Isi**
- 85. **Daftar Isi**
- 86. **Daftar Isi**
- 87. **Daftar Isi**
- 88. **Daftar Isi**
- 89. **Daftar Isi**
- 90. **Daftar Isi**
- 91. **Daftar Isi**
- 92. **Daftar Isi**
- 93. **Daftar Isi**
- 94. **Daftar Isi**
- 95. **Daftar Isi**
- 96. **Daftar Isi**
- 97. **Daftar Isi**
- 98. **Daftar Isi**
- 99. **Daftar Isi**
- 100. **Daftar Isi**

Daftar Isi

- 1. **Daftar Isi**
- 2. **Daftar Isi**
- 3. **Daftar Isi**
- 4. **Daftar Isi**
- 5. **Daftar Isi**
- 6. **Daftar Isi**
- 7. **Daftar Isi**
- 8. **Daftar Isi**
- 9. **Daftar Isi**
- 10. **Daftar Isi**
- 11. **Daftar Isi**
- 12. **Daftar Isi**
- 13. **Daftar Isi**
- 14. **Daftar Isi**
- 15. **Daftar Isi**
- 16. **Daftar Isi**
- 17. **Daftar Isi**
- 18. **Daftar Isi**
- 19. **Daftar Isi**
- 20. **Daftar Isi**
- 21. **Daftar Isi**
- 22. **Daftar Isi**
- 23. **Daftar Isi**
- 24. **Daftar Isi**
- 25. **Daftar Isi**
- 26. **Daftar Isi**
- 27. **Daftar Isi**
- 28. **Daftar Isi**
- 29. **Daftar Isi**
- 30. **Daftar Isi**
- 31. **Daftar Isi**
- 32. **Daftar Isi**
- 33. **Daftar Isi**
- 34. **Daftar Isi**
- 35. **Daftar Isi**
- 36. **Daftar Isi**
- 37. **Daftar Isi**
- 38. **Daftar Isi**
- 39. **Daftar Isi**
- 40. **Daftar Isi**
- 41. **Daftar Isi**
- 42. **Daftar Isi**
- 43. **Daftar Isi**
- 44. **Daftar Isi**
- 45. **Daftar Isi**
- 46. **Daftar Isi**
- 47. **Daftar Isi**
- 48. **Daftar Isi**
- 49. **Daftar Isi**
- 50. **Daftar Isi**
- 51. **Daftar Isi**
- 52. **Daftar Isi**
- 53. **Daftar Isi**
- 54. **Daftar Isi**
- 55. **Daftar Isi**
- 56. **Daftar Isi**
- 57. **Daftar Isi**
- 58. **Daftar Isi**
- 59. **Daftar Isi**
- 60. **Daftar Isi**
- 61. **Daftar Isi**
- 62. **Daftar Isi**
- 63. **Daftar Isi**
- 64. **Daftar Isi**
- 65. **Daftar Isi**
- 66. **Daftar Isi**
- 67. **Daftar Isi**
- 68. **Daftar Isi**
- 69. **Daftar Isi**
- 70. **Daftar Isi**
- 71. **Daftar Isi**
- 72. **Daftar Isi**
- 73. **Daftar Isi**
- 74. **Daftar Isi**
- 75. **Daftar Isi**
- 76. **Daftar Isi**
- 77. **Daftar Isi**
- 78. **Daftar Isi**
- 79. **Daftar Isi**
- 80. **Daftar Isi**
- 81. **Daftar Isi**
- 82. **Daftar Isi**
- 83. **Daftar Isi**
- 84. **Daftar Isi**
- 85. **Daftar Isi**
- 86. **Daftar Isi**
- 87. **Daftar Isi**
- 88. **Daftar Isi**
- 89. **Daftar Isi**
- 90. **Daftar Isi**
- 91. **Daftar Isi**
- 92. **Daftar Isi**
- 93. **Daftar Isi**
- 94. **Daftar Isi**
- 95. **Daftar Isi**
- 96. **Daftar Isi**
- 97. **Daftar Isi**
- 98. **Daftar Isi**
- 99. **Daftar Isi**
- 100. **Daftar Isi**

Daftar Isi

- 1. **Daftar Isi**
- 2. **Daftar Isi**
- 3. **Daftar Isi**
- 4. **Daftar Isi**
- 5. **Daftar Isi**
- 6. **Daftar Isi**
- 7. **Daftar Isi**
- 8. **Daftar Isi**
- 9. **Daftar Isi**
- 10. **Daftar Isi**
- 11. **Daftar Isi**
- 12. **Daftar Isi**
- 13. **Daftar Isi**
- 14. **Daftar Isi**</

[illegible][illegible]

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025

Nama Indikator (4)	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)
Nama Tim/ja	:	Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan III

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	1	0	1	1	0	1	1	100	1
Realisasi	1	0	1	1					
%Capaian	100	0	100	100					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik merupakan salah satu IKU yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas KKP yaitu:

- Program Prioritas Kedua KKP yaitu penerapan sistem kuota dalam penangkapan dan memastikan keberlanjutan sumber daya ikan, dimana pada kegiatan pengawasan mutu BPPMHKP Makassar memastikan produk hasil perikanan tangkap yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Program Prioritas Ketiga KKP yaitu pengembangan budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, baik untuk komoditas ekspor maupun konsumsi lokal, dimana pada kegiatan pengawasan mutu BPPMHKP Makassar memastikan produk hasil perikanan hasil budidaya yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain dan instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir. Dalam hal ini BPPMHKP memiliki peran penting antara lain:

1. Pengawasan Mutu: BPPMHKP melakukan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.
2. Pengendalian Mutu: BPPMHKP melakukan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kualitas dan keamanan pangan.

Dengan demikian BPPMHKP juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu perikanan, diperlukan sumberdaya manusia (Inspektur Mutu) yang berkompeten: ASN harus terus belajar mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

Pada tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebanyak 1 lokasi yaitu kota Makassar dengan jumlah 1 lokus. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester. Adapun lokasi pengawasan sentra penyedia pangan sehat yaitu pasar tradisional.

Pada triwulan III tahun 2025 target pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yaitu di Kota Makassar dengan lokus pengawasan yaitu Pasar Tradisional Daya.

Adapun agenda kegiatan yang dilakukan pada saat pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi) Triwulan III pada tanggal 24 September 2025 yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan ke kepala UPTD Pasar Tradisional Daya.
2. Melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pasar tradisional serta mengisi checklist Pengamatan Kondisi sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene.
3. Pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium.

Rangkaian kegiatan terdapat pengambilan sampel yang dilakukan di Pasar Tradisional Daya, terdapat 5 (lima) jenis sampel yang diambil yaitu ikan nila segar, ikan kerapu segar, ikan cakalang segar, cumi-cumi segar dan udang vannamei segar. Sampel yang diambil masih dalam proses pengujian di laboratorium pengujian Balai Besar KIPM Makassar dengan target pengujian Organoleptik, ALT, *Echerichia coli*, *Salmonella spp*, formalin dan histamin.

Inspektur mutu juga melakukan pengamatan kondisi sarana prasarana dan sanitasi hygiene pada pasar tradisional Daya. Setelah dilakukan pengamatan pasar tradisional Daya memperoleh nilai dengan kriteria **BAIK** dimana tersedia jalan dan fasilitas untuk menunjang kelancaran arus distribusi ikan, lokasi berada ditempat bebas pencemaran, bangunan terawat, dibersihkan saluran pembuangan air memiliki kemiringan yang cukup, fasilitas sanitasi tersedia, pasokan air cukup, penerangan yang cukup baik alami maupun menggunakan lampu namun masih perlu perhatian terkait cara penanganan ikan yang baik, peralatan yang digunakan dan tingkah laku karyawan yang menangani produk sehingga mutu produk yang dipasarkan tetap terjaga.

Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik tahun 2025 merupakan salah satu indikator kinerja yang tidak mendapatkan alokasi anggaran karena adanya kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran. Namun kebijakan pemerintah tersebut tidak menjadi penghalang pada kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik.

Dalam rangka sampling kajian kandungan formaldehida alami pada produk perikanan, Badan Mutu KKP Makassar berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) melakukan pengambilan sampel Pangan Segar Asal Ikan (PSAI) pada TPI Paotere Makassar pada tanggal 17 September 2025. Badan Mutu KKP Makassar sebagai otoritas kompeten pengendalian mutu hasil perikanan melakukan pendampingan dalam pengambilan sampel tersebut bersama Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Sampel yang diambil berupa ikan tongkol, baby tuna, cakalang, tenggiri, kerapu dan ikan selar. Sampel tersebut kemudian akan diuji di Laboratorium Penelitian Institut Pertanian Bogor untuk melihat adanya potensi pembentukan formalin yang secara alami timbul pada produk perikanan.

Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 60.000.000,- yang terealisasi pada TW III tahun 2024 sebesar Rp. 45.382.086,- atau 75,64%.

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut selama Triwulan III tahun 2025 adalah 11 orang yang terdiri atas Inspektur Mutu, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar, Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) dan BPPSDMKP Maros.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)	
Laporan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik TW III belum disampaikan ke Instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar dan Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI), karena masih menunggu hasil pengujian.	
Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Menyampaikan Laporan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di Triwulan IV kepada instansi terkait.	Katimja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Telah dilakukan sharing session keputusan Kepala BPPMHKP No. 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu di Sentra Penyedia Pangan Sehat pada tanggal 24 Juli 2025	Katimja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Makassar, 6 Oktober 2025
 Penanggungjawab Indikator Kinerja



Mohammad Zamrud

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik
di Pasar Tradisional Daya Kota Makassar Triwulan III Tahun 2025
24 September 2025



Dokumentasi kegiatan sharing session keputusan Kepala BPPMHKP No. 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu di Sentra Penyedia Pangan Sehat 24 Juli 2025



Melakukan Pendampingan pada Kegiatan Sampling untuk Kajian Formaldehida Alami pada PSAJ di TPI Paotere Makassar Sulawesi Selatan pada tanggal 17 September 2025





Rangkaian Kegiatan Pengujian di Laboratorium
Balai Besar KIPM Makassar



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Tim/ja	:	Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan III Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	99	99	99	99					99
Realisasi	100	100	100	100					
% Capaian	101	101	101	101					

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Tw 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Sistem Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tumbuh seiring dengan perkembangan tuntutan akan jaminan mutu dan keamanan pangan di tataran internasional yang semakin ketat, dan tidak hanya fokus pada mutu dan keamanan dari produk akhir. Sistem jaminan mutu dan keamanan terhadap proses merupakan tuntutan dan penerimaan masyarakat dunia (internasional) akan keberterimaan pangan, termasuk hasil perikanan. Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh internasional, harus dipenuhi oleh seluruh negara pengekspor, yang dinyatakan pada sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang menyertai setiap produk yang dipasarkan, baik untuk pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu, maka penerbitan SMKHP didasarkan pada hasil pengawasan mutu terhadap efektifitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Usaha Pembenihan, Pembesaran dan Unit Pengolahan Ikan serta hasil pengujian contoh. Peningkatan ekspor perikanan ke negara tujuan merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pada Asta Cita ke 5 terdapat tiga kegiatan utama yaitu peningkatan ekspor produk perikanan tangkap, pembangunan industri hilir dan industri penangkapan ikan serta penjaminan mutu dan keamanan pangan akuatik komoditas perikanan budi daya. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di

laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir.

Balai Besar KIPM Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar hasil pengendalian tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan produk perikanan yang akan di lalulintaskan ke negara tujuan.

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rasio kegiatan pengiriman ikan dan hasil perikanan ke luar wilayah Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak ada penolakan oleh negara tujuan ekspor. Hal ini dibuktikan diterimanya SMKHP di negara tujuan ekspor dan tidak ada notifikasi penolakan dari negara tujuan.

Perhitungan IKU ini berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$X = \frac{A - B}{A}$$

X : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A : SMKHP yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B : Jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan

IKU ini menggunakan formulasi diatas sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

X : $\frac{\text{Jumlah SMKHP ekspor yang memenuhi syarat mutu} - \text{penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah SMKHP mutu ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$

$$\frac{(3.358 - 0)}{3.358} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU ini di triwulan III tahun 2025 adalah 100% karena tidak ada penolakan dari negara tujuan. Jika dilihat dari aspek keberterimaan di negara tujuan didapatkan nilai yang sama antara Triwulan III tahun 2025 dan triwulan III tahun 2024 yaitu 100 %.

Pada triwulan III tahun 2025 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 49.982,96 ton senilai Rp. 1,752 T dengan jumlah sertifikat ekspor (SMKHP) yang diterbitkan sebanyak 3.358 sertifikat. Sebagai perbandingan, pada triwulan II tahun 2025 tercatat

volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 65.462,64 ton senilai Rp. 4.004 T dengan jumlah SMKHP yang diterbitkan sebanyak 3.125 sertifikat. Berdasarkan data tersebut pada triwulan III terjadi penurunan volume ekspor sebesar 25 % dan nilai ekspor sebesar 56% dibandingkan triwulan II, namun terjadi kenaikan persentase jumlah SMKHP yang gterbit sebesar 7,5 %.

Sebagai perbandingan, volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan pada triwulan III tahun 2024 sebanyak 54.84 ton senilai Rp. 3,72 T dengan jumlah SMKHP yang diterbitkan sebanyak 2.617 sertifikat. Jika dibandingkan triwulan III tahun 2025 dan triwulan III tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah SMKHP sebesar 28,3 % di triwulan III tahun 2025, namun dari jumlah volume ekspor terjadi penurunan sebesar 8,86 % dan nilai ekspor sebesar 52,9 %.

Data pada triwulan III Tahun 2025 menunjukkan tidak terdapat kasus penolakan produk perikanan yang dikirim ke negara tujuan. Pada triwulan III tahun 2025 memiliki kondisi yang sama dengan triwulan III tahun 2024 yaitu tidak adanya kasus penolakan produk perikanan.

Kegiatan sertifikasi ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu sebanyak 17 orang serta didukung oleh tenaga PPNPN sebanyak 12 orang dan PJLP sebanyak 12 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengawasan, dan pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Sejalan dengan peningkatan pelayanan sertifikasi ekspor produk perikanan, terdapat beberapa kegiatan peningkatan kompetensi maupun kunjungan pihak eksternal untuk mendukung IKU ini telah diikuti oleh petugas pelayanan maupun inspektur mutu antara lain sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Waktu Kegiatan
1.	Bincang Inspiratif Pelayanan Publik Dengan Tema "Menuju Pelayanan Publik Yang professional & Ungggul (Profesional & Excellent Service)" bersinergi dengan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Makassar	BPPMHKP Makassar	14 Juli 2025
2.	Briefing Siang Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	16 Juli 2025
3.	Sharing session Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 44 tahun 2024 dan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 35 tahun 2025	BPPMHKP Makassar	24 Juli 2025
4.	Kunjungan Kerja Tim Komisi IV DPR RI Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Pengendalian Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	BPPMHKP Makassar	11 Agustus 2025
5.	Webinar Budaya Kerja Work Life Balance Untuk ASN Menjaga Kesehatan Mental Di Tempat Kerja	Biro SDMA Organisasi Sekretariat Jenderal KKP	9 September 2025
6.	Bincang Inspiratif Pelayanan Pelayanan Publik Dengan Tema "Menuju Pelayanan Publik Yang professional & Ungggul (Profesional & Excellent Service)" bersinergi dengan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Makassar	BPPMHKP Makassar	11 September 2025
7.	Bimbingan Teknis Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan Tahun 2025	Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal KKP	17 September 2025
8.	Sharing Session Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan	BPPMHKP Makassar	25 September 2025
9.	Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan kenenterian Kelautan dan Perikanan	BPPMHKP Makassar	30 September 2025

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu :

1. Monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra.
2. Monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP
3. Investigasi kasus penolakan ekspor di negara tujuan.

l. Monitoring dan Evaluasi Nomor Registrasi Negara Mitra

Pada triwulan III tahun 2025 telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra sebanyak 1 (satu) UPI. Adapun UPI yang telah di monitoring adalah :

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan	Inspektur Mutu
1.	CV. Gimae Seaweed & Spice	02 Juli 2025	Mohammad Zamrud Suprianto

Sasaran dari kegiatan ini adalah UPI yang sedang bermohon penerbitan nomor registrasi untuk negara tujuan China serta UPI yang belum memanfaatkan secara maksimal nomor registrasi ke negara tujuan. Berdasarkan hasil monev nomor registrasi negara mitra pada CV. Gimae Seaweed & Spice diperoleh hasil bahwa UPI tersebut telah diverifikasi GACC pada aplikasi CIFER untuk permohonan registrasi ke negara mitra China dan belum diapprove karena masih terdapat koreksi dan perlu perbaikan pada beberapa item seperti denah/layout pabrik, fasilitas sanitasi dan cuci tangan karyawan, bahan pengemas dan fasilitas pencucian peralatan. Adapun tindakan perbaikan telah disubmit ke aplikasi CIFER untuk diverifikasi kembali.

II. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan SMKHP

Pada triwulan III tahun 2025 BPPMHKP Makassar telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada 9 (sembilan) UPI yang melaksanakan ekspor ke negara tujuan. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut ini.

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan	Inspektur Mutu
1.	PT. Mega Citra Karya	02 Juli 2025	Habrin Yake Ardiana
2.	CV. Lontara Jaya Sakti	02 Juli 2025	Andi Rahmawati Idawati Barung
3.	PT. Celebes Berkah Niaga	04 Juli 2025	Muzakir Suprianto
4.	CV. Adi Tirta	5 Agustus 2025	Muhammad Irfan Rais Idawati Barung
5.	PT. Simpul Agro Globalindo	6 Agustus 2025	Habrin Yake Ardiana
6.	PT. Mina Timur Indonesia	26 Agustus 2025	Sri Rahayu Setyaningsi Wara Zakaria Sapan
7.	PT. Asnur Anton Jaya	29 Agustus 2025	Mohammad Zamrud Moh. Fahrul
8.	PT. Sutracco Nusantara Megah	4 September 2025	Muhammad Irfan Rais Anugrah Ekayani ALP
9.	PT. Parlevliet Paraba Seafood	4 September 2025	Patmawati Moh. Fahrul

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada UPI dilakukan berdasarkan profiling Unit Pengolahan Ikan dalam kegiatan pelayanan sertifikasi ekspor ke negara tujuan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan monev adalah memastikan bahwa kegiatan penilaian kesesuaian penerbitan SMKHP pada pelaku usaha berjalan sesuai ketentuan regulasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai serta memudahkan BPPMHKP Makassar dalam melakukan penilaian ke pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya pelaku usaha ekspor. Hasil dari kegiatan monev ini menjadi dasar dalam pemberian skoring tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penerbitan SMKHP. Kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP dilaksanakan tanpa menggunakan APBN karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dan belum adanya buka blokir sehingga dilaksanakan secara mandiri oleh inspektur mutu.

III. Investigasi Kasus Penolakan Ekspor Di Negara Tujuan

Pada triwulan III tahun 2025 tidak ada notifikasi penolakan ekspor dari negara tujuan di UPT BPPMHKP Makassar, namun berdasarkan data hasil uji laboratorium terdapat beberapa produk perikanan yang menyimpang sehingga dilakukan investigasi secara virtual. Adapun UPI yang di investigasi adalah sebagai berikut:

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan Investigasi	Produk	Penyebab	Inspektur Mutu
1.	CV. Mitra Alam	29 Juli 2025	Air dan Es	Zat Padat Terlarut (TDS)	Andi Rahmانيar DJ Ardiana
2.	PT. Blue Ocean Resource	29 Juli 2025	Air	Total Zat padat terlarut dan pH pada air	Habrin Yake Muzakir
3.	PT. Nuansa Cipta Magello	04 September 2025	Pasteurized Crabmeat	Angka Lempeng Total (ALT)	Habrin Yake Muzakir

Kegiatan yang mendukung IKU ini beserta pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Lock Pagu	Realisasi Anggaran TW II 2025	Persentase Realisasi
1.	7010.ABR.001 Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0
2.	3989.QJC.002 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	0	0
3.	3989.BIA.001 Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0

Alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini pada tahun 2025 sebesar Rp. 45.000.000. Adapun anggaran untuk indikator kinerja ini masih belum terealisasi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 60.000.000 dimana terjadi penurunan pagu anggaran sebesar 25% dan realisasi pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 15.793.000.

Pada triwulan III tahun 2025 belum ada anggaran yang terealisasi disebabkan belum adanya kebijakan buka blokir. Diharapkan dengan adanya kebijakan buka blokir kegiatan yang mendukung IKU ini dapat terealisasi di triwulan selanjutnya.

Pada triwulan III tahun 2024 kegiatan pendukung yaitu monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi negara mitra dialihkan untuk kegiatan pengendalian mutu lainnya yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi UPI sebanyak 5.501.000 dengan prosentase realisasi 73,35 %. Untuk kondisi triwulan III tahun 2025 target terealisasi 1 (satu) lokasi namun untuk anggaran masih status terblokir.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Belum optimalnya kegiatan monev noreg negara mitra di TW III dimana baru terlaksana 1 kali.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Optimalisasi pelaksanaan kegiatan monev noreg negara mitra.	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan

Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
1) Telah dilaksanakan briefing pagi petugas pelayanan dan inspektur mutu yang salah satu poinnya adalah mengevaluasi anomali data pada tanggal 16 Juli 2025. 2) Telah dilaksanakan sharing session sosialisasi monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra pada tanggal 20 Agustus 2025.	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan

Makassar, 6 Oktober 2025

Penanggungjawab Indikator Kinerja



Mohammad Zamrud

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Briefing Siang Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu Pada Tanggal 16 Juli 2025



2. Sharing session petunjuk teknis pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka penerbitan SMKHP tanggal 24 Juli 2025



3. Monitoring dan Evaluasi Nomor Registrasi Negara Mitra





4. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan SMKHP di Unit Pengolahan Ikan





5. Investigasi Penolakan Ekspor di Negara Tujuan





Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
Nama Tim/ja	:	Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan III Tahun 2025
Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	75	75	75	75	75	75	75		75
Realisasi	91,23	91,23	91,23	91,23					
%Capaian	121,64	121,64	121,64	121,64					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4**

Sm.1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm.2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.
- ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.
- Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai meliputi:
 1. Ruang Lingkup;
 2. Acuan Normatif;
 3. Persyaratan Umum;
 4. Persyaratan Struktural;
 5. Persyaratan Sumber Daya;
 6. Persyaratan Proses;
 7. Persyaratan Sistem Manajemen
- Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

dimana :

$\bar{X}$ = Rata-rata

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke-1, 2, 3, ..., n

n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan
- Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian adalah kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar. Selama Triwulan III Tahun 2025, terdapat 3.167 kali pengujian laboratorium yang terdiri dari :

1. Pengujian Organoleptik sebanyak 450 kali 2. Pengujian Mikrobiologi sebanyak 1.706 kali 3. Pengujian Kimia sebanyak 833 kali 4. Pengujian Air dan Es sebanyak 178 kali • Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 18 orang mulai dari Manager Puncak hingga analis dan staf laboratorium yang kompeten dalam melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium. • Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini mendukung Asta Cita ke-2 dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. • IKU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan dengan memberikan pelayanan laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan. • Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan III tahun 2025 mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 36.537.000,- di Triwulan I Tahun 2025 menjadi Rp. 62.446.000,- di Triwulan II Tahun 2025. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2025 menurun sebesar 10,8% dari sebelumnya sebesar Rp. 70.000.000,- di tahun 2024. • Pada Triwulan III Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu telah direalisasikan sebesar Rp. 16.150.000,- atau sebesar 25,86 % dari anggaran tahun 2025. Sisa anggaran sebesar Rp. 46.296.000,- rencananya akan direalisasikan pada Triwulan IV sesuai dengan jadwal penerapan sistem manajemen mutu laboratorium untuk kegiatan kalibrasi alat, uji profisiensi, dan uji banding. • Kegiatan Verifikasi Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji ini dilaksanakan hanya satu kali dalam satu tahun. Untuk itu hasil penilaian verifikasi pada Triwulan III Tahun 2025 ini masih mengikut hasil verifikasi pada Triwulan I. Pada Triwulan I Tahun 2025, telah dilakukan penilaian Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium pada tanggal 20 Maret 2025 oleh Pusat Manajemen Mutu. Dari kegiatan verifikasi tersebut, berdasarkan Kuisioner Verifikasi Penerapan SMM SNI ISO/IEC 17025:2017 maka Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai sebesar 91,23 dari target sebesar 75. Sehingga output kegiatan penerapan sistem manajemen mutu telah terealisasi sebesar 121,64 %. • Pada Triwulan III Tahun 2025 ini telah dilakukan kegiatan Sharing Session Refreshment Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17020:2012 yang dibawakan oleh Muhammad Irfan Rais selaku Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji. Kegiatan ini diikuti oleh 35 orang pegawai Balai Besar KIPM Makassar baik dari bidang Tata Usaha, Laboratorium dan Inspektur Mutu. Kegiatan refreshment ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pegawai mengenai penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi. • Pada tanggal 24 September 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti Q&A Pembentukan dan Pemeliharaan Panelis Organoleptik yang dilaksanakan oleh BUSPM secara daring dengan narasumber bapak Rino Masril sebagai analis organoleptik di BUSPM. Di dalam Q&A ini dibahas mengenai hal-hal yang sering ditanyakan pada saat laboratorium melaksanakan kegiatan pembentukan dan pemeliharaan panelis organoleptik.
--

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?) Potensi masalah dalam penerapan SNI ISO/IEC 17025:2025 adalah kemampuan analis yang tidak mengikuti perkembangan kemajuan teknologi pengujian laboratorium.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Peningkatan kemampuan dan kompetensi analis laboratorium dalam bentuk sharing session ataupun mengikuti pelatihan internal atau eksternal dalam melakukan pengujian laboratorium sesuai standar internasional SNI ISO/IEC 17025:2017	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Telah dilakukan penyelesaian tindakan perbaikan Surveilans ke-II SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Triwulan III Tahun 2025.	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji

Makassar, 6 Oktober 2025
 Penanggungjawab Indikator Kinerja


 Muhammad Irfan Rais

54

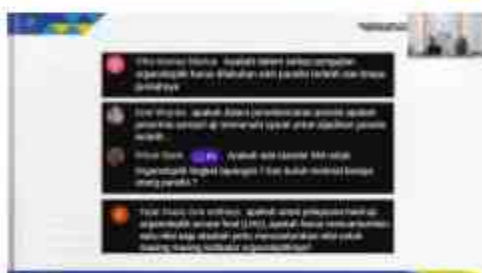
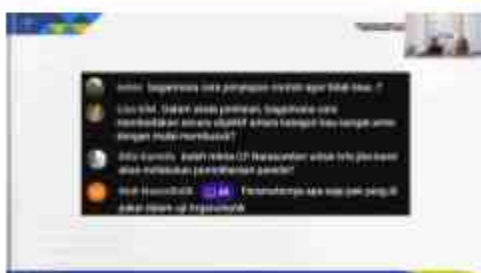
LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN PENGUJIAN LABORATORIUM TRIWULAN III TAHUN 2025



**LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN SHARING SESSION REFRESHMENT SISTEM MANAJEMEN MUTU
SNI ISO/IEC 17025:2017 DAN SNI ISO/IEC 17020:2012
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2025**



LAMPIRAN. Q&A PEMBENTUKAN DAN PEMELIHARAAN PANELIS ORGANOLEPTIK
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
Nama Timja	:	Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan III Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	75	75	75	75	75	75	75		75
Realisasi	93,33	89,93	91,58	90,96					
%Capaian	124,29	119,91	122,11	121,28					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga Inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (ISO 17020).
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:
 1. Persyaratan Umum
 2. Persyaratan Struktural
 3. Persyaratan Sumberdaya
 4. Persyaratan Proses
 5. Persyaratan Sistem Manajemen
- Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah kegiatan surveilan penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Selama Triwulan III Tahun 2025, terdapat 76 kali pelaksanaan surveilan penerapan HACCP.
- Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

dimana :

 - $\bar{x}$ = Rata rata
 - $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke- 1, 2, 3, ... n
 - n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan
- Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 21 orang mulai dari Manager Puncak hingga inspektur mutu hasil perikanan yang telah memiliki nomor registrasi inspektur mutu dan/atau telah mengikuti pelatihan HACCP dasar.
- Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi ini mendukung Asta Cita ke-2 dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat

dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

- IKU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Kompeten dimana ASN dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas sesuai dengan tantangan yang ada. Dengan adanya perubahan tugas dan fungsi dalam penjaminan mutu hulu hingga hilir, ASN inspektur mutu dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan mengupdate regulasi-regulasi terbaru.
- Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar Triwulan III tahun 2025 yang mengalami perubahan menjadi Rp. 27.304.000,- dari sebelumnya sebesar Rp. 3.500.000,- di Triwulan I Tahun 2025. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2025 meningkat sebesar 36,52% bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Hingga Triwulan III Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu telah direalisasikan sebesar Rp. 2.804.000,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 24.500.000,- rencananya akan direalisasikan pada Triwulan IV sesuai dengan jadwal re-akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012.
- Pada Triwulan III Tahun 2025, telah dilakukan penilaian Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi pada tanggal 26 Agustus 2025 oleh Pusat Manajemen Mutu. Dari kegiatan verifikasi tersebut, berdasarkan Laporan Ketidaksesuaian Verifikasi Penerapan SMM SNI ISO/IEC 17020:2012 maka Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai sebesar 90,96 dari target sebesar 75. Sehingga output kegiatan penerapan sistem manajemen mutu telah terealisasi sebesar 121,28 %
- Pada tanggal 10 Juli 2025 Inspektur mutu Balai Besar KIPM Makassar telah mengikuti Sharing Knowledge Penjaminan Mutu Komoditi Rumput Laut secara daring oleh Pusat Manajemen Mutu Pasca Panen. Sharing knowledge ini dilaksanakan karena besarnya potensi ekspor rumput laut di Indonesia, namun penjaminan mutunya agak berbeda dengan komoditi perikanan dalam bentuk segar maupun beku sehingga perlu pemahaman yang lebih mendalam mengenai bisnis proses penjaminan mutu untuk rumput laut.
- Pada tanggal 6 Agustus 2025 Inspektur mutu Balai Besar KIPM Makassar juga telah mengikuti Pembahasan Daftar Periksa Penerapan Program Persyaratan Dasar (PPD) komoditi rumput laut kering dan rumput laut koloid secara daring oleh Pusat Manajemen Mutu Pasca Panen dan UNIDO. Pada kegiatan ini dibahas daftar periksa untuk program persyaratan dasar untuk komoditi Rumpu Laut dan Koloid sehingga dapat dibedakan dengan produk beku dan segar yang alur prosesnya memang berbeda.
- Pada Triwulan III Tahun 2025 ini telah dilakukan kegiatan Sharing Session Refreshment Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17020:2012 yang dibawakan oleh Muhammad Irfan Rais selaku Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji. Kegiatan ini diikuti oleh 35 orang pegawai Balai Besar KIPM Makassar baik dari bidang Tata Usaha, Laboratorium dan Inspektur Mutu. Kegiatan refreshment ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pegawai mengenai penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi.

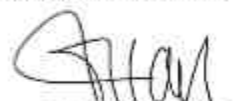
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Sertifikat Akreditasi Lembaga Inspeksi Balai Besar KIPM Makassar dengan nomor akreditasi LI-089-IDN akan segera berakhir. Untuk itu perlu percepatan akreditasi ulang terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17020:2012

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Melakukan re-akreditasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17020:2012	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Berdasarkan rekomendasi tindak lanjut triwulan sebelumnya, telah dilaksanakan pemeliharaan kompetensi inspektur mutu melalui Sharing Session Refreshment Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 17020 dan 17025 pada tanggal 9 September 2025	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji

Makassar, 6 Oktober 2025
 Penanggungjawab Indikator Kinerja


 Muhammad Irfan Rais

**LAMPIRAN. LAPORAN KETIDAKSESUAIAN VERIFIKASI PENERAPAN SMM SNI ISO/IEC 17020:2012
TANGGAL 26 AGUSTUS 2025**

	PROSEDUR		STATUS KOMPETENSI
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN		
PT. SMM SNI ISO/IEC 17020:2012	Tanggal: 1 Agustus 2025	Revisi: 1 (Revisi: 1)	Hal: 1 dari 2

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN			
Nama Verifikasi: Rata Rata 3000 Unit/Year		Tanggal: 26 Agustus 2025	
Jenis: 20. Sistem 20. 21. Sistem			
Pemeriksaan: Di Rata Rata 3000 Unit/Year, 3.000, 3.000			
Nama Verifikasi: PT. SMM SNI ISO/IEC 17020:2012			

No	Detail Ketidaksesuaian	Referensi	Status
1	Salah satu dari 3000 Unit/Year yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan SMM SNI ISO/IEC 17020:2012 dengan 3000 Unit/Year yang diperiksa.	3000 Unit/Year	Revisi 1 (Revisi: 1)
2	Salah satu dari 3000 Unit/Year yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan SMM SNI ISO/IEC 17020:2012 dengan 3000 Unit/Year yang diperiksa.	3000 Unit/Year	Revisi 1 (Revisi: 1)
3	Salah satu dari 3000 Unit/Year yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan SMM SNI ISO/IEC 17020:2012 dengan 3000 Unit/Year yang diperiksa.	3000 Unit/Year	Revisi 1 (Revisi: 1)
4	Salah satu dari 3000 Unit/Year yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan SMM SNI ISO/IEC 17020:2012 dengan 3000 Unit/Year yang diperiksa.	3000 Unit/Year	Revisi 1 (Revisi: 1)

Revisi 1 (Revisi: 1) dan 2 (Revisi: 2) dan 3 (Revisi: 3) dan 4 (Revisi: 4)

Revisi 1 (Revisi: 1) dan 2 (Revisi: 2) dan 3 (Revisi: 3) dan 4 (Revisi: 4)

	PROSEDUR		STATUS KOMPETENSI
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN		
PT. SMM SNI ISO/IEC 17020:2012	Tanggal: 1 Agustus 2025	Revisi: 1 (Revisi: 1)	Hal: 1 dari 2

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN			
Nama Verifikasi: Rata Rata 3000 Unit/Year		Tanggal: 26 Agustus 2025	
Jenis: 20. Sistem 20. 21. Sistem			
Pemeriksaan: Di Rata Rata 3000 Unit/Year, 3.000, 3.000			
Nama Verifikasi: PT. SMM SNI ISO/IEC 17020:2012			

No	Detail Ketidaksesuaian	Referensi	Status
1	Salah satu dari 3000 Unit/Year yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan SMM SNI ISO/IEC 17020:2012 dengan 3000 Unit/Year yang diperiksa.	3000 Unit/Year	Revisi 1 (Revisi: 1)
2	Salah satu dari 3000 Unit/Year yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan SMM SNI ISO/IEC 17020:2012 dengan 3000 Unit/Year yang diperiksa.	3000 Unit/Year	Revisi 1 (Revisi: 1)
3	Salah satu dari 3000 Unit/Year yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan SMM SNI ISO/IEC 17020:2012 dengan 3000 Unit/Year yang diperiksa.	3000 Unit/Year	Revisi 1 (Revisi: 1)

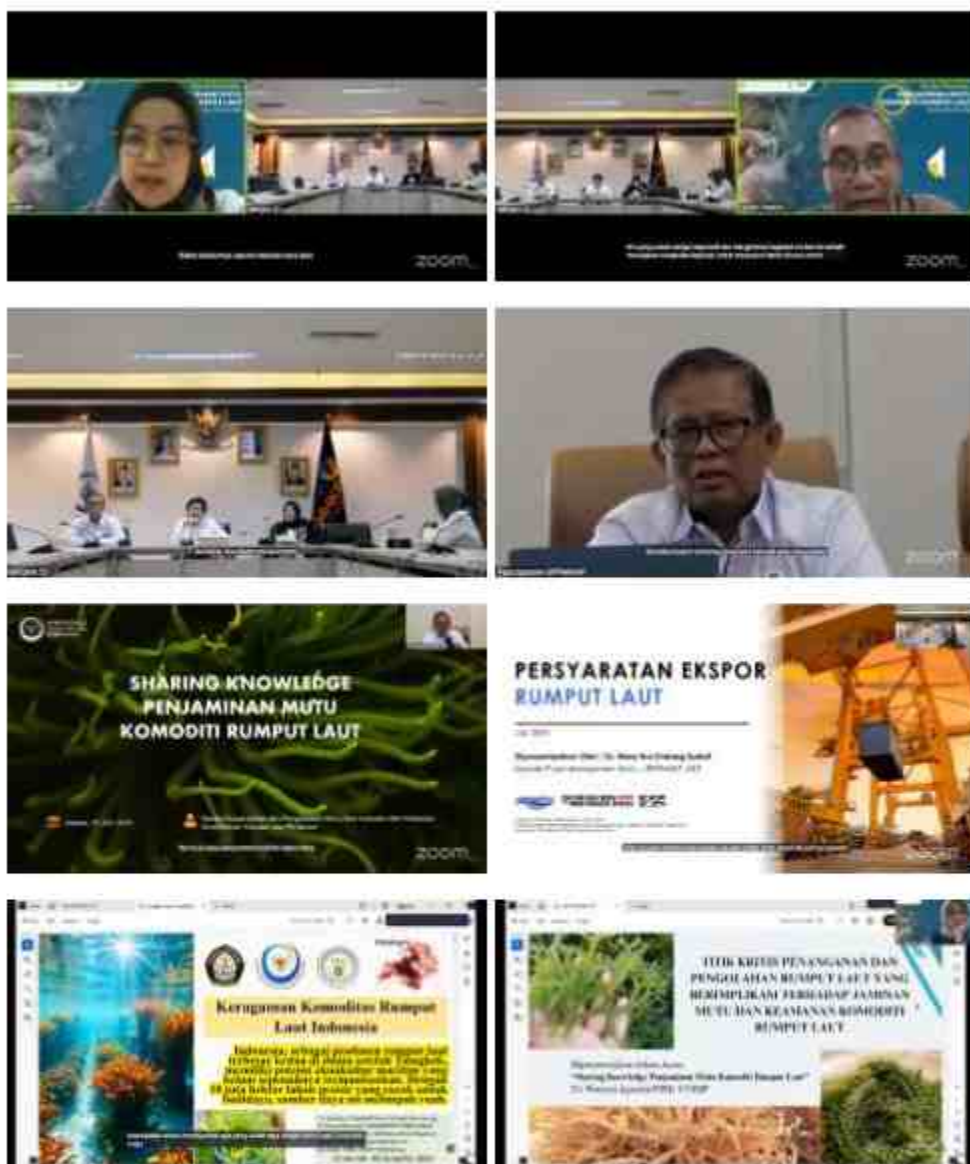
Revisi 1 (Revisi: 1) dan 2 (Revisi: 2) dan 3 (Revisi: 3)

Revisi 1 (Revisi: 1) dan 2 (Revisi: 2) dan 3 (Revisi: 3)

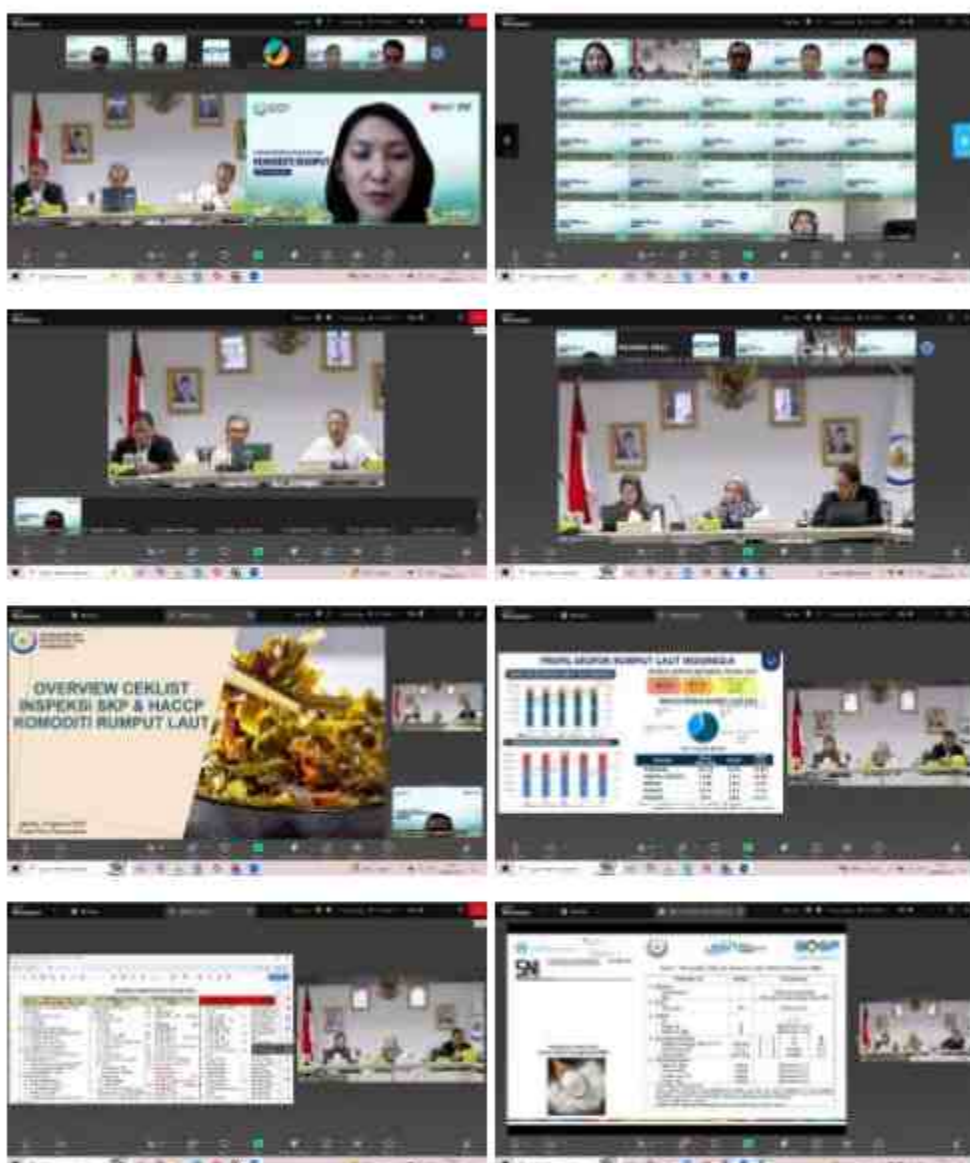
**LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN VERIFIKASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
LEMBAGA INSPEKSI SNI ISO/IEC 17020:2012
TANGGAL 26 AGUSTUS 2025**



LAMPIRAN. SHARING KNOWLEDGE PENJAMINAN MUTU KOMODITI RUMPUT LAUT
TANGGAL 10 JULI 2025



**LAMPIRAN. PEMBAHASAN DAFTAR PERIKSA PENERAPAN PROGRAM PERSYARATAN DASAR (PPD)
KOMODITI RUMPUT LAUT KERING DAN RUMPUT LAUT KOLOID
TANGGAL 6 AGUSTUS 2025**



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (8)
Nama Tim/ja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan III 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggarannya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	92	92	92	92					92
Realisasi	100	97,28	97,28	96,42					
%Capaian	109	105,75	105,75	104,80					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

DESKRIPS

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini terintegrasi dengan Aplikasi OM-SPAN. Penilaian IKPA diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Ruang lingkup :

PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 mengatur mengenai pengukuran dan penilaian secara sistematis dan objektif atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA dan menggunakan aplikasi yang dikelola oleh DJPB.

Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja

Pengukuran IKPA meliputi 3 aspek :

1. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:
 - a. Revisi DIPA bobot 10 %
 - b. Deviasi halaman 3 DIPA bobot 15%
2. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:

- a. Penyerapan anggaran bobot 20%
 - b. Belanja Kontraktual bobot 10%
 - c. Penyelesaian Tagihan bobot 10%
 - d. Pengelolaan UP dan TUP bobot 10%
 - e. Dispensasi Surat Perintah Membayar bobot 0%
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini adalah capaian output. Bobot capaian output adalah 25%.

Total Konversi Bobot pada Aspek pengukuran dan Indikator Kinerja pada TW III Tahun Anggaran 2025 adalah 100%.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Capaian nilai IKPA Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 96,42 persen dari target 92 persen. Pada triwulan ini berbeda dengan triwulan II 2025 terjadi perubahan bobot oleh sistem yaitu dari 80 persen ke 100 sehingga perhitungan untuk mendapatkan capaian kinerja adalah .

Capaian Kinerja IKPA diperoleh sebagai berikut:

Capaian kinerja IKPA = (Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran) / Konversi Bobot 100 %

Perhitungan perolehan dari Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran, Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan Indikator pendukung pada masing-masing adalah hasil perhitungan otomatis dari Aplikasi Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi Monev PA

Berikut tampilan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran Triwulan III tahun 2025 pada Balai Besar KIPM Makassar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR KAWATANA BUKU, PENGENDALIAN BUKU DAN KEAMANAN NASI, PONTIANAK MAKASSAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampel Output: 10/11/2025

No	Kode SKPD	Kode SK	Kode Subsk	Uraian Subsk	Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Realisasi Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Capaian UTM (Pengantar)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Nilai 20%	Target Realisasi 100%	Pengantar Anggaran	Belanja Kontraktual	Pengeluaran Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP					Capaian Subsk
1	100	100	407000	TUP dan BUKU KAWATANA BUKU, PENGENDALIAN BUKU, DAN KEAMANAN NASI, PONTIANAK MAKASSAR	Nilai	140,00	71,00	28,21	140,00	140,00	140,00	140,00	96,42	100%	0,00	96,42
					Belanja	14	14	28	14	14	14	28				
					Nilai Awal	11,00	71,00	10,00	11,00	11,00	11,00	22,00				
					Nilai Akhir	28,21			99,00			118,00				

Dibawah ini merupakan tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran:

- Tabel perbandingan capaian kinerja pelaksanaan anggaran TW II 2025 dan TW III 2025

Indikator kinerja	Periode TW II 2025 (TQ2-25)		Periode TW III 2025 (TQ3-25)	
	Bobot	Nilai Akhir	Bobot	Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	10
Deviasi Hal III DIPA	15	13,05	15	11,99
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	30	15,75	30	15,84
Belanja Konvensional	0	0	10	10
Pembiayaan Tagihan	0	0	10	10
Pengelolaan UP dan TUP	10	10	10	10
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	25	25	25
Dispensasi SPM (Pengurang)	0	0	0	0
Nilai Total	80	72,85	100	68,42
Nilai IKPA setelah koreksi		37,35		36,42
Capaian (Realisasi/Target Q2)		105,73		104,80

Pada tabel diatas terlihat adanya penurunan nilai IKPA pada TW III 2025 dibandingkan TW II 2025 sebesar 0,95. Penurunan TW III 2025 dipengaruhi oleh Deviasi HAL III DIPA.

Beberapa hal yang mengakibatkan tidak maksimalnya nilai Deviasi halaman 3 DIPA sebagai indikator dari kinerja kualitas Perencanaan anggaran adalah:

- Adanya pagu blokir setelah melakukan pengisian RPD
- Perencanaan yang tidak akurat: Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tidak sesuai dengan realisasi anggaran dapat menyebabkan deviasi yang tinggi;
- Kemunduran jadwal belanja: Keterlambatan atau percepatan pelaksanaan kegiatan dapat mempengaruhi realisasi anggaran dan menyebabkan deviasi;

Sedangkan penyebab rendahnya dari realisasi anggaran adalah masih adanya pagu blokir sebagai akibat dari efisiensi anggaran sebesar Rp1.817.026.000

- Tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran TW III 2025 dan TW III 2024

Indikator kinerja	Periode TW III 2024 (TQ3-24)		Periode TW III 2025 (TQ3-25)	
	Bobot	Nilai Akhir	Bobot	Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	10
Deviasi Hal III DIPA	15	13,61	15	11,99
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	30	15,95	30	15,84
Belanja Konvensional	10	10	0	10
Pembiayaan Tagihan	10	10	0	10
Pengelolaan UP dan TUP	10	10	10	10
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	25	25	25
Dispensasi SPM (Pengurang)	0	0	0	0
Nilai Total	100	57,55	100	58,42
Nilai IKPA setelah koreksi		37,55		36,42
Capaian (Realisasi/Target Q2)		104,02		104,80

Pada tabel diatas terlihat adanya kenaikan nilai IKPA pada TW III 2025 dibandingkan TW III 2024 sebesar 0,78. Salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan capaian TW III 2025 adalah penetapan target IKPA TA 2025 lebih kecil dari penetapan target TA 2024.

SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 10 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
 - 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK
- Surat Perintah Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor: B.005/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tgl 2 Januari 2025 dengan beranggotakan 1 Pegawai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

ANGGARAN dan ASPEK PEMANFAATANNYA

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan manajemen keuangan dan layanan perkantoran gaji dan tunjangan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan manajemen keuangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp23.450.000. Pada TW III 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 0 persen. Pagu kegiatan ini masih terblokir seluruhnya. Output dari layanan manajemen keuangan adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.
- Layanan perkantoran gaji dan tunjangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp6.983.259.000. Pada TW III 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 4.990.697.532 atau 71,47 persen. Output dari layanan perkantoran gaji dan tunjangan adalah pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar.

Total pagu anggaran untuk mendukung capaian kinerja pelaksanaan anggaran adalah sebesar Rp7.006.709.000 dengan realisasi anggaran 4.990.697.532 atau 71,23 persen. sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan III 2024, kegiatan pada indikator kinerja ini hanya didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp9.468.000 Setelah revisi dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.440.000 atau 99,70 persen. terdapat penurunan realisasi anggaran pada Triwulan III 2025. Hal ini disebabkan pada Triwulan III 2025 pagu anggaran kegiatan layanan manajemen keuangan masih terblokir seluruhnya dan pagu anggaran pada Triwulan III 2024 sangat kecil.

PROGRAM NASIONAL

Pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita.

- Tangkap Layar IKPA Triwulan III 2025 pada Aplikasi Monev PA

[illegible]

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi Triwulan II 2025	Penanggung Jawab
- Tim keuangan melakukan rapat strategi meningkatkan capaian deviasi hal III DI PA pada IKPA TW III 2025 di tgl 11 Juli 2025. Kesimpulan yang akan dilaksanakan pengelola keuangan khususnya PPK dan Bendahara Pengeluaran adalah melakukan perencanaan realisasi anggaran dengan mengacu pada RPD yang telah dibuat, namun karena adanya penyerapan anggaran yang harus dimaksimalkan sehingga RPD tidak sejalan dengan realisasi anggaran.  - Penugasan pegawai sebanyak 4 orang pengelola keuangan pada TW III 2025 dalam E-learning Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA dengan nomor pengusulan B.2174/BBKIPM.MKS/KP.210/VII/2025 Tanggal 23 Juli 2025. 	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 2 Oktober 2025
 Penanggungjawab Indikator Kinerja



Karwit, S.Pi

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Tim/ja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan III 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	71,5	71,5		71,5			71,5		71,5
Realisasi	100	93,44		88,53					
%Capaian									

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4**

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Menteri keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I / dan / satuan kerja bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dimaksud bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor- faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

- Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
- Penyusunan reviu angka dasar;
- Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenan; dan
- Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga; dan/atau pihak-pihak lain, yang antara lain meliputi akademisi, pakar dan praktisi.

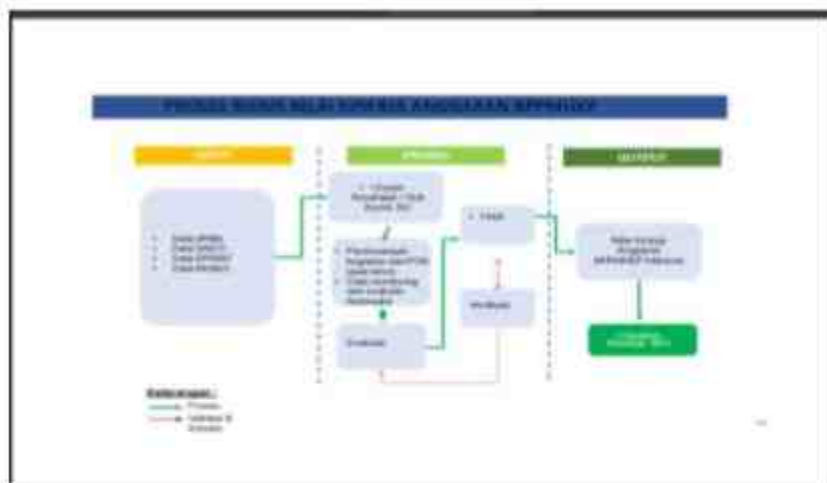
Untuk memantau Nilai Kinerja Anggaran, Kementerian Keuangan telah membuat suatu aplikasi yaitu Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap organisasi dapat selalu memantau dashboard kinerja anggaran dan melakukan peningkatan pada aspek-aspek penunjang Nilai Kinerja Anggaran tersebut.

Pada triwulan III tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk mendukung tercapainya target kinerja ini antara lain :

- Penyusunan revisi anggaran

Aplikasi Monev Kementerian Keuangan pengukuran Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan pada 2 kategori yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan untuk tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya Nilai Kinerja Anggaran didasarkan dari 4 aspek yaitu Aspek Penyerapan, Konsistensi, Capaian realisasi Output, dan Nilai Efisiensi.

Berikut adalah proses bisnis terbentuknya data pada dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu



Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu

Penjelasan Dashboard Nilai Kinerja Anggaran Triwulan III tahun 2025



1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 9,2 %
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 4,65 %

Nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 9,2% yang terlihat pada aplikasi <https://monev.kemkeu.go.id> belum dapat menjelaskan kondisi riil nilai kinerja perencanaan anggaran yang ada di Balai Besar KIPM Makassar. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan aplikasi <https://monev.kemkeu.go.id> belum update yang dibuktikan dengan screenshot pada aplikasi yaitu "Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi".

Jika dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025 anggaran sebesar 11,02% terjadi penurunan pada Triwulan III Tahun 2025 menjadi 9,2%. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II yang hanya 77,05%. Data detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Triwulan II Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Indikator Pelaksanaan Anggaran	100%	88.53%	88.53%

Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Indikator Pelaksanaan Anggaran	100%	88.53%	88.53%

Untuk itu perhitungan kinerja perencanaan anggaran Balai Besar KIPM Makassar diperoleh dari aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id> di login MONEVPA. Nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan bulan September Tahun 2025 adalah 88.53%, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kategori	Sub Kategori	Nama Indikator	Kategori	Target		Realisasi		Persentase		Status	Catatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase	Persentase		
1	Indikator Pelaksanaan Anggaran	Indikator Pelaksanaan Anggaran	Indikator Pelaksanaan Anggaran	Indikator Pelaksanaan Anggaran	100%	88.53%	100%	88.53%	88.53%	88.53%	Selesai	

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada detail indikator halaman 3 DIPA pada aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan table di atas, pada Triwulan III Tahun 2025 nilai perencanaan anggaran sudah cukup optimal terutama terlihat pada kode akun belanja 52 yaitu belanja barang. Terpantau nilai deviasi antara perencanaan dan penyerapan anggaran pada bulan Juli dan Agustus Tahun 2025 masih cukup tinggi yaitu 100%, namun pada bulan September Tahun 2025 telah dilakukan optimalisasi penyerapan anggaran pada kode akun belanja 52 sehingga terjadi penurunan deviasi yaitu menjadi 14,85%. Namun demikian secara total nilai perencanaan anggaran masih melebihi target yaitu 88,53% dari target 71,5%.

Untuk mendukung tercapainya IKU ini, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 9 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 Orang Pejabat Penandatangan SPM;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
 - 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK

Komitmen untuk terus meningkatkan kinerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara menjadi prioritas Balai Besar KIPM Makassar.

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran dan layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan Perencanaan dan penganggaran
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 57.675.000,-. Pada TW III 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 17.406.459,- Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.
- Layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 273.404.000,-. Pada TW III 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 158.839.027,- Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.

Pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asa cita.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Tim perencanaan keuangan kurang akurat dalam penyusunan RPD;
- Pengelola anggaran kurang konsisten dalam melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan anggaran diselaraskan dengan pelaksanaan anggaran.

Rekomendasi rencana aksi triwulan III 2025	Penanggung Jawab
- Penyusunan RPD dilaksanakan dengan teliti; - Melakukan monitoring dan evaluasi konsistensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi TW II Tahun 2025	Penanggung Jawab
- Pada tanggal 13 Agustus pengelola keuangan melaksanakan rapat monitoring yang membahas perihal capaian output dan capaian realisasi anggaran.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 6 Oktober 2025

Penanggungjawab Indikator Kinerja



Karwit S. Pi

**Dokumentasi Rapat Evaluasi Realisasi Output dan Realisasi Anggaran
Triwulan III Tahun 2025 di BPPMHKP Makassar**



**Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator (10)	:	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan III 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintah yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	100	100	100	100	100	100	100	-	100
Realisasi	100	100	100	100	-	-	-	-	-
%Capaian	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Deskripsi :

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir;

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern;

Indikator kinerja "Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)" dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$\% P = (A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

%P = Persentase penyelesaian temuan;

A = Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 yang diselesaikan pada LHP atas kepatuhan;

B = Nilai temuan BPK tahun 2025;

Pada triwulan III tahun 2025 tidak terdapat pemeriksaan BPK, sehingga realisasi dari IKU ini dinilai mencapai 100%, jika dibandingkan TW II 2025 yaitu 100% dan pada TW I Tahun 2025 capaian realisasinya 100%. Dengan demikian penyelesaian temuan BPK pada lingkup Balai Besar KIPM Makassar dinilai konsisten.

Kegiatan yang Dilaksanakan :

Pada triwulan III tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan guna mendukung tercapainya indikator ini, yakni dengan melakukan pemeriksaan, verifikasi dan validasi terhadap seluruh bukti tagihan belanja untuk menentukan bahwa tagihan tersebut layak untuk dilakukan pembayaran. Dengan aktivitas tersebut diharapkan pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku sehingga tidak ada temuan dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional baik internal maupun eksternal;

Persentase penyelesaian temuan BPK mendukung Misi Asta Cita ke-7 "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan Korupsi dan Narkoba". Hal ini karena dengan adanya IKU ini dapat mendorong instansi pemerintah dalam hal ini Balai Besar KIPM Makassar untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta mematuhi penyelesaian temuan BPK tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar yaitu "Akuntabel" ASN bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pengelola anggaran sebanyak 11 orang, yang terdiri dari :

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- (6) Bendahara Penerimaan;
- (7) Bendahara Pengeluaran;
- (8) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- (9) Verifikator Keuangan (3 orang);

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja 3987.EBA.994.002.00 dan 0H adalah sebesar Rp. 189.910.000,- yang terdiri dari :

- Layanan Perkantoran, Perawatan Kendaraan Bermotor semula Rp. 286.540.000,- menjadi 135.310.000,-;
- Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu semula Rp. 24.600.000,- menjadi Rp. 54.600.000,-;

Sampai dengan triwulan III tahun 2025 telah direalisasikan anggaran Rp. 130.151.686,- atau 69% yang digunakan untuk Layanan perkantoran, Perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp. 90.794.222,- dan Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu sebesar Rp. 39.357.464,-

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi terjadinya tuntutan ganti rugi (kelebihan belanja) dikarenakan pengelola anggaran kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja;

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025	Penanggung Jawab
Memastikan kecermatan verifikasi keuangan secara berjenjang (Verifikator Keuangan/Analis Keuangan, PPK dan Bendahara) dengan penggunaan lembar checklist	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi TW II Tahun 2025	Penanggung Jawab
Telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh bukti tagihan belanja, dan dituangkan dalam lembar checklist;	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

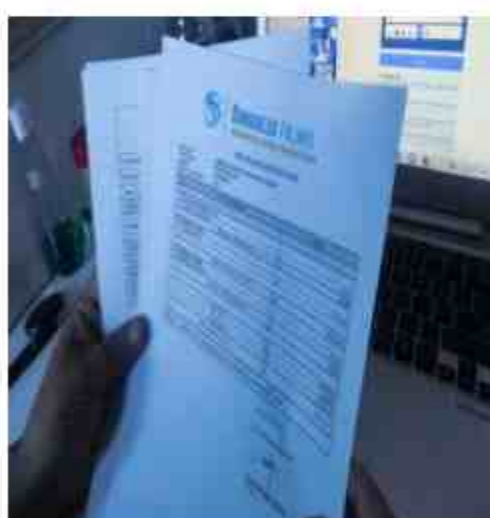
Makassar, 6 Oktober 2025

Penanggung Jawab,



Karwit

Dokumentasi : Kegiatan verifikasi keuangan dengan menggunakan lembar checklist BPPMHKP Makassar



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025

Nama Indikator (11)	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Tim/ja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan III

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target			81			87	87		87
Realisasi			85.96	88					
%Capaian			106						

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4

= Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1

= Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2

= Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan

= Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
DESKRIPSI Menurut UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi. 1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. 2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. 3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan

- c. Surat Pkt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Nilai Realisasi IP ASN Semester I Tahun 2024 adalah 90,05, Target Tahunan IP ASN Tahun 2025 adalah 87 dengan periode pelaporan Semester I nilai target 81 dan Semester II nilai target 87.

Nilai Realisasi IP ASN sampai dengan triwulan III 2025 adalah 88

Dengan keterbatasan anggaran, TIM Kepegawaian Balai Besar KIPM Makassar berupaya melakukan pengembangan kompetensi ASN dengan pemanfaatan sumberdaya internal, Optimalisasi teknologi, perencanaan strategis dan kolaborasi.

❖ Pemanfaatan sumber daya internal :

- Sharing Session Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penerbitan SMKHP diikuti oleh pegawai teknis BPPMHKP Makassar dengan Narasumber Inspektur Mutu Balai Besar KIPM Makassar
- Refresment Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi SNI ISO/IEC 17020:2012 dan dan SNI ISO/IEC 17020:2012 Di Badan Mutu Kkp Makassar.

❖ Optimalisasi teknologi

- Pelatihan Evaluasi sertifikat kalibrasi timbangan sesuai dengan ISO 17025 yang diikuti oleh Ardiana, Muzakir
- Norovirus pada produk perikanan, Ancaman, Tantangan, serta penanggulangannya yang diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu
- Solusi Biosekuriti untuk tambak udang diikuti oleh Mohammad Zamrud
- Quality Assurance in the seaweed value chain diikuti oleh Waode Suharni
- Penerapan SNI 9369:2025 wadah bersekat dari baja tahan karat untuk makanan diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu
- Forum Kepegawaian Dan Sosialisasi Kode Etik Dan Perilaku Pegawai Lingkup Bppmhkp Tahun 2025 diikuti oleh Rosdiana
- Penguatan Pemahaman Penjaminan Mutu Hasil
- Perikanan melalui Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) diikuti oleh Mohammad Zamrud
- Pembahasan daftar perika (PPD) komoditi rumput laut kering dan rumput laut koloid diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu
- Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA Angkatan VII Tahun 2025 diikuti oleh Jumhana
- Edukasi Perpajakan diikuti oleh Kamdani
- Kupas Tuntas Umur Simpan Produk Perikanan diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu
- Meningkatkan Desain Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas diikuti oleh Amiyanti, Mohammad Zamrud.
- Edukasi Perpajakan diikuti Kamdani
- Pembentukan dan Pemeliharaan panelis terlatih sensori / organeleptik diikuti oleh Idawati Barung
- Pemahaman proses penanganan dan pengolahan rumput laut diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu

❖ Perencanaan strategis dan kolaborasi :

- Pemberdayaan Nelayan Kecil "Pelatihan Cplb Di Atas Kapal" Di Kab. Sinjai bersinergi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai
- Bincang Inspiratif Pelayanan Publik Dengan Tema "Menuju Pelayanan Publik Yang Professional & Unggul (Professional & Excellent Service) bersinergi dengan Bank Negara Indonesia diikuti pegawai Balai Besar KIPM Makassar
- Seminar Diseminasi Pakan Pungsional Pada Budidaya Udang oleh PT. Grobest Indomakmur bertempat di Hotel Rinra Makassar diikuti Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

- Pelatihan HACCP Dasar bekerjasama dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Bincang Inspiratif Pelayanan Publik Dengan Tema Service Excelent bersinergi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) diikuti pegawai Balai Besar KIPM Makassar
- Badan Mutu KKP Makassar mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Perbenihan Udang di Aula Lt. 2 Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin yang diselenggarakan oleh Pusat Kolaborasi Riset Shrimp Technology Badan Riset dan Inovasi Nasional – Universitas Hasanuddin
- Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Pelayanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Inspektur Mutu Badan Mutu KKP Makassar

Peningkatan kompetensi menjadikan budaya kerja berupa sikap dan perilaku Aparatur Sipil negara untuk melaksanakan tugas sesuai pelatihan/keterampilan yang telah dimiliki. Pelatihan fleksibel skill dan Pelayanan Publik dengan narasumber dari perbankan sehingga menambah wawasan yang akan merubah pola pikir dalam menyesuaikan diri dengan perubahan jangka pendek dan jangka panjang sehingga bisa menangani masalah atau tugas yang tidak terduga secara efektif.

Indikator Nilai IP ASN tercapai selain pengembangan kompetensi sebagai berikut :

1. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN BBKIPM Makassar, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 :-
 - b. Pendidikan S-2 :-
 - S2 Keahlian : 7 orang
 - c. Pendidikan S-1 /D-IV :
 - S-1 /D-IV Keahlian : 12 orang
 - S-1 /D-IV Pengawas : 1 orang
 - S-1 /D-IV Pelaksana : 5 orang
 - d. Pendidikan D-III ;
 - D-III Keterampilan : 4 orang
 - D-III Pelaksana : 1 orang
 - e. SLTA :
 - SLTA Keterampilan : 4 orang
 - SLTA Pelaksana : 4 orang
2. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

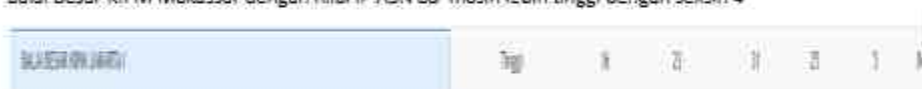
3. Predikat Kinerja yang diperoleh ASN BBKIPM Makassar pada tahun 2024 adalah BAIK dan SANGAT BAIK. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir Aparatur Sipil Negara Lingkup Balai Besar KIPM Makassar tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sehingga semua ASN mendapatkan nilai 5

Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

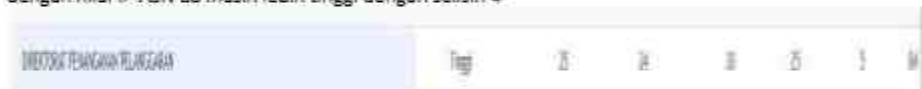
Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Sebagai perbandingan nilai IP ASN dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Balai Besar KIPM Jakarta I dengan nilai IP ASN 84 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 88 masih lebih tinggi dengan selisih 4



2. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Penanganan Pelanggaran dengan nilai IP ASN 84 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 88 masih lebih tinggi dengan selisih 4



Sumber data : <https://portal.kkp.go.id/apps/kepegawaian/ipasn> pertanggal 2 Oktober 2025

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN

Balai Besar KIPM Makassar, mempunyai SDM Aparatur Sipil Negara sebanyak 37 Pegawai yang sebelumnya 34 pegawai, pegawai mutasi masuk sebanyak 3 orang yang UPT sebelumnya Adalah Stasiun KIPM Palu, Stasiun KIPM Ternate dan Stasiun KIPM Kendari

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Subbagian Umum	1
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	1
7.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	3
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2
10.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
11.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1
12.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	1
13.	Pelaksana	10
	Total	37

Anggaran

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum, Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2024 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 77.285.000
- Anggaran Setelah revisi sebesar Rp. 73.833.000
- Realisasi Rp. 73.434.365 (99.46%)

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum, Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2025 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 18.064.000
- Anggaran Setelah Blokir sebesar Rp. 0

Program Nasional

Pada indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar KIPM Makassar memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita, dengan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara akan meningkatkan kualitas Sumber daya manusia dalam pelayanan publik.

Aspek Pemanfaatan

Kompetensi ASN Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar bermanfaat bagi kemajuan organisasi dan individu, IP ASN merupakan area pengembangan diri dalam Upaya peningkatan profesionalitas sebagai ASN dan IP ASN sebagai kontrol sosial agar ASN bertindak profesional dalam kaitan pelayanan publik.

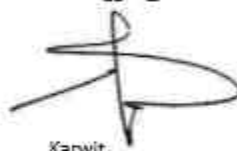
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Potensi permasalahan dapat timbul dengan adanya efisiensi Anggaran yang dapat berdampak pada peningkatan kompetensi pegawai khususnya untuk pelatihan yang membutuhkan pertemuan klasikal dan praktek langsung.
- Kesadaran ASN dalam mengentry data sertifikat pada aplikasi MyAsn tepat waktu perlu ditingkatkan

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Aparatur Sipil Negara mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi secara luring dan daring - Memperbanyak informasi peningkatan kompetensi kepada seluruh pegawai dan penugasan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi	Ketua TIM Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
1. Aparatur Sipil Negara telah mengikuti Pelatihan secara daring dengan dibuktikan nilai IP ASN yang meningkat.	Ketua TIM Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 2 Oktober 2025
 Penanggungjawab Indikator Kinerja



Karwit

The screenshot shows the SAP S/4HANA 'InfoView' report for a sales order. The report displays a list of items with columns for Item, Description, Quantity, and Unit. The 'InfoView' button is highlighted in red. The 'InfoView' button is also highlighted in red in the original image.



**DOKUMENTASI
PERENCANAAN STRATEGIS DAN KOLABORASI**



87



**Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Tim/ja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan III tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	86	86	86	86	86	86	86		86
Realisasi	49,61	71,5	71,5	80,25					
%Capaian	57,68	83,13%	83,13%	93,31 %					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4"

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %
Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa :
Renstra 2025-2029, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi.
Yang sudah dilaksanakan sampai triwulan III tahun 2025 yaitu : penyusunan RKAKL dan Rencana Aksi Renja mencapai 22,5 %.
2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 %
Pengukuran Kinerja ini telah terselesasi Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa :
Penyusunan Manual IKU tahun 2025 yang telah diselesaikan pada triwulan I terealisasi mencapai 30%
3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %

Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2025, dokumen yang harus disiapkan adalah Laporan Kinerja Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, triwulan IV dan Tahunan.

Sampai dengan triwulan III tahun 2025 telah disampaikan Laporan Kinerja Triwulan I dan Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2025 sehingga realisasi tercapai 9 %

4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai Besar KIPM Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai Besar KIPM Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja. Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerjaku yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Sampai dengan triwulan III tahun 2025 telah dilakukan evaluasi kinerja secara internal dan eksternal realisasi tercapai 18.75%.

Bobot realisasi capaian :

= Parameter 1 (22,5%) + parameter 2 (30 %) + parameter 3 (9 %) + parameter 4 (18.75 %)
= 80,25 %

Realisasi capaian = Bobot realisasi capaian x Target

= 80,25 x 100

86

= 93.31 %

Indikator ini di hitung Tahunan

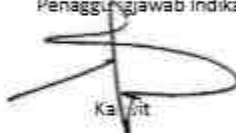
Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan III adalah :

Telah melakukan penginputan data dukung rencana aksi, pada aplikasi kinerjaku berupa pagu anggaran yang mendukung setiap indikator, realisasi anggaran, masalah, rekomendasi dan tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, penginputan data dukung tersebut dilakukan setiap triwulanan.

- Penilaian Mandiri SAKIP mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu " Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba". Hal ini disebabkan karena dengan adanya penilaian mandiri sakip dapat meningkatkan output dari program kegiatan yang terdapat dalam Tugas dan Fungsi Balai Besar KIPM Makasar.
- IKU ini mendukung terciptanya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu "Akuntabel" ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, hal ini disebabkan karena setiap pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi dipertanggungjawabkan secara tertulis dan disertai dengan dokumentasi kegiatan yang detail dan lengkap.
- Untuk pemanfaatan melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 42.795.000 yang mengalami blokir sebanyak 100 %. jika dibandingkan pemanfaatan anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2024 dengan pagu Rp 38.668.000,- teralisasi anggaran sebesar Rp 37.405.199 atau 96.73%.
- Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN Muda, APK APBN Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)	
- Potensi masalah dapat terjadi jika monitoring terhadap capaian kegiatan tidak berjalan optimal.	
Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Melakukan monitoring output kegiatan dan realisasi anggaran	Tim Kerja Dukungan Manajerial
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Pada tanggal 13 Agustus pengelola keuangan melaksanakan rapat monitoring yang membahas perihal capaian output dan capaian realisasi anggaran.	Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 6 Oktober 2025
 Penanggungjawab Indikator Kinerja



Ka. Lit

DOKUMENTASI KEGIATAN



**Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator (13)	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan III

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tatakelola pemerintahan yang Efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	85	85	85	85	85	85	85		85
Realisasi	100	94,12	97,06	100					
% Capaian	117,65	110,73	114,19	117,65					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm.1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm.2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Diskripsi :

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat

mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KPM Makassar berdasarkan LHP dengan formula perhitungan sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh unit kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan pada unit kerja}} \times 100 \%$$

Kegiatan yang Dilakukan :

Pada triwulan III ini telah dilakukan pemenuhan dokumen tindak lanjut atas temuan evaluasi Itjen pada triwulan II Tahun 2025 yaitu pada rekomendasi 1 dan 3, sehingga mencapai hasil 100%.

Pada triwulan III Tahun 2025 tidak terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga nilai realisasi indikator kinerja ini mencapai 100. Berbeda dengan periode sebelumnya Triwulan II Tahun 2025 realisasi indikator kinerja ini hanya mencapai 94,12. Jika dibandingkan dengan pencapaian nilai Indikator Kinerja pada Triwulan yang sama pada Tahun 2024 sama-sama mencapai nilai 100.

Anggaran :

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan anggaran dari DIPA Tahun 2025 pada mata anggaran 3987.EBA.994.002.0A, 3987.EBA.994.002.0G dan 3987.EBA.994.002.0I, dengan pagu anggaran semula Rp. 1.852.749.000,- setelah adanya revisi anggaran menjadi Rp.1.850.843.000,- yang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.1.422.547.268,- atau 76,86% yang digunakan untuk belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, belanja honor output kegiatan, belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Jika dibandingkan alokasi anggaran pada triwulan III tahun 2024 yaitu sebesar Rp.681.026.000,- terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 171,77%.

Sumberdaya Manusia :

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang.

Program Nasional, Budaya Kerja dan Pemanfaatan :

Indikator kinerja ini jika tercapai maka akan mendukung keberhasilan program prioritas KKP maupun Program Prioritas Nasional Asta Cita. Indikator kinerja ini secara spesifik mendukung Program Prioritas Nasional Asta Cita ke 7 yaitu "Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi dan narkoba".

IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja Ber-AHLAK di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar yaitu "Akuntabel" dimana ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Tercapainya target kinerja ini mencerminkan bahwa organisasi telah melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan dan standar yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan dengan akuntabel dan tepat waktu.

Aspek pemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan IKU ini yaitu memberikan informasi mengenai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, sehingga dapat mengambil tindakan dan Keputusan secara cepat, tepat dan akurat.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itjen.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Operator SIOAK melakukan pemantauan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Itjen secara berkala. - Satuan Kerja melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Itjen secara lebih cepat.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
- Telah dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Itjen pada aplikasi SIOAK periode Triwulan III Tahun 2025.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 2 September 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja



H. R. Wit

Tampilan layar pada aplikasi SIDAK
<https://sidak.kkp.go.id/beranda/9/373>



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Tim Kerja	:	Dukungan Manajemen
Periode Laporan	:	Triwulan III

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja (14)	:	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	76	76	76	76	-	-	76,00	-	76,00
Realisasi	99,06	100	100	100					
% Capaian	130,34	131,57	131,57	131,57					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemakatan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%) menggunakan rumus sebagai berikut :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP

$$= \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 2.892.982.000}}{\text{Rp. 2.892.982.000}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU pada triwulan III adalah sebesar 100 % dari target 76 % atau capaiannya sebesar 131,57 %. Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan II sebesar 131,57 %. Jadi untuk capaian realisasi Rencana Umum Pengadaan pada triwulan II dan triwulan III yang nilai paket yang diinput dengan nilai yang diumumkan adalah sama.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah

1. Menginventarisir kegiatan dan anggaran yang telah direvisi pada RKA- KL;

2. Operator menginput data barang dan jasa ke dalam aplikasi SIRUP, terlebih dahulu berkoordinasi dan komunikasi dengan pemegang akun KPA, PPK dan Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial untuk menunggu arahan dan petunjuk selanjutnya;
3. Mengupload Rencana umum pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar ke dalam aplikasi SIRUP

Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tersebut Balai Besar KIPM Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diupload di aplikasi SIRUP. Pada triwulan II telah dilakukan revisi kegiatan dan anggaran sehingga Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/ Jasa perlu menyesuaikan, diinput serta diumumkan ke dalam portal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Adapun paket RUP yang telah diupload dan diumumkan sebesar Rp.2.892.982.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Paket Penyedia sebanyak 5 kegiatan Manajemen Mutu dengan jumlah anggaran Rp. 114.750.000,-
- b. Paket Penyedia sebanyak 6 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 9.176.000,-
- c. Paket Penyedia sebanyak 21 kegiatan Dukungan Manajemen Internal dengan jumlah anggaran Rp. 2.679.056.000,-
- d. Paket E-Purchasing sebanyak 1 kegiatan Dukungan Manajemen Internal dengan jumlah anggaran Rp. 90.000.000,-

Adapun periode pelaporan untuk IKU ini adalah tahunan sehingga capaian triwulan tidak bisa diukur hanya menggambarkan progres kegiatan PBJ yang diperoleh setiap triwulan. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Rencana Umum Pengadaan (RUP) Balai Besar KIPM Makassar yang telah diinput ke dalam aplikasi SIRUP LKPP.go.id yang dilaksanakan oleh tim Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, BPPMHP persentase capaian IKU ini adalah 100 %

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan III sebagai berikut :

Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP pada tanggal 4 Agustus 2025;

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2025 sebanyak 7 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada triwulan III tahun 2025 sebesar Rp. 120.504.000,- yang terdiri dari :

1. 3987.EBA.994, 002.OE Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian Kerja = Rp. 45.504.000,-
2. 3987.EBA.994, 002.OF Kesehatan dan Daya Tahan Tubuh = Rp. 73.500.000,-

Pada triwulan II 2025 alokasi anggaran untuk IKU ini adalah Rp. 120.504.000,-, namun dengan adanya pengeseran anggaran pada triwulan III 2025 sehingga pagu anggaran nilainya menjadi Rp 119.004.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 110.650.000,- dengan persentase 92,98 %. Adapun sisa pagu anggaran Rp. 8.954.000,- yang belum terealisasi akan digunakan dan direalisasikan pada triwulan IV sesuai dengan peruntukannya.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis Web (*Web based*) mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu " Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba". Hal ini disebabkan karena dengan adanya aplikasi SIRUP maka transparansi pada pengelolaan sistem pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, masyarakat dapat secara langsung mengakses pengadaan barang dan jasa.

Manfaatnya sebagai berikut :

1. SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
2. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.
3. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.
4. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : inaproc.lkpp.go.id/sirup;
5. Untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi Balai Besar KIPM Makassar dalam pengadaan barang/ jasa

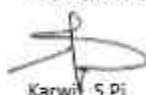
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Potensi masalah : Ketidaksesuaian nilai paket pengadaan yang diinput dengan nilai paket pengadaan yang terumumkan pada portal aplikasi SiRUP

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Menginput data kegiatan dan anggaran dalam portal SiRUP.go.id agar lebih cermat dan lebih teliti	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Operator telah menginput data kegiatan dan anggaran dalam portal SiRUP.go.id dengan cermat dan lebih teliti sehingga nilai paket pengadaan yang diinput sesuai dengan nilai paket yang terumumkan	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Makassar, 7 Oktober 2025
 Penanggung jawab Indikator Kinerja,



Karwil, S.Pi

[illegible]

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
TRIWULAN III - 2025

SRUP LAMP - 21-10-2022

REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN

TAHUN ANGGARAN : 2023

KUJPO:	Kementerian Kesehatan Dan Perlindungan
Sekolah Kerja:	Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar
PAKPA	Muhammad Zamrud, S.Pt., MP 196710021982032001

1. Paket Penyedia

1.1. Paket Penyedia Terumukan

No	Keterangan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Kategori	Persentase Realisasi	Pagu
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	59529258	Belanja Bahan konsumsi pembinaan/ pengembangan kompetensi pegawai	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket THON: Ya Pengadaan konsumsi pembinaan/ pengembangan kompetensi pegawai	Pengadaan Langsung	1.600.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	59437003	Belanja Barang Periodik dan Berang Konsumsi keperluan kantor/korban	APBN, APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket THON: Ya 1. Kebutuhan supplies 2. Perawatan Rumah Tangga Kantor	Pengadaan Langsung	48.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	59529259	Belanja Jasa Profesi pembinaan/ pengembangan kompetensi	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket THON: Ya pembinaan/ pengembangan kompetensi	Pengadaan Langsung	3.400.000
4	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	59524218	Belanja Keperluan Kantor/korban	APBN, APBN, APBN, APBN, APBN, APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket THON: Ya 1. Kebutuhan sehari-hari kantor/korban (48. OT @ 150000) 2. Administrasi (1, THN @ 100000) 3. Lisensi aplikasi video conference (12. BLN @ 400000) 4. Penggantian/ pembelian (12. BLN @ 100000) 5. Perawatan 6. Dukungan pelayanan publik	Pengadaan Langsung	194.218.000
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	59529265	Belanja Langganan Air	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket THON: Ya 1. Langganan air (12. BLN)	Pengadaan Langsung	7.632.000
6	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	59047190	Belanja Langganan Listrik	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket THON: Ya 1. Langganan Listrik (12. BLN)	Pengadaan Langsung	301.960.000
7	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	Split a PDF file into multiple files, or merge multiple PDF files into one	Telepon	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket THON: Ya 1. Langganan Telepon (12. BLN)	Pengadaan Langsung	6.000.000
8	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan		59524426	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin / Inventaris	APBN, APBN, APBN, APBN, APBN, APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket THON: Ya 1. Pemeliharaan Personal Computer/laptop (61. UNIT) 2. Pemeliharaan Inventaris Kantor (48. PEG) 3. Pemeliharaan Printer (48. UNIT) 4. Pemeliharaan AC Split (81. UNIT) 5. Pemeliharaan maintenance alat laboratorium (1. THN) 6. Pemeliharaan Genset bahan bensin dan 50 KVA (3. UNIT)	Pengadaan Langsung
9	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	59476583	Jasa Desain Gedung Laboratorium	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket THON: Ya Desain gedung laboratorium	Pengadaan Langsung	20.000.000
10	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	59524385	Konsumsi Kantor, Pengiriman dan Pramu Baki	APBN, APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket THON: Ya 1. Belanja Keperluan Kantor 2. Belanja Jasa Logistik	Pengadaan Langsung	1.364.872.000
11	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	59529214	Layanan Internet	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket THON: Ya 1. Langganan Jasa internet (12. BLN)	Pengadaan Langsung	88.295.000
12	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	59053608	Pas Pasukan Lari Udara	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket THON: Ya 1. Belanja Barang Operational Lainnya	Pengadaan Langsung	10.050.000
13	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	59550009	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket THON: Ya 1. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pengadaan Langsung	153.404.000
14	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	59994819	Pemeliharaan kesehatan medical check up pegawai	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket THON: Ya Pemeliharaan kesehatan/ medical check up pegawai	Pengadaan Langsung	75.000.000

15	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	50047052	Pengadaan Bahan laboratorium	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Bahan laboratorium	Pengadaan Langsung	120.000.000
16	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	50047052	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakelan Kerja	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Belanja Belanja Operasional Lainnya	Pengadaan Langsung	45.004.000
17	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	50524259	Pengiriman dan pengiriman barang dan dokumen dinas	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Pengiriman surat / dokumen barang (12, BLN @ 500000)	Pengadaan Langsung	10.500.000
18	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	50306074	Perawatan Kendaraan Bermotor	APBN, APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Belanja Keperluan Perawatan 2. Belanja Pemeliharaan Perawatan dan Mesin	Pengadaan Langsung	136.310.000
19	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	50520636	Portokan papan nama Kantor	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Portokan papan nama Kantor	Pengadaan Langsung	30.000.000
20	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	50524507	Peresmian/ Jamban Kelagra/ Misi/ Tami	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Belanja Belanja Operasional Lainnya	Pengadaan Langsung	24.000.000
21	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	50047295	Sewa digital signage	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Belanja sewa	Pengadaan Langsung	13.608.000
22	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	50598858	Tambah Daya Listrik	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Tambah Daya Listrik	E-Purchasing	60.000.000
23	Manajemen Mutu	50533931	Belanja Bahan Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji	APBN, APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Konsultasi assessment/ survelan (20, CH @ 65000) 2. ATK dan komputer supplies (1, PKT @ 910000)	Pengadaan Langsung	2.868.000
24	Manajemen Mutu	50531454	Belanja Bahan Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	APBN, APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Pertanggungjawaban (1, PKT @ 200000) 2. ATK dan komputer supplies	Pengadaan Langsung	5.304.000
25	Manajemen Mutu	50552629	Belanja Jasa Lainnya Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji	APBN, APBN, APBN, APBN, APBN, APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Kotoran alat penguatan (1, PKT @ 6000000) 2. Uji profesional (2, PKT @ 1500000) 3. Uji bonding (1, PKT @ 1000000) 4. Survei akurasi (1, PKT @ 1500000) 5. Biaya asuransi (2, CH @ 3500000)	Pengadaan Langsung	59.598.000
26	Manajemen Mutu	50531471	Belanja Jasa Lainnya Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	APBN, APBN, APBN, APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Survei akurasi ; biaya assessment ; biaya penyediaan kompetensi	Pengadaan Langsung	24.000.000
27	Manajemen Mutu	50533956	Penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015)	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Belanja Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung	25.000.000
28	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	50531009	Belanja Bahan Monitoring Gerakan Perairan	APBN, APBN, APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. ATK dan komputer supplies (1, PKT @ 500000) 2. Pembuatan sampel (4, PKT @ 530000) 3. Pengiriman sampel (4, PKT @ 500000)	Pengadaan Langsung	4.490.000
29	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	50027100	Belanja Bahan Sertifikasi OPB pada Pembinaan	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. ATK dan komputer supplies (1, PKT @ 620000)	Pengadaan Langsung	620.000
30	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	50027191	Belanja Bahan Sertifikasi OPB	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. ATK dan komputer supplies (1, PKT @ 680000)	Pengadaan Langsung	680.000
31	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	50530603	Belanja Bahan Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. ATK dan komputer supplies	Pengadaan Langsung	646.000
32	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	50530608	Belanja Bahan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. ATK dan komputer supplies	Pengadaan Langsung	750.000
33	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	50531018	Belanja Jasa Lainnya penguatan Monitoring Gerakan Perairan	APBN	Makassar (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Biaya pengujian (4, PKT @ 500000)	Pengadaan Langsung	2.000.000
Total								2.832.362.000

**Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Tim/ja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan III 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target		1	1				1	1	1
Realisasi		1	1						
% Capaian		100	100						

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw.2, Tw.3 dan Tw.4;

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2;

Sm II = Capaian Q3 + Capaian Q4;

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025;

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

DESKRIPSI

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, sesuai Peraturan Menteri PANRB No.30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah secara kompetitif, adaptif, pertukaran pengalaman dan berkelanjutan melalui kompetisi, inovasi, system informasi inovasi, pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi, peningkatan kapasitas dan pemantauan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan K/L, Pemerintah Daerah, BMUN dan BUMD, Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun Kriteria Inovasi yaitu :

- Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan publik;
- Efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;
- Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
- Dapat ditransfer/ direplikasi, yaitu dapat dan/ atau telah dicontoh dan/ atau menjadi rujukan dan/ atau diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya;

- e. berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

Di dalam peraturan Menteri PANRB No.91 tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan :

- Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ ide kreatif orisinal dan/ atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.

Pengembangan Inovasi pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui berbagai cara seperti Penggunaan Teknologi, Pelatihan, dan Kolaborasi.

a. Penggunaan teknologi

1. Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam upaya untuk meningkatkan kegiatan pemerintah
2. Menggunakan teknologi mobile
3. Menggunakan e-meterai/ meterai digital dan tanda tangan elektronik
4. Menggunakan verifikasi biometrik dan SSO pada aplikasi SPBE.

Verifikasi biometrik dan Single Sign On (SSO) adalah teknologi yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna dan mengakses aplikasi SPBE.

- Verifikasi biometric
 - Teknologi yang memverifikasi identitas pengguna dengan menggunakan ciri fisik atau perilaku unik, seperti wajah, sidik jari, atau iris mata
 - Data biometrik disimpan dalam sistem sebagai template digital
 - Saat pengguna mencoba mengakses layanan, sistem membandingkan data biometrik baru dengan template yang sudah disimpan
 - Verifikasi biometrik lebih aman dibandingkan dengan metode tradisional seperti PIN atau kata sandi
- Single Sign On (SSO)
 - Sistem verifikasi yang memungkinkan pengguna hanya menggunakan satu username dan password saja untuk masuk ke semua aplikasi SPBE
 - SSO mengintegrasikan berbagai aplikasi administrasi ke dalam satu sistem
 - SSO meningkatkan efisiensi dan keterpaduan layanan digital pemerintah
 - Penerapan verifikasi biometrik dan SSO pada aplikasi SPBE diharapkan dapat meningkatkan keamanan data dan memberikan kemudahan bagi pengguna
- Aplikasi SPBE adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE sendiri adalah konsep dan upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan publik

b. Pelatihan

1. Melakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk pegawai sektor publik
2. Meningkatkan kompetensi petugas pemberi pelayanan
3. Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti kursus tentang kreativitas, teknologi, dan kepemimpinan inovatif

c. Kolaborasi

1. Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti kursus tentang kreativitas, teknologi, dan kepemimpinan inovatif
2. Memfasilitasi kemitraan dengan pihak swasta
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses peningkatan kualitas pelayanan public

Inovasi pelayanan publik Balai Besar KIPM Makassar yaitu SIJEMPOL JALA EKSPOR yang telah dibangun sejak Januari 2024 merupakan solusi untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan di sektor kelautan dan perikanan. Inovasi ini hadir karena masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme perizinan berusaha yang pada akhirnya dapat menghambat peningkatan ekspor produk perikanan. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk memperluas ekspor bagi UMKM serta memberikan kemudahan dan efisiensi dalam layanan perizinan.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Untuk mendukung kegiatan Pelayanan Publik, Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan beberapa kegiatan :

1. Balai Besar KIPM Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil di Kabupaten Sinjai yang dibawakan oleh PIt. Balai Besar KIPM Makassar ibu Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi, M.Sc dengan materi Cara Penanganan Ikan yang Baik di Atas Kapal dimana Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai pada tanggal 1 s/d 2 Juli 2025.
2. Pada tanggal 3 Juli 2025 Balai Besar KIPM Makassar menjadi narasumber dalam kegiatan webinar peningkatan kapaitas SDM dengan tema "Peningkatan Daya Saing Produk Olahan Perikanan melalui Penerapan SKP dan GMP: Prosedur, Praktik dan Implementasi" yang dibawakan oleh ibu Fatima Tayang, S.St.Pi, MM yang dilaksanakan oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyeluluhan Perikanan dengan materi mencakup pemahaman umum tentang Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Good Manufacturing Prictices (GMP) termasuk prosedur penerapan serta praktik dalam implementasi pada produk olahan perikanan.
3. Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu narasumber pada kegiatan workshop Ekspor UMKM yang dilaksanakan oleh Bank Sulselbar dengan tema "Proudly Local, Ready for The World" pada tanggal 19 Agustus 2025 di Hyatt Place Makassar. Narasumber dari Balai Besar KIPM Makassar dibawakan oleh Bapak Muhammad Irfan Rais, S.Pi yang memaparkan persyaratan dan langkah-langkah pengurusan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), dan sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) yang menjadi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari otoritas kompeten ekspor produk perikanan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi trigger bagi pertumbuhan ekspor komoditi perikanan di Sulawesi Selatan dengan lahirnya eksportir-eksportir baru yang akan menembus pasar dunia dari Sulawesi Selatan.
4. Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan fasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi bagi penanggungjawab mutu pada unit pengolahan ikan secara berkala dengan pelatihan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) pada tanggal 29 Juli 2025 di Hotel Dalton yang diikuti oleh penanggungjawab mutu dari unit pengolahan ikan (UPI), pemasok bahan baku, perorangan dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan. Pelatihan HACCP ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Penyeluluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan pelatihan HACCP diharapkan mutu dan keamanan produk perikanan Sulawesi Selatan dapat terjaga dan meningkatkan keberterimaan produk perikanan Sulawesi Selatan di pasar.
5. Pada tanggal 18 September 2025 PIt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar beserta jajaran mengunjungi Balai Pengolahan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar. Kunjungan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengakselerasi pelayanan perizinan ruang laut sebagai usaha budidaya. Kunjungan tersebut diterima langsung Kepala BPSPL Makassar, Andi Muhammad Ishak Yusma.
6. Dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi, Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan kegiatan koordinasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 22 September 2025. Pertemuan ini membahas berbagai langkah strategis

dalam mendukung program pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya terkait peningkatan mutu, daya saing, serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah Sulawesi Selatan.

7. Pada tanggal 29 September 2025 Balai Besar KIPM Makassar melakukan pendampingan pada pelaku usaha (PT. Esaputlii Prakarsa Utama) dengan Otoritas kompeten BPSPL Makassar dalam rangka pengurusan PKKPR terkait dengan rencana ijin usaha pembenihan dan pembesaran lobster di Keramba Jaring Apung.
8. Dalam mendukung IKU ini terdapat beberapa kegiatan yang diikuti oleh Pegawai Balai Besar KIPM Makassar yaitu :

No	Pelatihan/ Sosialisasi/ Workshop	Pelaksanaan	Penyelenggara
1	Meningkatkan Desain Inovasi Pelayanan Publik yang Berkualitas	04 September 2025	SOS - Pusat Inovasi Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam kegiatan inovasi pelayanan publik adalah seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 59 pegawai, terdiri dari pegawai PNS sebanyak 36 pegawai dan pegawai PPNP/PJLP sebanyak 23 pegawai.

ANGGARAN

Untuk mendukung kegiatan Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025, anggaran tersedia pada Pagu 3987.EBA.962.051.00 sebesar Rp.3.600.000,-
Sampai dengan triwulan III tahun 2025, telah terealisasi sebesar Rp. 1.646.000,- atau sebesar 45,72%. Ini mengalami kenaikan sebesar 10,51 % dari TW II Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 1.267.500,- atau 35,21%.

PROGRAM NASIONAL

Didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar untuk Indikator Kinerja Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak termasuk dalam kegiatan Program Nasional pada tahun 2025 namun Inovasi Pelayanan Publik umumnya tergolong sebagai kegiatan yang mendukung program nasional dalam reformasi birokrasi, transformasi digital pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya saing dan kualitas SDM

ASPEK PEMANFAATANNYA

Inovasi pelayanan publik bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
Manfaat inovasi pelayanan publik yaitu :

- Meningkatkan kualitas layanan

Inovasi dapat membuat pelayanan publik lebih efektif, efisien, dan mudah diakses sehingga mampu memberikan rasa kepuasan yang lebih tinggi.

- **Meningkatkan Citra dan Kepercayaan Publik**
Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat ketika layanan terasa lebih manusiawi, responsive dan pemberi layanan terpercaya.
- **Efisiensi Biaya dan Waktu**
Proses yang tadinya lambat dan birokratis bisa dipangkas serta mampu menghemat anggaran operasional.
- **Mempersiapkan menghadapi perubahan**
Inovasi dapat membantu pemerintah beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di masa mendatang.
- **Menjawab kebutuhan masyarakat**
Inovasi dapat membantu pemerintah mengembangkan pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Keterbatasan sumber daya sehingga penerapan inovasi pelayanan publik kurang optimal dilaksanakan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan IV 2025	Penanggung Jawab
1. Agar dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam penerapan inovasi pelayanan publik 2. Melaksanakan pertemuan Tim Inovasi pelayanan publik dalam rangka optimalisasi penerapan inovasi SUEMPOL	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan II 2025	Penanggung Jawab
Telah dilaksanakan koordinasi dengan BPSPK Makassar dan Dinas Provinsi Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 6 Oktober 2025
Penanggung jawab Indikator Kinerja,


Karwit, S.Pi

LAMPIRAN KEGIATAN

Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil di Kabupaten Sinjai



Kegiatan Webinar Peningkatan Kapaitas SDM

"Peningkatan Daya Saing Produk Olahan Perikanan melalui Penerapan SKP dan GMP: Prosedur, Praktik dan Implementasi"



Workshop Ekspor UMKM
 "Proudly Local, Ready For The World"



Pendampingan pada pelaku usaha (PT. Esaputlii Prakarsa Utama) dengan Otoritas kompeten BPSPL Makassar



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
Nama Tim/ja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan III 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	88	88	88	88	88	88	88		88
Realisasi	93,32	92,84	92,84	96,85					
%Capaian	106,04	105,5	105,5	110,06					

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>.

Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SUrvey kepuaSAN masyarakat) melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.

Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Besar KIPM Makassar survey dilakukan terhadap 11 (Sebelas) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu:

- Laporan hasil uji mutu produk perikanan
- Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)
- Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
- Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)
- Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)
- Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:

Formula Isaac & Michael

$$S = \frac{X^2 NP (1-P)}{d^2 (N-1)} + \frac{X^2 P (1-P)}{d^2}$$

X^2 = Nilai chi square tabel = 3,841
 dimana $df = 1$ dan $\alpha = 5\% = 0.05$
 P = Perkiraan proporsi populasi (Jika tidak diketahui maka $P = 0.5$)
 N = Jumlah Populasi
 d = tingkat toleransi kesalahan (0.05)

$$S = \frac{3.841 \times 48 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05^2 \times 47) + (3.841 \times 0.5 \times 0.5)}$$

$$S = \frac{46.092}{1.111} = 41.50 \approx 42$$

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	205	140	1200	291
15	14	210	144	1300	307
20	16	240	168	1400	322
25	19	250	175	1500	338
30	21	260	182	1600	353
35	23	270	189	1700	368
40	25	280	196	1800	383
45	27	290	203	1900	398
50	29	300	210	2000	413
55	31	310	217	2100	428
60	33	320	224	2200	443
65	35	330	231	2300	458
70	37	340	238	2400	473
75	39	350	245	2500	488
80	41	360	252	2600	503
85	43	370	259	2700	518
90	45	380	266	2800	533
95	47	390	273	2900	548
100	49	400	280	3000	563
110	52	410	287	3100	578
120	55	420	294	3200	593
130	58	430	301	3300	608
140	61	440	308	3400	623
150	64	450	315	3500	638
160	67	460	322	3600	653
170	70	470	329	3700	668
180	73	480	336	3800	683
190	76	490	343	3900	698
200	79	500	350	4000	713
210	82	510	357	4100	728
220	85	520	364	4200	743
230	88	530	371	4300	758
240	91	540	378	4400	773
250	94	550	385	4500	788
260	97	560	392	4600	803
270	100	570	399	4700	818
280	103	580	406	4800	833
290	106	590	413	4900	848
300	109	600	420	5000	863
310	112	610	427	5100	878
320	115	620	434	5200	893
330	118	630	441	5300	908
340	121	640	448	5400	923
350	124	650	455	5500	938
360	127	660	462	5600	953
370	130	670	469	5700	968
380	133	680	476	5800	983
390	136	690	483	5900	998
400	139	700	490	6000	1013

RUSDIATI, RPP, 2023

Jumlah layanan yang dilakukan pada Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 3.590 kali, maka berdasarkan tabel diatas jumlah populasi sebanyak 4.000 minimal sampel responden yang diambil adalah sebanyak 351 responden. Hasil survey kepuasan Masyarakat diketahui jumlah responden sebesar 660, hal ini sudah memenuhi jumlah minimal responden sesuai dengan formula Isaac dan Michael tersebut. Peningkatan jumlah responden ini didukung oleh kesadaran Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu/Asisten Inspektur Mutu dalam memberikan link Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan di Triwulan III ini.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111.$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

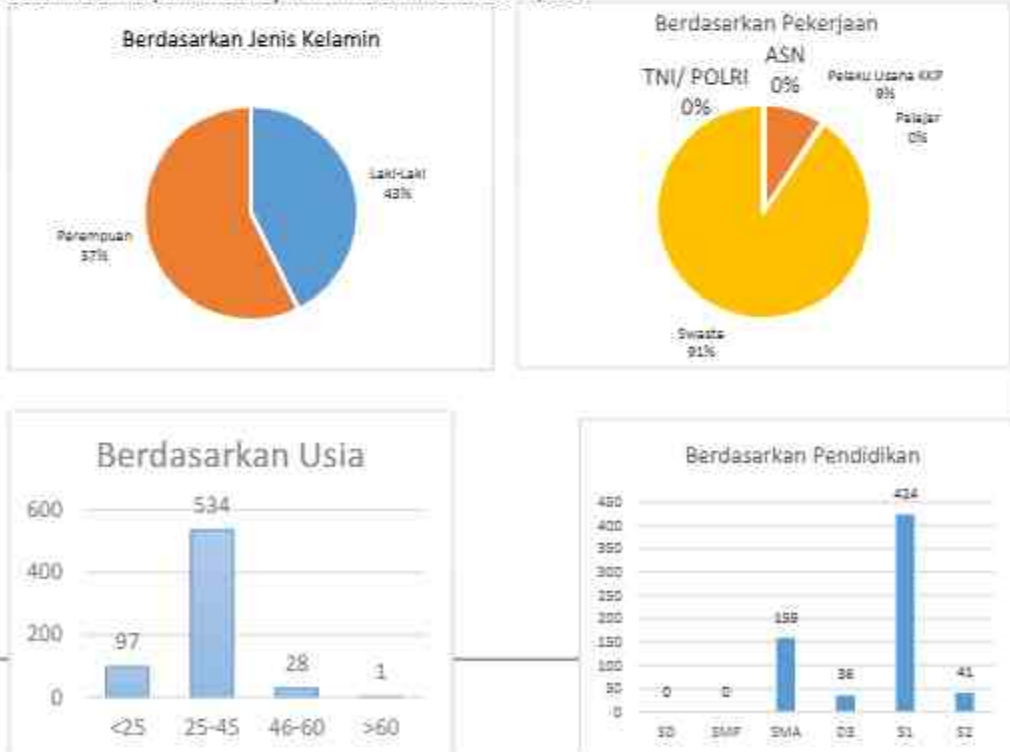
$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar KIPM Makassar.

Pada triwulan III Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan survey terhadap 660 responden, dengan nilai Indeks Kepuasan IKM 3,87 atau sebesar **96,85** setelah dikonversi (**Sangat Baik**). Nilai IKM tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 88 atau capaian 110,06%. Apabila data Hasil IKM Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan dengan TW III Tahun 2025, maka nilai unsur pelayanan dapat dilihat sebagai berikut:

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan		Perubahan
		Triwulan II - 2025	Triwulan III - 2025	
1	Kesesuaian persyaratan	3.730	3.885	↑
2	Kemudahan prosedur	3.724	3.874	↑
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3.674	3.871	↑
4	Kesesuaian biaya	3.757	3.865	↑
5	Kesesuaian produk	3.737	3.877	↑
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3.665	3.873	↑
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3.693	3.871	↑
8	Layanan konsultasi dan pengaduan	3.740	3.879	↑
9	Kualitas isi/sarana	3.702	3.873	↑
	Nilai IKM	92,84	96,85	

Data Rincian Responden survey IKM Triwulan III Tahun 2025 yaitu:



Jika dilihat nilai perunsur, nilai unsur yang paling rendah adalah unsur **kesesuaian biaya**, unsur **Kesesuaian jangka waktu penyelesaian**; serta unsur **Kemudahan dalam penggunaan fitur** dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan unsur kesesuaian biaya, unsur Kesesuaian jangka waktu penyelesaian, serta unsur Kemudahan dalam penggunaan fitur walaupun nilai unsur tersebut sudah berada dalam kategori Sangat Baik.

Dalam pelayanan sertifikasi ekspor, Balai Besar KIPM Makassar menggunakan aplikasi Aplikasi SIAP Mutu (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu) dalam rangka penerbitan SMKHP digunakan pertanggal 1 Maret 2025 secara serentak semua UPT BPPMHKP yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Namun dalam pelaksanaannya Aplikasi SIAP Mutu masih dalam tahap penyempurnaan dan masih ada fitur yang dibutuhkan bagi pengguna layanan.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan III pada tahun 2024, maka nilai IKM pada triwulan III 2025 mengalami peningkatan dari 93,05 menjadi 96,85. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Balai Besar KIPM Makassar memperoleh respon positif dari masyarakat.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan II tahun 2025, maka nilai IKM pada triwulan III 2025 mengalami peningkatan dari 92,84 menjadi 96,85.

Meningkatkannya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Triwulan II Tahun 2025 ke Triwulan III 2025 sejalan dengan layanan konsultasi petugas pelayanan pasca transisi penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Petugas pelayanan memberikan informasi dan solusi terhadap kebingungan pelaku usaha tentang penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan, serta petugas lebih komunikatif meminta kritik, saran dan masukan terhadap peningkatan pelayanan publik dari Balai Besar KIPM Makassar. Sehingga nilai IKM dapat ditingkatkan dari unsur Layanan konsultasi dan Pengaduan pada Triwulan III Tahun 2025.

Balai Besar KIPM Makassar berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan:

- Tanggal 14 Juli 2025 telah dilaksanakan kegiatan bincang inspiratif dengan tema pelayanan prima bekerjasama dengan PT. BNI (Persero) Cabang Makassar. Pada momen tersebut dipaparkan tata cara melakukan melayani pelanggan, teknik berkomunikasi yang baik, etika penampilan dilanjutkan dengan praktek/simulasi serta diskusi dan tanya jawab;
- Pada tanggal 16 Juli 2025 dilaksanakan Briefing Petugas Pelayanan dilaksanakan untuk meningkatkan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, serta memutakhirkan diri dengan ketentuan regulasi, memperkaya diri dengan pengetahuan baru yang terjadi di KKP.
- Pada tanggal 27 Juli 2025 dilaksanakan Sharing Session Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Penerbitan SMKHP, yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman serta meningkatkan kapasitas teknis para petugas dalam menerapkan petunjuk teknis yang berlaku, guna menjamin mutu dan keamanan produk perikanan yang akan diperdagangkan maupun diekspor.
- Pada tanggal 11 September 2025 dilaksanakan Bincang Inspiratif Service Excelent yang bersinergi dengan PT. BSI dalam peningkatan kualitas pelayanan yang dalam melakukan layanan, petugas bukan hanya mempunyai penampilan yang bagus tapi mempunyai skill dan attitude yang baik.
- Pada tanggal 25 September 2025 dilaksanakan Sharing session Pelayanan Publik ramah kelompok rentan sebagai bagian dari komitmen kami untuk memastikan akses informasi dan layanan yang merata. Kegiatan ini menasar masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak, agar mereka memperoleh pemahaman yang jelas mengenai keamanan dan mutu produk kelautan dan perikanan serta pentingnya konsumsi produk yang aman dan berkualitas.

- Pada tanggal 30 September 2025 dilaksanakan Sosialisasi KepMen KP Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Pelayanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara daring yang dihadiri 60 orang peserta yang berasal dari berbagai instansi terkait, pelaku usaha perikanan, serta komunitas nelayan.

Bukti komitmen petugas pelayanan dan IMUT/AIMUT tersebut menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Triwulan III 2025 meningkat dari 92,84 menjadi 96,85. Namun demikian peningkatan berkelanjutan melalui kritik dan saran pengguna layanan tetap dilakukan, sehingga kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dan dipertahankan.

Adapun kritik, saran dan masukan dari masyarakat melalui aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat terdapat tanggapan sebagai berikut;

- Kecepatan merespon konsultasi melalui call center agar dipercepat;
- Beberapa fitur belum terdapat pada aplikasi yang dapat memudahkan pengguna layanan;

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
4.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	3
7.	PPNPN	12
8.	PJLP	10
	TOTAL	42

Anggaran

Alokasi anggaran awal kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2025 yaitu 3987 EBA 994.002 B Semula Rp. 1.292.244.000,- dan terjadi revisi anggaran awal menjadi Rp. 476.445.000,-. Pada triwulan III terjadi revisi anggaran menjadi Rp. 439.951.000,-. Hingga Triwulan III tahun 2025, anggaran yang sudah terealisasi sebanyak Rp. 253.504.590,- atau 57,62 % pada langganan daya dan jasa. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 98.391.000,-. Sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 88.055.410,-.

Alokasi anggaran kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2024 yaitu Rp. 12.500.000,-. Pada Triwulan III tahun 2024 ini, anggaran untuk Survei Kepuasan Masyarakat dihilangkan dan dialihkan ke kegiatan yang lebih urgent.

Anggaran dari Tahun 2024 dengan tahun 2025 berbeda sangat signifikan karena pada tahun 2025 anggaran untuk IKU Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) mengambil pada anggaran Langganan daya dan jasa sebagai penunjang tersedianya sarana dan prasana pelayanan publik.

Program Nasional

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu prioritas nasional karena dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah memberikan perhatian atas percepatan digitalisasi pelayanan publik sejalan dengan Asta Cita yang ke 5 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tools untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Yang mana Survey ini dapat

mengetahui kritik, saran dan masukan dari Masyarakat pengguna layanan pada Balai Besar KIPM Makassar untuk memperbaiki layanan menjadi pelayanan publik yang prima.

ASN BERAHLAK

IKU ini mendukung budaya ASN yang berakhlak di lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan. ASN berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini mencakup memahami kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai alat untuk mengetahui saran kritik masukan Masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik Balai Besar KIPM Makassar untuk memberikan pelayanan yang prima.

Aspek Pemanfaatan

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai Besar KIPM Makassar dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Survey kepuasan Masyarakat ini sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat TW III tahun 2025 terdapat 3 unsur yang terbawah yaitu unsur kesesuaian biaya, unsur Kesesuaian jangka waktu penyelesaian, serta unsur Kemudahan dalam penggunaan fitur dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan meskipun semua unsur sudah mengalami kenaikan nilai.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Memposting terkait biaya melalui sosial media; - Memposting terkait janji layanan melalui sosial media; - Asistensi kepada pengguna aplikasi SIAP Mutu	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Briefing kepada Petugas Layanan pada tanggal 16 Juli 2025, untuk lebih aktif meminta kritik saran dan masukan kepada pengguna layanan untuk perbaikan pelayanan publik. Serta diharapkan Inspektur mutu dan petugas pelayanan memutakhirkan diri dengan ketentuan regulasi, memperkaya diri dengan pengetahuan baru yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sosialisasi kepada pengguna layanan mengenai Layanan terbaru Balai Besar KIPM Makassar terkait dengan Keputusan Menteri KP nomor 20 Tahun 2025 mengenai Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik lingkup KKP pada tanggal 30 September 2025. Yang dimana hasilnya IKM meningkat di triwulan III 2025 dari 93,05 menjadi 96,85.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Makassar, 6 Oktober 2025
Penanggung jawab Indikator Kinerja,



Karwil, S.Pi

DOKUMENTASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN III TAHUN 2025



Infografis Nilai IKM Triwulan III Tahun 2025



Screenshot Dashboard Aplikasi SUSAN KKP



Screenshot Aplikasi SLISAN KKP



Screenshot tampilan isian SKM

**DOKUMENTASI PENGISIAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TRIWULAN III TAHUN 2025**



**DOKUMENTASI KEGIATAN BERSINERGI DENGAN BANK NEGARA INDONESIA (BNI) CABANG MAKASSAR, BADAN
MUTU KKP MAKASSAR MENGADAKAN BINCANG INSPIRATIF PELAYANAN PUBLIK DENGAN TEMA "MENUJU
PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESSIONAL & UNGGUL (PROFESSIONAL & EXCELLENT SERVICE)"**



**DOKUMENTASI BRIEFING PETUGAS PELAYANAN
TRIWULAN III TAHUN 2025**



DOKUMENTASI PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS PELAYANAN



DOKUMENTASI KEGIATAN BERSINERGI DENGAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) CABANG MAKASSAR, BADAN MUTU KKP MAKASSAR MENGADAKAN BINCANG INSPIRATIF SERVICE EXCELENT



DOKUMENTASI SHARING SESSION PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN



DOKUMENTASI SOSIALISASI KEPMENKP NOMOR 20 TAHUN 2025



DOKUMENTASI PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN III TAHUN 2025

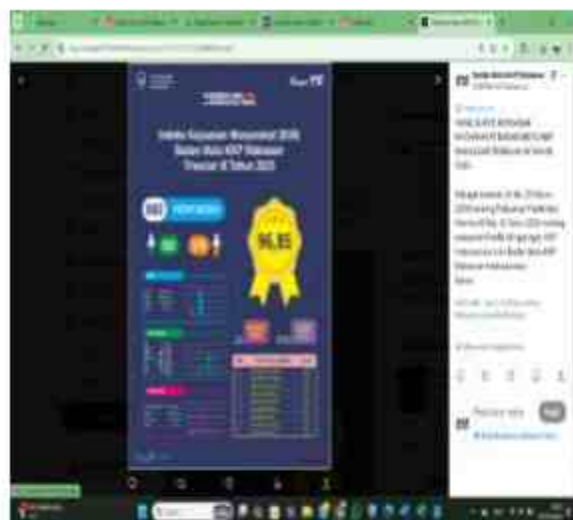
- Instagram



- Facebook



- X/Twitter



- Digisign



- Website PPID KKP



- Website KKP



- WHATSAPP GRUP SIAP MUTU



- SIPPN



